

DR. SIRADJUDDIN, SE., MSI.

# **P**eran Umara Dan Ulama Dalam Pengembangan Perbankan Syariah

(KASUS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH)



**PERAN UMARA DAN ULAMA DALAM  
PENGEMBANGAN PERBANKAN  
SYARIAH DI SULAWESI SELATAN  
(KASUS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH)**

**DR. SIRADJUDDIN, SE., M.Si.**



Alauddin University Press

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:**

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini ke dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

*All Rights Reserved*

**PERAN UMARA DAN ULAMA DALAM PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH  
DI SULAWESI SELATAN (KASUS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH)**

Penulis:

**DR. SIRADJUDDIN, SE., M.Si.**

Editor:

**Rahmawa Muin**

Cetakan: I 2013

xii + 196 halaman, 14 cm x 21 cm

ISBN :978-602-237-636-1

Alauddin University Press

Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36 Samata – Gowa



## SAMBUTAN REKTOR

*Perubahan tidak selamanya membawa perbaikan. Akan tetapi, setiap perbaikan pasti memerlukan perubahan. Demikian*  
 ungkapan bijak Sang Motivator  
 Mario Teguh dalam *Mario Teguh's Quotes*.

Perubahan dan perbaikan merupakan dua frase yang menjadi *core values* bagi siapa saja yang ingin mendapatkan hasil terbaik. Itulah sebabnya Nabi Muhammad saw. menyatakan "Siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia rugi/tertipu". Perubahan merupakan sebuah keniscayaan dalam siklus kehidupan. Manusia yang tidak mau berubah mengikuti perkembangan arus zaman, akan digilas oleh roda perubahan yang terus menggelinding mengitari perputaran waktu. Semangat perubahan yang digagas oleh Rektor dilandasi oleh visi dan misi mulia untuk menjadikan UIN Alauddin sebagai kampus peradaban melalui transformasi ipteks dan pengembangan *capacity building*. UIN Alauddin ingin membuktikan dirinya sebagai sebuah lembaga pendidikan tinggi yang tidak saja menggali doktrin-doktrin agama yang normatif tetapi berusaha menarik wilayah dogmatis itu ke dalam ranah praktis aktual, membumi dan dapat dirasakan manfaatnya untuk kepentingan masyarakat. Rektor sangat menyadari bahwa di era postmodernisme ini, masyarakat mulai kritis mempertanyakan jaminan bagi *output* lembaga pendidikan tinggi. Perkembangan zaman yang semakin maju memicu dan memacu lahirnya semangat kompetitif di tengah masyarakat, tidak terkecuali dunia perguruan tinggi. Lembaga pendidikan yang tidak sanggup menghadapi perubahan dan persaingan, perlahan namun pasti akan ditinggalkan masyarakat. Saya hanya khawatir jika lembaga



pendidikan Islam tidak berubah dan tidak mampu membaca arah perubahan, maka ia hanya akan menjadi lembaga pendidikan kelas dua di tengah masyarakat yang mayoritas muslim atau menjadi lembaga alternatif terakhir bagi mereka yang menemui jalan buntu masuk ke perguruan tinggi pilihan utama. Atas dasar itu, Rektor berupaya melakukan sejumlah terobosan dan strategi untuk memperkokoh jatidiri almamater melalui sejumlah gerakan perubahan, baik perubahan mental (dari analog ke mental digital) maupun perubahan fisik. Hadirnya buku dari program GSB pada tahun ketiga kali ini merupakan realisasi dari visi-misi Rektor, sekaligus respon atas fenomena perkembangan masyarakat saat ini. Oleh karena itu, saya sangat berharap bahwa kesadaran akan pentingnya perubahan dan perbaikan ini tidak saja dipandang sebagai sebuah doktrin institusional, tetapi sebagai sebuah ladang amal saleh sebagai implikasi dari pengamalan firman Allah dan sunnah Rasulullah saw. Akhirnya, saya mengucapkan selamat atas terbitnya buku GSB kali ini, semoga program ini menjadi pioner dan *Institutional branding* bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun penguatan *inner capacity* bagi civitas akademika UIN Alauddin

Samata, November 201  
Rektor

Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT, MS.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian. Sholawat dan salam mudah-mudahan tercurah dan tetap dilimpahkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad saw, Nabi pembawa rahmat alam senesta.

Perkembangan implementasi ekonomi Islam yang di Indonesia lebih dikenal dengan istilah ekonomi syariah, telah mengalami dinamika yang sangat pesat. Bahkan implementasinya dalam berbagai bidang, mulai dari lembaga keuangan perbankan sampai kepada lembaga keuangan non bank telah berhasil menawan perhatian semua kalangan, termasuk kaum profesional karena keunik-an operasionalnya dan prestasi kerjanya. Boleh dikatakan, bahwa gelombang besar gerakan ekonomi syariah telah menyentuh seluruh sendi-sendi perekonomian ditanah air meskipun intensitas gelombang tersebut berbeda-beda dari setiap sektor. Sektor keuangan merupakan wilayah yang paling berhasil memasukinya dengan baik dan pasar telah menerimanya dengan sangat baik pula, sehingga tidak menimbulkan gejolak apapun kecuali kebaikan dan keberkahan.

Antusiasme untuk menerapkan *muamalah syar'iyah* dari masyarakat Muslim Indonesia kini telah merambah ke sektor-sektor perdagangan biasa dan jasa non keuangan. Fenomena ini tidak diragukan lagi, dan ini merupakan buah dari gerakan *dakwah islamiyah* yang dimotori oleh umara, ulama, *asatidz da'I*, *muballigh*, guru agama, kaum intelektual dan profesional muslim dalam kurun waktu yang cukup panjang dengan segala suka duka yang senantiasa menyertai dakwah tersebut.

Karena itu, patut kita bersyukur kepada Allah swt atas karunia-Nya yang telah menghadirkan suasana yang relatif "*syariah friendly*" disini setelah sekian dekade kata-kata syariah telah menjadi hantu yang menakutkan bagi semua kalangan, sehingga rakyat menjadi 'foby' terhadap Islam termasuk sebagian dari kalangan Muslim itu sendiri.

Melihat perkembangan keuangan syariah, terutama perbankan yang begitu pesat memang menggembirakan, tetapi hal itu juga sekaligus memunculkan sebuah tantangan yang tidak mudah untuk dijawab. Salah satu tantangan dari perkembangan tersebut adalah peran serta dari seluruh lapisan masyarakat, terutama umara dan ulama dalam melakukan pembinaan, sosialisasi dan pengawasan, sehingga pengembangan perbankan syariah, termasuk didalamnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dapat terus berlanjut dan berkesinambungan

Buku ini merupakan buah pemikiran dan karya ilmiah dari seseorang yang masih dalam tahap belajar sehingga hanya mengetengahkan kajian pada sisi peran umara dan ulama dalam pengembangan perbankan syariah di Sulawesi Selatan dan secara khusus terkait dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dan belum menyentuh seluruh aspek terkait dengan perbankan syariah.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan terkait dengan isi, apalagi jumlah literatus yang ada masih jauh dari cukup, bahkan untuk rujukan yang lebih teknis masih sangat langka. Kekurangan dan kebutuhan akan sumber-sumber rujukan telah lama dirasakan oleh masyarakat ilmiah dan praktisi industri perbankan syariah, tetapi hingga saat ini belum ada indikasi akan dapat dipenuhi.



Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, dan kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan hanya Allahlah yang mengetahui nilai, ketulusan, keikhlasan budi dan segala apa yang diperbuat oleh hamba-Nya. Karena itu, penulis hanya mampu berdoa semoga segala dedikasi dan apresiasi dari semua pihak yang telah kami terima mendapatkan imbalan pahala yang setimpal dari Allah SWT. Amin.

Makassar, September 2013  
Penulis,

## DAFTAR ISI

SAMBUTAN REKTOR	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
<i>BAGIAN 1 : PENDAHULUAN</i>	1
A. Latar Belakang	1
B. Masalah dan Definisi Operasional	11
<i>BAGIAN 2 : KONSEP UMUM DAN LANDASAN               HUKUM PERBANKAN SYARIAH</i>	15
A. Pengertian Bank Syariah	15
B. Dasar Hukum Bank Syariah	21
C. Bank Syariah Versus Bank Konvensional	23
D. Perkembangan Perbankan Syariah di Dunia Internasional	33
E. Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia	41
F. Peluang dan Tantangan Bank Syariah	50
<i>BAGIAN 3 : KONSEP UMUM TENTANG BANK               PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH</i>	63
A. Pengertian dan Landasan Hukum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	63
B. Prinsip Operasional Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	68
C. Produk-Produk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	87
D. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) vs Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	90

E. Kendala dan Peluang Pengembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	92
BAGIAN 4 : KONSEP UMUM UMARA DAN ULAMA	99
A. Pengertian dan Tugas Umara pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	99
B. Konsep Umum Ulama	110
BAGIAN 5 : KEBERADAAN DAN PERKEMBANGAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DI SULAWESI SELATAN	133
A. Perkembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Sulawesi Selatan	133
B. Keberadaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Sulawesi Selatan	140
BAGIAN 6 : PENGEMBANGAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DI SULAWESI SELATAN	147
A. Peran Umara	147
B. Peran Ulama	161
C. Hubungan Kerjasama Umara dan Ulama	175
BAGIAN 7 : PENUTUP	181
A. Kesimpulan	181
B. Implikasi Penelitian	182
DAFTAR PUSTAKA	183
RIWAYAT HIDUP	195



## DAFTAR TABEL

Nomor	Teks	Halaman
1.	Perbedaan dan Persamaan Bank Islam dengan Bank Konvensional	23
2.	Perbedaan Antara Bunga dan Bagi Hasil	25
3.	Perkembangan Perbankan Syariah Dunia	38
4.	Jumlah Penduduk Sulawesi Selatan, tahun 2006 – 2010	134
5.	Perbandingan Jumlah BPR dan BPRS di Sulawesi Selatan	136
6.	Penghimpunan DPK oleh BPRS 2009-2010	137
7.	Tanggapan Masyarakat Terhadap Keberadaan BPRS di Sulawesi Selatan	141
8.	Tanggapan Responden Berkaitan Operasional BPRS di Sulawesi Selatan	144
9.	Tanggapan Responden Terhadap Keaktifan Umara dalam Kebijakan Pengembangan BPRS di Sulawesi Selatan	149
10.	Tanggapan Responden Terhadap Keaktifan Umara dalam Pengawasan Pengembangan BPRS di Sulawesi Selatan	159
11.	Tanggapan Responden Terhadap Keaktifan Umara Dalam Sosialisasi Pengembangan BPRS di Sulawesi Selatan	160

12. Tanggapan Responden Terhadap Keaktifan Ulama Memberikan Fatwa dalam Pengembangan BPRS di Sulawesi Selatan 164
13. Tanggapan Responden Terhadap Keaktifan Ulama Melakukan Pengawasan dalam Pengembangan BPRS di Sulawesi Selatan 172
14. Tanggapan Responden Terhadap Keaktifan Ulama Melakukan Sosialisasi dalam Pengembangan BPRS di Sulawesi Selatan 173

## Bagian 1

# PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia cukup signifikan, baik dari segi jumlah bank maupun jumlah kantor cabang. Hal dimaksud, ditandai dengan data statistik perbankan syariah Bank Indonesia bulan Januari 2012 tergambar pertumbuhan Bank Umum Syariah,<sup>1</sup> sebagai berikut: 1) Bank syariah Tahun 2005, Jumlah bank 3 buah dan jumlah kantor 304 buah; 2) Bank syariah Tahun 2006, Jumlah bank 3 buah dan jumlah kantor 349 buah; 3) Bank syariah Tahun 2007, Jumlah bank 3 buah dan jumlah kantor 401 buah; 4) Bank syariah Tahun 2008, Jumlah bank 5 buah dan jumlah kantor 581 buah; 5) Bank syariah Tahun 2009, Jumlah bank 6 buah dan jumlah kantor 711 buah; 6) Bank syariah Tahun 2010, Jumlah bank 11 buah dan jumlah kantor 1.215 buah; 7) Bank syariah Tahun 2011, Jumlah bank 11 buah dan jumlah kantor 1.321 buah; dan 8) Bank syariah Tahun 2012, Jumlah bank 11 buah dan jumlah kantor 1.435 buah;

Bila mengamati pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah dilihat dari aspek sistem pelaksanaan, maka ditemukan perbedaan mendasar dengan sistem perbankan konvensional, yaitu: *Pertama*, Sistem perbankan Syariah tidak mengenal bunga. Hal dimaksud, sangat diminati oleh masyarakat untuk menghindari bunga bank. *Kedua*, Prinsip bagi hasil (*nisbah*). Kedua hal dimaksud, cepat diserap oleh masyarakat Indonesia, terutama kalangan ummat Islam. Hal ini dapat ditandai dengan pertumbuhan

---

<sup>1</sup>Bank Indonesia, *Statistik Perbankan Syariah*, Januari 2012



aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dari tahun ke tahun

Ciri khas Bank Syari'ah menggunakan pendekatan dengan mengutamakan prinsip keadilan dan bukan pemberian bunga. Para penulis ekonomi modern sepakat bahwa reorganisasi dalam perbankan harus dilakukan dengan berlandaskan kemitraan usaha (*syirkah*) dan sistem bagi hasil (*mudharabah*).<sup>2</sup>

Sementara itu praktek di lapangan, diakui bahwa transaksi muamalah sering tidak sesuai dengan konsep syari'at Islam. Suatu realita yang tidak bisa dibantah bahwa masyarakat Islam terkenal dengan sifat ketundukannya pada ajaran agama terutama dalam bidang ibadah *mahdja'*. Namun dalam bidang muamalah, nampaknya tidak banyak merubah sifat keberagamaan umat Islam. Meskipun Islam telah lama mengatur hukum muamalah tampaknya aturan ini tidak terlalu mengakar dalam kehidupan umat Islam Indonesia

Era globalisasi, telah terbentuk paradigma baru bagi masyarakat Indonesia yang tampaknya mengarah pada asalnya *back to nature* atau *back to basic*. Bahwa masyarakat semakin mengalami peningkatan semangat keberagamaan (*religiosity*), artinya masyarakat akan kembali memberikan perhatian kepada ajaran agamanya yang selama ini tampaknya ditinggalkan.<sup>3</sup> Semangat keberagamaan bagi umat Islam muncul atas beberapa faktor antara lain: *Pertama*, adanya sebuah kekuatan ekonomi *petro dollar* di negara-negara Islam yang memiliki sumber minyak dunia; *Kedua*, adanya ke-

---

<sup>2</sup>Lihat, M. Nejatullah Siddiqy, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, alih bahasa Sonhadji (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, tt), h.1

<sup>3</sup>Lihat Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h. 1

sadaran umat Islam pada dasawarsa 1970-an yang dikenal dengan istilah kebangkitan Islam pada abad ke-14 Hijriyah; dan *Ketiga*, tampilnya generasi intelektual muslim dari berbagai kedisiplinan ilmu seperti ilmu sosial, ekonomi yang didapatkan di negara Barat maupun di negara-negara berbasis Islam<sup>4</sup>.

Munculnya generasi baru melahirkan beberapa pemikiran-pemikiran seperti ide pendirian bank Islam yang kemudian dianggap sebuah fenomenal oleh beberapa kalangan, gagasan itu sendiri sudah terbaca sejak awal tahun 1940-an. Namun untuk mewujudkan pendirian bank Islam belum mendapat titik terang karena belum stabilnya kondisi sosial politik dan ekonomi dunia Islam.

Perkembangan konsep ekonomi banyak menarik pemikir atau intelektual muslim untuk angkat bicara hingga melahirkan beberapa pola pemikiran yang berbeda-beda. Ada pola pemikiran yang bersifat teoritis, dengan memberikan alternatif konsep dan pola pemikiran bersifat pragmatis dengan upaya mendirikan lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan berdasarkan prinsip Islam.<sup>5</sup> Dan perkembangan selanjutnya, ternyata pola pemikiran pragmatishlah yang tampak dominan

Dasawarsa 1990-an misalnya, dunia perbankan di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup spektakuler dengan memungkinkannya pendirian perbankan yang berbasis non bunga (*non-interest banking*), yang berbeda

---

<sup>4</sup>Lihat Muslimin Kara, Reformasi Kebijakan Perbankan Islam di Indonesia, *Makalah*, yang disampaikan pada Kuliah Umum Fakutlas Syariah IAIN Alauddin Makassar 10 September 2003, h. 1.

<sup>5</sup>Lihat Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait BMI dan Takaful di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 1.

dengan sistem perbankan yang dikenal oleh masyarakat selama ini hingga sekarang yakni bank konvensional yang beroperasi dengan menerapkan sistem bunga. Hal ini, sejalan dengan keluarnya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang memberikan ruang kepada lembaga-lembaga perbankan beroperasi dengan sistem tanpa bunga.

Kebiasaan membungakan uang telah menjadi suatu bagian dalam perekonomian masyarakat Indonesia. Kenyataannya bunga telah dianggap sebagai suatu hal yang sangat penting demi kelancaran sistem perekonomian yang ada, di satu sisi. Sedangkan bank konvensional dalam prakteknya menjadikan bunga sebagai *banking policy* dalam upaya merangsang semangat masyarakat menabung sekaligus sebagai indikator kesehatan perbankan di sisi lain. Dengan sistem bunga masyarakat terlena dalam menabung di bank berbasis bunga dengan sebuah pemikiran bahwa orang bAAisa mendapatkan uang sebanyak-banyaknya atau menjadi "kaya" dengan iming-iming besarnya bunga yang ditawarkan oleh bank terkait (bank yang berbasis bunga) tanpa melalui kerja keras. Selain uang bertambah, dengan menabung di bank uang akan aman. Walaupun tidak semua masyarakat berhubungan langsung dengan bank tapi secara umum peraktek perekonomian masyarakat menggunakan sistem bunga.

Sungguh ironis, sepanjang sejarah manusia, para nabi dan para filosof sebut saja seperti Plato, Aristoteles, Cicero, dengan gencar mencela dan bersikap menolak institusi bunga dan menyatakan bahwa konsep tersebut tidak adil, sehingga semua agama di dunia mengutuk serta



melarang praktek bunga.<sup>6</sup> Akan tetapi praktek membungakan uang tetap berjalan hingga saat ini.

Seiring semangat keberagamaan, kebutuhan sebagian besar masyarakat terhadap perekonomian syariah<sup>7</sup> bergejolak dan akhirnya dapat terjawab dengan diselenggarakannya lokakarya oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Cisarua, Bogor yang berlangsung tanggal 18-20 Agustus 1990 kemudian dipertegas kembali untuk menindaklanjutinya pada acara Munas MUI di Jakarta 22-25 Agustus 1990 yang menghasilkan tim kerja untuk mendirikan bank syariah yang dikenal dengan tim Perbankan MUI yang mempunyai tugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak.<sup>8</sup> Jadi ulama merupakan peletak batu pertama untuk mendirikan bank syariah, sehingga pada perkembangannya ulama seyogyanya berjalan mengiringi perbankan syariah.

Hasil kerja Tim Perbankan Syariah dengan terbentuknya bank syariah di tahun 1991 yakni Bank Muamalat Indonesia yang keberadaanya mendapat respon beragam

<sup>6</sup>Lihat Afzalu Rahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang* (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1997), h. 354.

<sup>7</sup>Berbicara perekonomian syariah Indonesia khususnya, maka yang pertama kali muncul dibenak kita adalah bank syariah, walaupun perekonomian syariah tidak hanya terbatas pada bank syariah tapi juga masuk asuransi/*takaful*, reksadana syariah, pegadaian/*rahn* yang berbasis syariah dan lain-lain. Lembaga keuangan perbankan berbasis syariah merupakan yang pertama kali dibahas secara "komprehensif" oleh berbagai kalangan seperti ulama, cendekiawan di Indonesia.

<sup>8</sup>Pada dasarnya para pakar-pakar ekonomi Indonesia anatara lain Karnaen A Perwaatmadja, A.M. Saefuddin, M. Amin Rais telah melakukan diskusi-diskusi kecil mengenai perbankan syariah sebagai pilar ekonomi Islam yang kemudian diujicobakan pada skala relatif terbatas dengan mendirikan Baitul Tamwil Salman, ITB Bandung. Lihat Muhammad Syafi'i Antonio, *Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 25.

dari berbagai kalangan, sikap optimis, sikap pesimis bahkan sikap ragu-ragu. Apalagi keberadaannya masih diwarnai berbagai pemahaman berbeda yang sangat mendasar mengenai bunga bank termasuk riba.

Kalangan ulama sendiri, telah bergulir berbagai opini, ada yang mengatakan bunga termasuk riba, sehingga hukumnya haram, baik bunga di bank maupun jenis transaksi non perbankan, ada pula yang berkomentar bahwa bunga bank tidak termasuk riba, sehingga tidak ada hukum sanksi jika mengambilnya. Pihak lain, ada yang menetapkan bahwa bunga bank itu *syubhat* dengan berbagai macam alasan, bahkan ada pula ulama yang merasa enggan berbicara tentang haramnya bunga bank.<sup>9</sup> Berbagai macam pendapat ulama tersebut memberikan ruang ketidakpastian kepada umat, ada yang mengatakan bunga tersebut haram dan adapula yang mengatakan halal dan tidak termasuk riba. Padahal, ulama merupakan figur pemberi solusi permasalahan umat sebagai pewaris nabi sebagaimana sabdanya:

عَنْ كَثِيرِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ .. ... إِنَّ  
الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ

Terjemahnya:

Dari Katsir Ibn Qasim berkata Rasulullah saw. Bersabda, sesungguhnya para ulama adalah pewaris nabi.

Sebagai pewaris nabi, ulama segogyanya memberikan contoh teladan dalam berperilaku. Tindakan memberi-

---

<sup>9</sup>Lihat Ikhwan Abidin Basri, "Beberapa Kendala Perbankan Syariah di Indonesia," *Republika*, No. 147 Tahun ke-11, 9 Juni 2003, h. 4.

<sup>10</sup>Lihat Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz I (ttp.: Daar al-Fikr, 1401H/1981M), h. 25.

kan solusi terhadap masalah yang dihadapi umat sebagaimana tindakan Rasulullah saw. menjawab problema yang di alami oleh umatnya dahulu. Demikian juga umara harus menetapkan kebijakan-kebijakan yang dapat menentramkan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya karena umara juga merupakan sosok yang harus ditaati.

Sebagai peletak batu pertama pendirian bank syariah, MUI sendiri tidak memberikan ketetapan hukum mengenai posisi bunga. Hingga akhirnya, dipenghujung 2003 ulama secara kelembagaan mengeluarkan fatwa keharaman bunga ditengah terjadinya gejolak perbedaan pendapat diberbagai kalangan. Sebelumnya telah didahului respon postitif umara yang mengeluarkan regulasi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang dapat beroperasi secara konvensional dan beroperasi berdasarkan bagi hasil serta bank konvensional boleh membuka unit berdasarkan syariah. Demikian pula BPR yang berdasarkan syariah mendapat peluang berkembang, apalagi setelah terjadinya krisis moneter 1998 membuat perekonomian Indonesia lumpuh. Karena itu, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan pemulihan ekonomi nasional termasuk pemberdayaan usaha-usaha mikro, kecil serta menengah.

Dalam *Islamic Banking Statistics 2007*, jumlah BPRS pada Maret terdapat 105 kantor dan Desember telah mencapai 114 kantor.<sup>11</sup> Dari total asset mencapai Rp. 1.202.898,- (Juta Rupiah) pada Desember 2007 dari Rp. 945.005,- (Juta Rupiah) pada Maret tahun yang sama<sup>12</sup>. Skala nasional perkembangan BPRS telah terjadi peningkatan yang cukup signifikan, dari jumlah kelembagaan atau jaringan

---

<sup>11</sup>Bank Indonesia Direktorat Perbankan Syariah, *Islamic Banking Statistics 2007* (Jakarta: Bank Indonesia, 2007), h. 1-2.

<sup>12</sup> *Ibid*, h. 22.

kantornya dan asetnya. Gambaran ini pertanda BPRS mendapat respon positif dari masyarakat sebagai lembaga keuangan perbankan yang dapat memberikan kontribusi perbaikan perekonomian Indonesia. Namun perkembangan tersebut masih sangat minim jika dibandingkan dengan total asset perbankan secara nasional. Selain itu, pada kenyataannya masih banyak UMK dan masyarakat pedesaan yang belum terlayani jasa perbankan sehingga tuntutan terhadap peran BPRS juga semakin besar. Sehingga diharapkan seluruh pihak yang berkompeten dapat membantu untuk memberi pemahaman tentang keberadaan BPRS.

Secara politis dalam pengembangannya tidak mendapat hambatan apa-apa, kebijakan dari umara dan fatwa ulama, memberikan peluang pengembangan BPRS menjadi sangat terbuka. Namun perkembangannya, khusus di Sulawesi Selatan jumlah BPRS belum signifikan untuk dapat memberikan kontribusi apalagi jika disandingkan dengan perbankan konvensional. Sementara Sulawesi Selatan mempunyai potensi yang sangat besar akan keberadaan BPRS, dari sisi kultur masyarakat yang agamis atau semangat keberagamaan, lokasi yang sangat strategis, mata pencaharian masyarakat yang membutuhkan lembaga keuangan.

Perkembangan BPRS dengan keikutsertaan umara dan ulama secara pragmatis dan praktis telah mendampingi sejak lahirnya bank syariah. Keikutsertaan umara dapat dilihat dengan keluarnya kebijakan-kebijakan yang mendorong pertumbuhan bank syariah khususnya BPRS, sedangkan keikutsertaan ulama yang mempunyai kedudukan tersendiri secara struktural di BPRS yakni sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional (DSN). DPS sendiri harus ada di setiap bank syariah sebagai pengawas operasional kesesuaian syariah bagi bank syariah.

Hal ini pula yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional.

Namun sungguh ironis pada perkembangannya, ternyata terdapat pelanggaran aspek syariah yang dilakukan perbankan syariah misalnya sistem *murabahah* yang diwakilkan kepada nasabah untuk melakukan transaksi dengan pihak ketiga (distributor) yang seharusnya diurus oleh pihak BPRS. Bahkan seringkali kasus yang menyimpang lebih dahulu diketahui oleh Bank Indonesia daripada DPS, sehingga DPS baru mengetahui adanya penyimpangan syariah setelah mendapat informasi dari Bank Indonesia.<sup>13</sup> Demikian pertanda lemahnya pengawasan yang dilakukan DPS yang notabene terdiri dari ulama dan pakar ekonom yang diberi "insentif" oleh bank yang bersangkutan.

Operasional yang tidak sesuai syariah oleh sebagian bank syariah menambah keraguan masyarakat untuk berpartisipasi. Apalagi dampaknya bagi perkembangan BPRS yang seyogyanya diharapkan untuk lebih aktif menyentuh masyarakat ekonomi bawah. Bahkan perkembangannya hingga kini belum terlihat maksimal dilihat partisipasi dan jumlah bank syariah masih minim, kurang minat masyarakat untuk "transfer diri" ke bank syariah.

Selain itu, keberadaan industri BPRS yang selama ini telah melayani usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dirasakan penting, khususnya sebagai lembaga keuangan yang memberi jasa pelayanan. Namun dilihat peran dalam pembiayaan BPRS masih menempati porsi yang relatif kecil dibandingkan dengan pembiayaan UMKM oleh bank umum. Hal ini tidak lepas dari kondisi BPR yang secara umum masih menghadapi berbagai kendala dan tantangan

---

<sup>13</sup>Agustianto, Optimalisasi Dewan Pengawas Perbankan Syariah, [www.pesantrenvirtual.com](http://www.pesantrenvirtual.com). Akses 24 September 2007.

seperti struktur pendanaan, kualitas sumber daya manusia, perilaku nasabah, lemahnya pengendalian dan inefisiensi kegiatan operasional, tingkat konsentrasi antara BPR dan BPRS yang tidak merata serta infrastruktur pendukung.<sup>14</sup> Kendala mengembangkan BPRS tersebut harus diatasi oleh semua pihak baik pihak perbankan, umara, ulama serta secara luas masyarakat umum.

Peluang BPRS sangat besar, apalagi secara global, Indonesia mempunyai potensi besar dibandingkan dengan negara-negara lainnya karena memiliki penduduk yang mayoritas umat Islam sehingga, sangat potensial untuk pengembangan perbankan syariah namun pertumbuhan produk syariah masih sangat jauh lebih lambat dibandingkan dengan Malaysia.<sup>15</sup> Khususnya Sulawesi Selatan yang potensi sumber daya alamnya yang memadai sehingga konsep-konsep produk perbankan syariah dapat diberlakukan oleh pihak perbankan seperti sistem *Muzaraah*, *Musaqah*, *Mudharabah*, *Musyarakah* karena potensi agraris, pertambangan, dan sebagainya. Akan tetapi, walaupun masih jauh dari bentuk ideal, umat Islam saat ini telah memiliki kebebasan untuk mendirikan bank berbasis syariah sebagai modal awal yang memadai untuk pengembangan ekonomi umat ke depan.

Proses pengembangan selanjutnya dengan keberadaan sistem yang kondusif sangat berperan dalam mendorong

<sup>14</sup>Sirajuddin, *Analisis Pengaruh Karakteristik Pribadi, Kompetensi Individu, Sikap dan Kemampuan Komunikasi Pemimpin Terhadap Kinerja Karyawan BPR di Sulawesi Selatan*, Disertasi, Makassar: UNHAS, 2008, h. 12.

<sup>15</sup>Bapepam Terbitkan Aturan Baru" [Bisnis dan Keuangan], *Kompas*, Sabtu 25 November 2006 h. 19 lihat pula "Akusisi Bank Lokal Kian Marak", *Kompas*, Selasa, 12 Desember 2006, h. 21 dan bandingkan "Jalan Menuju Pengembangan Bank Syariah" [Ekonomi Bisnis], *Fajar*, Senin, 7 Mei 2007, h. 2.

berkembangnya perbankan syariah. Amat sulit dibayangkan model pengembangan perbankan syariah tanpa adanya dukungan, pengaturan, pembinaan, dan pengawasan dari berbagai pihak termasuk pihak umara, ulama dan masyarakat.

## B. Masalah dan Definisi Operasional

Karena itu, semakin banyaknya dukungan dari ulama maupun umara, terhadap bank syariah, maka memungkinkan peluang pengembangan perbankan syariah Sulawesi Selatan diterima keberadaanya oleh masyarakat. Namun, lebih satu dasawarsa BPRS partisipasi dari beberapa unsur di rasa masih sangat minim sehingga buku akan menguraikan bagaimana peran "umara dan ulama dalam pengembangan BPRS di Sulawesi Selatan" yang dibatasi dengan sub masalah sebagai berikut:

Selain itu untuk menghindari terjadinya pemahaman ambigu, maka pembahasan dalam buku ini, akan dikemukakan pengertian beberapa istilah yang penting guna peran dalam kamus Besar Bahasa Indonesia berarti uang iuran, sumbangan, sedangkan orang yang menyumbang/ penyumbang disebut dengan kontributor<sup>16</sup>

Dalam *Webster's New World*, *Contribute is to give or provide jointly with other, give to a common fund*.<sup>17</sup> Artinya bahwa kontibusi yang dimaksudkan adalah memberi atau menambah keikutsertaan/relasi, sumbangan dan order. Jadi kontribusi umara dan ulama pada pengembangan BPRS dengan memberi sesuatu baik berupa pikiran maupun berupa tindakan.

---

<sup>16</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (ed.II; Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 751.

<sup>17</sup>Victoria Neufeldt dkk, *Webster's New World* (America: Webster's New World Dictionary of America English, 1995), h. 303.



Ulama, adalah orang alim, ahli agama Islam.<sup>18</sup> Dalam Ensiklopedi Islam di Indonesia, ulama secara lugawi diartikan orang yang sangat tahu dan orang yang banyak ilmunya. Sedangkan secara istilah ulama adalah orang yang ahli dalam ilmu agama Islam dan mempunyai integritas kepribadian yang tinggi dan mulia serta berakhlakul karimah, serta berpengaruh di tengah-tengah masyarakat.<sup>19</sup> Ulama yang peneliti maksudkan adalah ulama yang berkecimpung dalam DPS, ulama yang terkait dengan pendirian syariah serta ulama secara umum orang yang menjadi juru dakwah ke umat

Sedangkan umara, adalah sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara dan bagian-bagiannya atau sekelompok orang (penguasa) secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan<sup>20</sup> atau pemimpin pemerintahan.<sup>21</sup> Umara yang peneliti maksudkan adalah Bank Indonesia sebagai badan otonom dalam mengatur atau mengeluarkan kebijakan-kebijakan mengenai kelangsungan perbankan dan sebagai pengawas terhadap perbankan

Sedangkan kata pengembangan dari akar kata kembang berarti proses, cara, perbuatan mengembangkan. Kata mengembangkan berarti melekat terbuka atau membentang, menjadi besar (luas, banyak dan lain-lain), menjadi bertambah sempurna (tentang pribadi, pikiran,

---

<sup>18</sup>EI Santoso dan S. Prianto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Terbit Terang, t th,) h.3 95.

<sup>19</sup>Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia* (Jakarta: CV. Anda Utama, 1992), h. 1429.

<sup>20</sup>*Ibid*, h. 756.

<sup>21</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *op.cit.*, h. 1242.

pengetahuan dan sebagainya), menjadi banyak (merata, meluas dan sebagainya)<sup>22</sup>

Adapun perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan usahanya,<sup>23</sup> Adapun konteks ke Indonesiaan, pengertian BPRS dalam pasal 1 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dijelaskan bahwa BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>24</sup>

Merujuk makna term-term tersebut, perkembangan bank syariah yang sehat dapat diperhitungkan dengan "memasyarakatnya" bank syariah dimasyarakat, mudahnya mengakses bank syariah, jumlah pertumbuhannya signifikan, dan beroperasi sesuai syariah

Jadi peneliti maksudkan bahwa sumbangsih atau masukan berupa *minded* dan *action* dalam bentuk dukungan fatwa, kebijakan, peraturan, pengawasan, sosialisasi ulama maupun umara dalam rangka pengembangan BPRS di Sulawesi Selatan dengan alasan bahwa kedua *stakeholder* yakni umara dan ulama merupakan dua pihak yang mempunyai kekuatan, kekuasaan, serta kesempatan untuk pengembangan BPRS kedepan.

Untuk mengetahui speran umara dan ulama tersebut, digunakan beberapa kategori:

1. Kontribusi umara yang meliputi kebijakan, pengawasan dan sosialisasinya mengenai BPRS kepada pihak

---

<sup>22</sup> *Ibid*, h. 538

<sup>23</sup> Republik Indonesia, "UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan" (Jakarta: Sinar Grafika, t.th), h. 9.

<sup>24</sup> *Ibid*.

perbankan dan masyarakat. Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukurnya adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan; landasan hukum BPRS, memberi ruang operasional BPRS, memudahkan berdirinya BPRS dan kebijakan tersebut mendukung perekonomian masyarakat.
- b. Pengawasan; melakukan pengawasan sesuai standar perbankan, melakukan pengawasan kepatuhan syariah.
- c. Sosialisasi; melakukan seminar, *talkshow*, memberi informasi ke masyarakat mengenai BPRS, melakukan konsolidasi dengan berbagai pihak.

Untuk mengukur masing-masing indikator tersebut dengan nilai kategori (1) tidak aktif (2) cukup aktif (3) aktif (4) sangat aktif.

2. Kontribusi ulama meliputi fatwa, pengawasan dan sosialisasi. Indikator yang digunakan untuk mengukurnya sebagai berikut:

- a. Fatwa; aktif mengiringi fatwa terhadap produk-produk baru yang sesuai syariah dan memberikan fatwa jelas mengenai bunga (*interest*).
- b. Pengawasan; aktif mengawasi operasional BPRS secara langsung maupun tidak langsung akan kepatuhannya terhadap syariah (fatwa).
- c. Sosialisasi; aktif memberi pemahaman kepada masyarakat lewat forum seperti ceramah, diskusi, seminar mengenai BPRS, menulis buku, artikel atau semacamnya; mensosialisasikan fatwa yang di telah diputuskan oleh lembaga keagamaan seperti MUI; mensosialisasikan fatwa kepada praktisi perbankan.

Untuk mengukur masing-masing indikator tersebut dengan nilai kategori (1) tidak aktif (2) cukup aktif (3) aktif (4) sangat aktif.

## Bagian 2

# KONSEP UMUM DAN LANDASARN HUKUM PERBANKAN SYARIAH

## A. Pengertian Bank Syariah

Kata bank berasal dari kata *bangue* dalam bahasa Prancis, dan dari *banco* dalam bahasa Italia, yang dapat berarti peti/lemari atau bangku.<sup>25</sup> Konotasi kedua kata ini menjelaskan dua fungsi dasar yang ditunjukkan oleh bank komersial. Kata peti atau lemari mengisyaratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga, seperti peti emas, peti berlian, peti uang dan sebagainya agar aman, dewasa ini peti bank berarti portepel aktiva yang menghasilkan (*portfolio of earning assets*), yaitu portofolio yang memberi bank “darah kehidupan” bernama laba bersih setelah pengeluaran-pengeluaran dan pajak.<sup>26</sup>

Kemudian penggunaan istilah bank lebih diperluas untuk menunjukkan “meja” tempat penukaran uang, yang digunakan oleh para pemberi pinjaman dan para pedagang valuta di Eropa, pada abad pertengahan untuk memamerkan uang mereka. Dari sinilah awal mula timbulnya perkataan bank, karena urusan bank di masa lampau diambil alih oleh para penukar uang. *Banco* atau meja para pengusaha bank pada abad pertengahan akan dimusnahkan oleh

---

<sup>25</sup>Lembaga Kajian Hukum Ekonomi, *Sejarah dan Perkembangan Metode Perbankan di Indonesia* (Jakarta: Bank Indonesia, 1990), h. 1

<sup>26</sup>Lihat, Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Cet. I; Jakarta: Alfabet, 2002), h. 1. Lihat pula, Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah* (Cet. I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 5

khalayak ramai, jika ia gagal menjalankan fungsinya. Dari sinilah timbulnya istilah "bankrut".<sup>27</sup>

Secara eksplisit al-Qur'an tidak menyebut istilah "bank" sebagai suatu istilah lembaga keuangan. Tetapi kalau yang dimaksud adalah sesuatu yang memiliki unsur-unsur konotasi fungsi yang dilaksanakan oleh peran tertentu dalam kegiatan ekonomi, seperti struktur, manajemen, fungsi, hak, dan kewajiban, maka dengan jelas al-Qur'an menjelaskan istilah-istilah seperti zakat, *shadāqah*, *ganimah* (harta rampasan perang), *ba'i* (jual beli), *dayn* (utang dagang), *māl* (harta) dan sebagainya.<sup>28</sup>

Bank syariah terdiri atas dua kata, yaitu bank dan syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.<sup>29</sup>

Jadi penggabungan kedua kata dimaksud, menjadi bank syariah. Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, bank syariah biasa disebut *Islamic Banking* (bank Islam) atau *interest free banking* (bank tanpa bunga), yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan

---

<sup>27</sup>Lihat, Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam* (Cet. III; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h. 1

<sup>28</sup>Lihat, Zainul Arifin, *op. cit.*, h. 3

<sup>29</sup>Lihat, Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 1

operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maisir*), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*).<sup>30</sup>

Bank syariah atau bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam maksudnya adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dalam tata cara bermuamalah itu dijaui praktek-praktek yang dikawatirkan mengandung unsur-unsur *riba*.<sup>31</sup>

Istilah bank telah menjadi istilah umum yang banyak dipakai di masyarakat dewasa ini. Palang Merah punya "bank darah", di lingkungan kesehatan ada "bank sperma", lembaga-lembaga penelitian punya "bank data", dan orang atau lembaga yang mengalami keruntuhan keuangan disebut *bankrut*.<sup>32</sup> Tentu saja yang dimaksudkan dalam tulisan ini bukan bank-bank semacam itu, melainkan bank dalam arti suatu lembaga intermediasi keuangan yang paling penting dalam sistem perekonomian kita, yaitu suatu lembaga khusus yang menyediakan layanan finansial.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-

---

<sup>30</sup>Lihat, *Ibid.*,

<sup>31</sup>Lihat, Karnaen Purwataatmadja dan M. Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1992), h. 1

<sup>32</sup>Zainul Arifin, *op. cit.*, h. 1

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>33</sup>

Bila dihubungkan kata bank maka kata syariah, yang dimaksud dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah adalah prinsip syariah yang berarti aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mud}ārabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyārahah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murābah}ah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijārah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijārah wa iqtina*).<sup>34</sup>

Pengertian di atas dapat dipahami bahwa di Indonesia berlaku dua sistem perbankan, yaitu sistem konvensional yang menggunakan sistem bunga dan sistem syariah yang menggunakan atau berlandaskan pada ketentuan Islam. Dengan demikian, lembaga perbankan yang kegiatan usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah maka dapat dikatakan sebagai perbankan syariah.

Mengacu pada ketentuan Undang-Undang Perbankan No. 21 Tahun 2008 telah ditegaskan bahwa: a) Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Pasal 1 angka 3), dan b) Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha

---

<sup>33</sup>Republik Indonesia, *Undang-undang No. 21 tahun 2008 tetang Perbankan Syariah*

<sup>34</sup>Republik Indonesia, *Undang-undang No. 21 tahun 2008 tetang Perbankan Syariah*



secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Pasal 1 angka 4).<sup>35</sup>

Dalam undang-undang perbankan, istilah bank syariah sejauh ini belum didefinisikan sebagai jenis bank tersendiri, melainkan tetap hanya ada dua macam bank di Indonesia yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Melalui pendekatan perbankan sistem ganda (*dual banking system*), kedua jenis bank tersebut dapat beroperasi secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah.<sup>36</sup>

Dalam peristilahan internasional, perbankan syariah dikenal sebagai *Islamic Banking* (Bank Islam), atau juga dengan *interest-free banking* (bank tanpa bunga). Dalam prakteknya istilah Bank Syariah, Bank Islam, dan Bank Tanpa Bunga adalah sama, yaitu lembaga keuangan yang operasional dan berbagai produknya di-kembangkan berlandaskan syariah Islam, khususnya berkaitan dengan pelarangan praktek *riba*,<sup>37</sup> (bunga), kegiatan *maisir* (spekulasi), dan *gharār* (ketidakjelasan).<sup>38</sup>

Bank syariah sebagai sebuah lembaga keuangan mempunyai mekanisme dasar, yaitu menerima deposito dari pemilik modal (*depositor*) dan mempunyai kewajiban (*liability*) untuk menawarkan pembiayaan kepada investor

<sup>35</sup>Republik Indonesia, *Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*

<sup>36</sup>Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2008), h. 18

<sup>37</sup>*Riba* itu ada dua macam: *nasiah* dan *fadhl*. *Riba nasiah* adalah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. *Riba fadhl* ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian. Lihat, Mardani, *Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h. 13

<sup>38</sup>Lihat, Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: AMP YKPN, 2002), h. 13.

pada sisi asetnya, dengan pola dan/atau skema pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam. Pada sisi kewajiban terdapat dua kategori utama, yaitu *interest fee current and saving accounts* dan *investmen accounts* yang berdasarkan pada prinsip PLS (*Profit and Loos Sharing*) antara pihak bank dengan pihak depositor, sedangkan pada sisi aset, yang termasuk di dalamnya adalah segala bentuk pembiayaan yang bebas *riba* dan sesuai prinsip atau standar syariah.<sup>39</sup>

Falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjiwai seluruh hubungan transaksinya adalah efesiensi, keadilan dan kebersamaan. Efesisensi mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan sebesar mungkin. Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarnya. Kebersamaan mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas.<sup>40</sup>

Perbankan Islam bebas bunga (*riba*), merupakan usaha jalan keluar terhadap sistem bank konvensional yang mempunyai beberapa kelemahan sebagai berikut:

- a. Transaksi berbasis bunga melanggar keadilan atas kewajiban bisnis.
- b. Tidak fleksibelnya sistem transaksi berbasis bunga menyebabkan kebangkrutan.
- c. Komitmen bank untuk menjaga keamanan uang deposan berikut bunganya membuat bank cermat untuk mengembalikan pokok dan bunganya.
- d. Sistem transaksi berbasis bunga menghalangi munculnya inovasi oleh usaha kecil.

---

<sup>39</sup>Lihat, Zainuddin Ali, *loc. cit.*,

<sup>40</sup>Lihat, Edy Wibowo dan Untung Hendy Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syariah* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007), h.33

- e. Dalam sistem bunga, bank tidak akan tertarik dalam kemitraan usaha kecuali bila ada jaminan kepastian pengembalian modal dan pendapatan bunganya.<sup>41</sup>

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa bank syariah adalah lembaga perbankan yang beroperasi berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam dengan pola bagi hasil yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan memberikan jasa pengiriman uang berdasarkan prinsip syariah.

## B. Dasar Hukum Bank Syariah

Indonesia dalam kebijakan mengenai perbankan menganut *dual banking system*. *Dual banking system* maksudnya adalah terselenggaranya dua sistem perbankan (konvensional dan syariah secara berdampingan) yang pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga yang terjadi adalah bank syariah tidak berdiri sendiri (mandiri), sehingga dalam operasionalnya masih menginduk kepada bank konvensional. Bila demikian adanya perbankan syariah hanya menjadi salah satu bagian dari program pengembangan bank konvensional, padahal yang dikehendaki adalah bank syariah yang betul-betul mandiri dengan berbagai perangkatnya sebagai perbankan yang diakui secara nasional.<sup>42</sup>

UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan landasan yuridis yang mendukung sistem operasional bank syariah. Berdasarkan perangkat hukum tersebut, bank syariah dipahami sebagai bank bagi hasil.

---

<sup>41</sup> Zainul Arifin, *Dasar-dasar.....op.cit*, h. 39-40.

<sup>42</sup> Lihat, Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Cet. I: Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), h. 33-34

Regulasi ini telah mengakomodasi keberadaan bank syariah. Dalam undang-undang tersebut memberikan peluang berdirinya bank syariah baru maupun bank-bank konvensional untuk melakukan *dual banking system* dengan membuka bank syariah dalam bentuk cabang, unit bisnis, dan unit usaha syariah.<sup>43</sup> Berikut ini Penulis kemukakan pasal-pasal yang merupakan dasar hukum dari pelaksanaan bank syariah:

- (1) Pasa 1 ayat 2, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.
- (2) Pasal 1 ayat 3, Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- (3) Pasal 1 ayat 4, Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- (4) Pasal 1 ayat 13, menyatakan bahwa : Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip *mudhārabah*, pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyārakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murābahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa

---

<sup>43</sup>Muhammad Nizarul Alim, *Muhasabah Keuangan Syariah* (Solo: Aqwam, 2011), h. 42

pilihan (*ijārah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijārah wa iqtina*).<sup>44</sup>

### C. Bank Syariah Versus Bank Konvensional

Perbankan konvensional dan perbankan syariah memiliki persamaan sekaligus perbedaan. Persamaannya dalam kerangka hukum di Indonesia adalah sama-sama berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary instution*) yaitu lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (giro, tabungan dan deposito) dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Sedangkan perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional menurut M. Syafii Antonio adalah seperti tampak pada Tabel 1.

Tabel 1. Perbedaan dan Persamaan Bank Islam dengan Bank Konvensional<sup>45</sup>

ASPEK	PERSAMAAN	PERBEDAAN	
		BANK ISLAM	BANK KONVENSIONAL
Operasional	Menghendaki kerja sama yang baik antara pihak bank dan nasabah-debitur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemasaran secara formal dan non formal (khutbah Jumat or pengajian)</li> <li>- Hubungan dgn nasabah dlm bentuk kemitraan</li> <li>- <i>Users of real fund</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemasaran secara formal</li> <li>- Hubungan dengan Nasabah dalam bentuk debitur-kreditur</li> <li>- <i>Creator of money supply</i></li> </ul>
Prinsip operasi	Survivalis bank menghendaki	Berdasarkan margin keuntungan	Memakai perangkat bunga

<sup>44</sup>Republik Indonesia, *Undang-undang No. 21 tahun 2008 tetang Perbankan Syariah*

<sup>45</sup>M. Syafie Antonio, *Bank Islam dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 34.

nal	keuntungan		
Pengelolaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tunduk pada otoritas bank sentral</li> <li>- Kebijakan tertinggi ada pada RUPS</li> <li>- Komposisi pimpinan dan pelaksana terstruktur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Di jajaran pimpinan DS menempati posisi tertinggi, DK berada di bawahnya dgn segala tugas, kewenangan dan tanggung jawab.</li> <li>- Penghimpunan dana &amp; penyalurannya harus sesuai dgn fatwa DPS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Di jajaran pimpinan posisi tertinggi dipegang Dewan Komisaris dengan tugas, kewenangan &amp; tanggung jawab</li> <li>- Tidak terdapat dewan sejenis</li> </ul>
Prinsip Usaha	Pengarahan dan penyaluran dana serta penyediaan jasa	Melakukan investasi yang halal saja	Investasi yang halal dan haram

Lanjutan Tabel 1

Sistem Imbalan	Imbalan diberikan kpd pihak bank & nasabah-kreditur sesuai kesepakatan awal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada saat akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi</li> <li>- Rasio bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh</li> <li>- Kerugian ditanggung bersama</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penentuan bunga dibuat pada saat akad tanpa berpedoman pada untung rugi</li> <li>- Besarnya bunga berdasarkan besarnya jlh uang yg dipinjamkan</li> <li>- Pembayaran bunga sesuai kesepakatan awal tanpa mempertimbangkan untung rugi</li> </ul>
Fungsi	<i>Intermediary</i>	<i>Profit dan Falah Oriented</i>	<i>Business dan Profit Oriented</i>
Tujuan	Pemberdayaan dan peningkatan kualitas kehidupan ekonomi rakyat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prioritas umat Islam</li> <li>- Sangat memperhatikan hal-hal yang tidak <i>riba</i> dan menolak praktek <i>riba</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Semua umat beragama</li> <li>- Tak peduli dengan <i>riba</i> dan segala yang berkait dengannya</li> </ul>
Keabsahan	Sah dalam hukum positif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dari sudut agama tidak ada yang meragukan keabsahan bagi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Umumnya agama (terutama Islam) mengecamnya</li> <li>- Berlawanan dengan</li> </ul>

	hasil - Melaksanakan al- Qur'an surat Luqman ayat 34	al-Qur'an terutama surat Luqman ayat 34
--	---	---

Sumber: Bank Islam dari Teori ke Praktek (M. Syafiie Antonio, 2001 : 34)

Tabel tersebut dapat dipahami bahwa paling tidak ada delapan perbedaan antara sistem perbankan syariah dengan sistem perbankan konvensional. Konsep halal adalah konsep yang paling utama dalam investasi yang dilaksanakan perbankan syariah, yang menjadi pembeda utama antara kedua sistem bank tersebut. Hal ini disebabkan adanya sifat transendental dari setiap transaksi dalam aktivitas muamalah dan hukum Islam. Mengenai prinsip bagi hasil yang menjadi pembeda di samping prinsip jual beli dan sewa-menyewa dari sistem bunga yang digunakan oleh bank konvensional, mempunyai perbedaan khusus dengan sistem bunga tersebut. Hal ini dapat kita lihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Perbedaan Antara Bunga dan Bagi Hasil<sup>46</sup>

No.	Bunga	Bagi Hasil
1.	Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung	Penentuan besarnya rasio/ nisbah bagi hasil dibuat pd waktu akad dgn berpedoman pada kemungkinan untung rugi
2.	Besarnya persentase berdasarkan besarnya jlh uang (modal) yang dipinjamkan	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
3.	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.

<sup>46</sup> *Ibid.*, h. 61

4.	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang "booming".	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai peningkatan jumlah pendapatan.
5.	Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk Islam.	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Sumber: Bank Islam dari Teori ke Praktek (M. Syafiie Antonio, 2001 : 61)

Tabel di atas secara umum dapat dipahami bahwa, perbankan merupakan suatu jenis bisnis yang sangat unik. Keunikannya adalah mengenai peraturan yang sedemikian banyak memagari seluruh transaksinya. Hal ini sebenarnya merupakan tindakan preventif untuk mengamankan dana masyarakat yang dihimpun oleh bank, sehingga bank akan tetap eksis sebagai lembaga kepercayaan masyarakat. Dari pihak internal bank, peraturan dibuat sedemikian rupa untuk menghindari resiko yang akan membawa kerugian *materiil* (materi) ataupun *inmateriil* (bukan materi)

Bank syariah memiliki keunikan lebih banyak lagi. Selain terikat oleh rambu-rambu hukum positif, sistem operasi bank syariah juga terkait "suka maupun tidak suka", dengan sebuah hukum yang lebih tinggi lagi yakni hukum Tuhan. Pelanggaran terhadap hukum Tuhan itu bukan saja akan mengakibatkan *mudjarat* (keburukan) di dunia tetapi juga di akhirat. Sebuah prinsip dasar kehidupan yang memiliki visi kehidupan yang sangat jauh ke depan. Sistem perbankan syariah tidak hanya memiliki visi 20 tahun, 50 tahun ataupun 100 tahun, tetapi lebih dari itu hingga kehidupan setelah datangnya kematian. Sehubungan dengan itu maka setiap insan yang memiliki hasrat dan semangat untuk mengembangkan sistem perbankan syariah harus benar-benar memahami seluk beluk prinsip dasar perbankan



syariah agar tidak salah dalam melakukan implementasinya hingga melanggar hukum-hukum Tuhan.

Sebenarnya pola transaksi dalam bank konvensional dapat diterima oleh sistem perbankan syariah, selama sejalan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Namun secara fundamental komponen-komponen yang membedakan bank syariah dan bank konvensional adalah sebagai berikut: (1) Praktek "pinjaman (*loan*)" yang berbasis bunga pada bank konvensional secara total tidak ada dalam bank syariah, kecuali "pinjaman bebas bunga (*qardh hasan*)"; (2) Sebagai ganti bentuk pinjaman dan praktek-praktek berbunga, bank syariah mengajukan model-model alternatif yang mengacu kepada bagi hasil (*profit loss sharing*) : *Mudjārabah*, *musyārahah*, *ba'i bilmurābahah*, *ba'i muajjal*, *ba'i salam*, *ija'rah*, *muzārah* dan *musāqqat*; dan (3) Muncul istilah deposito investasi atau rekening investasi dalam bank syariah dan deposito berjangka pada bank konvensional.<sup>47</sup>

Sedangkan secara khusus perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu:<sup>48</sup>

1) Akad

Dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekwensi *duniawi* dan *ukhrawi* karena dilakukan berdasarkan hukum Islam.<sup>49</sup> Dengan demikian produk apapun yang dihasilkan semua perbankan, termasuk di dalamnya perbankan syariah, tidak akan terlepas dari transaksi yang dalam istilah fikih muamalahnya disebut dengan *'aqd*.

---

<sup>47</sup>Lihat, Ma'ruf Amin, *Prospek Cerah Perbankan Islam* (Cet.I: Jakarta: LeKAS, 2007), h. 90-91

<sup>48</sup>Lihat, Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan & Perasuransian Syariah di Indonesia* ( Jakarta: Kencana,2004), h. 102-112

<sup>49</sup>Lihat, Ma'ruf Amin, *op. cit.*,h. 99

Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya harus memenuhi ketentuan akad yang sudah ditetapkan dalam buku-buku fikih, yaitu rukun dan syaratnya.<sup>50</sup> Terkait dengan rukunnya bisa meliputi; adanya penjual, pembeli, barang, harga dan akad/*ijab - qabul*. Terkait dengan syaratnya bisa meliputi;

- (a) Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram bisa menyebabkan transaksi batal.
  - (b) Harga barang dan jasa harus jelas.
  - (c) Tempat penyerahan harus jelas karena akan berdampak pada biaya transportasi.
  - (d) Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan. Tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai.<sup>51</sup>
- 2) Praktek Deposito

Praktek deposito yang dipakai dalam bank syariah adalah *Deposito Investasi* atau *Rekening Investasi*, yang secara fundamental berbeda dengan praktek "Deposito Berjangka" dalam bank konvensional yang lebih dahulu menentukan persentase bunga dari jumlah modal sesuai jangka waktu tertentu. Sedangkan dalam bank syariah, persentase kegiatan bank dalam jangka

---

<sup>50</sup>Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian hal yang tak terpisahkan dari suatu perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada. Lihat, Abdul Azis Dahlan, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5 (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), h.1510 dan 1691

<sup>51</sup>Ma'ruf Amin, *loc. cit.*.

waktu tertentu, sehingga pemegang investasi juga mungkin menghadapi resiko kerugian.

### 3) Metode Penggunaan Dana

Cara yang dianut bank konvensional dalam menggunakan dana, hanyalah bentuk pinjaman atau kredit berbunga. Sedangkan bank syariah menganut sistem investasi dengan berbagai metode penggunaan dananya. Tujuan yang menjadi prioritas pun dalam bank konvensional adalah mengeruk keuntungan sebesar mungkin, sedangkan yang menjadi prioritas dalam bank syariah adalah mengeruk keuntungan secara Islami.

### 4) Pelayanan Kemanusiaan

Praktek ini merupakan kekhususan yang tidak terdapat dalam bank konvensional. Pelayanan kemanusiaan merupakan kegiatan perbankan syariah dalam rangka mencapai sasaran *ukhuwah Insāmiyah* dan pemerataan perkembangan ekonomi-sosial yang digariskan syariah Islam. Dalam konteks ini, seseorang punya hak kepemilikan, kebebasan ekonomi, melakukan aktivitas ekonomi dan pelbagai bentuk transaksi ekonomi, namun hak-hak ini dibatasi dari segi realitas sosiologis tempat ia berada.<sup>52</sup> Secara garis besar pelayanan kemanusiaan ini berasal dari kotak zakat, yang diberikan baik secara kontan atau dalam pembiayaan suatu proyek untuk para *mustahiq*-nya; fakir, miskin, amil zakat, *mu'allaf*, hamba sahaya (kalau ada), orang yang dililit piutang, di jalan Allah (*fi sabilillah*) dan *Ibn sabil* (termasuk dalam kategori ini beasiswa).

### 5) Lembaga Penyelesaian Sengketa

---

<sup>52</sup>Hasbi Hasan, *Pemikiran dan Perkembangan Ekonomi Syariah di Dunia Islam Kontemporer* (Jakarta: Gramata Publishing, 2011), h. 80

Berbeda dengan perbankan konvensional, pada perbankan syariah jika terjadi perbedaan atau perselisihan antara bank dengan nasabahnya, maka kedua belah pihak tidak menyelesaikannya di Pengadilan Negeri, tetapi menyelesaikannya sesuai dengan tata cara dan hukum materi syariah.

Lembaga yang mengatur hukum materi dan atau berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI), yang sekarang ini dikenal dengan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)<sup>53</sup> yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

#### 6) Struktur Organisasi

Bank syariah memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional dalam hal komisaris dan direksi, namun unsur utama yang membedakannya adalah keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah. DPS dalam struktur organisasi adalah wajib bagi lembaga yang ingin beroperasi dengan berbasis sistem syariah.<sup>54</sup> DPS berada pada posisi setingkat

---

<sup>53</sup>BASYARNAS merupakan arbitrase intitusional khusus yang dapat dijadikan sebagai alternatif forum untuk menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah. Intitusi ini diintrodusir oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dengan Fatwa Nomor 53/DSN-MUI/III/2006. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. (Pasal 1 angka 1). Lihat, Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.

<sup>54</sup>Veithzal Rivai, et.al., *Ekonomi Syariah Konsep, Praktek & Penguatan Kelembagaannya* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), h. 170

Dewan Komisaris pada bank. Hal ini untuk menjamin efektifitas dari setiap opini yang diberikan oleh DPS dan dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), setelah anggota DPS mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN). DSN merupakan badan otonom Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara *eks-officio* diketuai oleh ketua MUI.

Dewan Syariah Nasional (DSN) didirikan berdasarkan SK MUI No. Kep. 754/II/1999. Dewan Syariah Nasional (DSN) atau *Al-Hai'ah al-Syari'ah al-Wathaniyah* (*National Sharia Board*) adalah sebuah institusi di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dibentuk pada awal tahun 1999. Lembaga ini bertugas menggali, mengkaji dan merumuskan nilai prinsip-prinsip hukum Islam (*syari'ah*) untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga-lembaga keuangan syariah (termasuk bank syariah), serta mengawasi pelaksanaan dan implementasinya. Dewan Syariah Nasional (DSN) juga memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.<sup>55</sup>

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa fungsi Dewan Syariah Nasional (DSN) yaitu:

- (a) Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam perekonomian;
- (b) Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan;
- (c) Mengeluarkan fatwa atas produk keuangan syariah;

---

<sup>55</sup>Lihat, Isriani Hardini dan Muh. H. Giharto, *Kamus Perbankan Syariah* (Cet. I; Bandung: Marja, 2007), h. 82

(d) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

7) **Bisnis dan Usaha yang Dibiayai**

Dalam bank syariah, bisnis dan usaha yang dilakukan harus benar-benar sesuai dengan aturan syariah. Karena itu bank syariah tidak mungkin membiayai usaha yang memproduksi produk yang diharamkan.

Dalam perbankan syariah sebagaimana di-kemukakan Ma'ruf Amin, suatu pembiayaan tidak akan disetujui sampai dapat dipastikan beberapa hal pokok, di antaranya:

- (a) Obyek pembiayaannya halal.
- (b) Proyek yang dilakukan memberikan manfaat kepada masyarakat banyak, bukan justru merusaknya.
- (c) Memberikan pendapatan seluas mungkin kepada anggota masyarakat.
- (d) Memelihara dan menumbuhkembangkan harta.
- (e) Melindungi kepentingan masyarakat banyak.
- (f) Proyek tidak terkait dengan perbuatan mesum atau asusila.
- (g) Proyek tidak terkait dengan perjudian.
- (h) Usaha itu tidak berkaitan dengan industri senjata ilegal atau tidak ber-orientasi pada pengembangan senjata pemusnah massal.
- (i) Proyek tidak merugikan syiar Islam, baik secara langsung atau tidak langsung.<sup>56</sup>

Dengan demikian dapat dipahami bahwa proyek yang tidak baik menurut Islam, maka perbankan syariah tidak akan membiayainya.

---

<sup>56</sup>Ma'ruf Amin, *op. cit.*, h. 101

#### 8) Lingkungan Kerja dan *Corporat Cultural*

Bank syariah harus memiliki lingkungan kerja yang Islami. Dalam hal etika misalnya, sifat *amānah* dan *shidiq* harus menjadi ciri khusus setiap karyawan bank syariah, sehingga tercermin integritas eksekutif muslim yang baik. Di samping harus *skilful* dan profesional (*faṭānah*) dan mampu melakukan tugas secara team-work sehingga informasi merata di seluruh fungsional organisasi (*tabliq*).

Demikian secara umum dan khusus aspek-aspek persamaan dan perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Perbankan konvensional merupakan lembaga keuangan yang sangat vital dalam perekonomian dunia masa kini dan Islam tidak perlu menghapuskan lembaga keuangan (konvensional) ini, melainkan memasukkan nilai-nilai Islam ke dalamnya sehingga sejalan dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

### D. Perkembangan Perbankan Syariah di Dunia Internasional

Gagasan mengenai Bank Syariah telah muncul sejak lama, ditandai dengan banyaknya pemikir-pemikir muslim yang menulis tentang keberadaan bank Islam, misalnya Anwar Qureshi (1946), Naeim Siddiqi (1948) dan Mahmud Ahmad (1952).<sup>57</sup> Awal abad ke 20 merupakan masa kebangkitan dunia Islam dari "ketertidurannya" di tengah pergolakan dunia. Kondisi ini membawa kesadaran baru untuk menerapkan prinsip dan nilai-nilai syariah dalam kehidupan nyata. Salah satu upaya adalah dalam penerapan lembaga keuangan syariah yang didasarkan atas prinsip-

---

<sup>57</sup>Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, cet. I (Yogyakarta: Ekonisia - FE UII, 2003), h. 19

prinsip Islam. Perintisan penerapan sistem *profit and loss sharing*, sebagai inti bisnis lembaga keuangan syariah, tercatat telah ada sejak tahun 1940-an, yaitu upaya mengelola dana jemaah haji secara nonkonvensional di Pakistan dan Malaysia.<sup>58</sup>

Rintisan berikutnya yang merupakan tonggak sejarah perkembangan perbankan syariah adalah *Islamic Rural Bank* di daerah Mit Ghamr yang didirikan oleh Dr. Ahmed el-Najar yang permodalannya dibantu oleh Raja Faisal pada tahun 1963 hingga 1967 di Kairo, Mesir, walaupun pada akhirnya operasionalnya diambil alih oleh *National Bank of Egypt* dan *Central Bank of Egypt*.<sup>59</sup>

Secara kolektif gagasan berdirinya bank syariah di tingkat internasional, sebagaimana dikemukakan Gemala Dewi, muncul dalam konferensi negara-negara Islam sedunia di Kuala Lumpur, Malaysia pada bulan April 1969, yang diikuti 19 negara peserta. Konferensi tersebut menghasilkan beberapa hal, yaitu :

1. Tiap keuntungan haruslah tunduk kepada hukum untung dan rugi, jika tidak ia termasuk riba dan riba itu sedikit/ banyak haram hukumnya.
2. Diusulkan supaya dibentuk suatu bank syariah yang bersih dari sistem riba dalam waktu secepat mungkin;
3. Sementara waktu menunggu berdirinya bank syariah, bank-bank yang menerapkan bunga diperbolehkan

---

<sup>58</sup>Lihat, Fatharrahan Djamil, *Urgensi Undang-undang Perbankan Syariah di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis (Agustus 2002), h. 39

<sup>59</sup>*Ibid.* Lihat pula, Ma'ruf Amin, *Prospek Cerah Perbankan Islam*, cet. I (Jakarta: Lekas, 2007), h.51. Lihat pula, Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 187



beroperasi, namun jika benar-benar dalam keadaan darurat.<sup>60</sup>

Kemudian tonggak sejarah lainnya bagi perkembangan bank Islam yaitu dengan didirikannya *Islamic Development Bank* (IDB).<sup>61</sup> Pendiriannya diawali dengan sidang menteri luar negeri negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Karachi, Pakistan pada bulan Desember 1970, saat itu Mesir mengajukan proposal untuk mendirikan bank syariah internasional. Setelah melalui persetujuan negara-negara OKI lainnya dan tahapan-tahapan tertentu, maka pada tahun 1975 berdirilah IDB yang beranggotakan 22 negara Islam pendiri.<sup>62</sup> Lembaga ini kemudian berperan penting dalam memenuhi kebutuhan dana negara-negara Islam untuk pembangunan dan secara aktif memberi pinjaman bebas bunga berdasarkan partisipasi modal negara tersebut. Di samping itu, berdirinya IDB juga memotivasi banyak negara lain untuk mendirikan lembaga keuangan syariah. Pada akhir periode 1970-an dan awal dekade 1980-an, lembaga keuangan syariah bermunculan di Mesir, Sudan, negara-negara Teluk, Pakistan, Iran Malaysia, dan Turki.<sup>63</sup>

Bank-bank syariah dalam bentuknya yang sekarang menurut Sjahdeini, untuk pertama kalinya didirikan di

<sup>60</sup>Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, ed. I (Jakarta : Kencana, 2004), h. 55-56

<sup>61</sup>Lihat, Daud Vicary Abdullah dan Keon Chee, *Buku Pintar Keuangan Syariah, Cara Mudah Memahami Prinsip, Praktik, Prospek dan Keunggulan Keuangan Islam di Zaman Kita* (Singapore: Zaman, 2010), h. 25

<sup>62</sup>Adiwarman Azwar Kanim, *Praktek Pengembangan Perbankan Syariah di Negara-negara Islam*, (Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Hukum Ekonomi, FHUI, Depok, 26 Pebruari 2003), h. 1

<sup>63</sup>Heri Sudarsono, *op. cit.*, h. 20. Lihat pula, Ma'ruf Amin, *op. cit.*, h. 107-108

Dubai dengan nama *Dubai Islamic Bank* pada tahun 1973 oleh sekelompok pengusaha muslim dan beberapa negara. Dalam jangka 10 tahun sejak pendirian bank tersebut telah muncul lebih dari 50 bank yang bebas bunga. Di luar negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, bank-bank tersebut telah didirikan pula di Denmark, Luxembourg, Switzerland, dan United Kindom.<sup>64</sup>

Selanjutnya Sjahdeini mengemukakan, perbankan syariah terus tumbuh karena nilai-nilainya yang berorientasi pada etika bisnis yang sehat. Perbankan syariah telah merambah dan diterima bukan saja di negara-negara muslim tetapi juga negara-negara non muslim. Negara-negara yang sebagian besar penduduknya bukan muslim telah pula mengembangkan perbankan syariah. Kesempatan pengembangan-nya di negara non muslim tersebut ternyata cukup besar. Ketika diadakan *Islamic Banking Conference* di Toronto, Kanada, pada tanggal 25 Mei 1995, Don Blankarn, mantan Ketua *Special Commite on Banks and Banking* telah mengemukakan "*There is a huge opportunity for Islamic banking and Finance in Canada.*"<sup>65</sup>

Sekalipun baru tahun 1970-an perbankan syariah dalam bentuknya yang sekarang ini muncul, seperti yang dikemukakan di atas, tetapi menurut hemat penulis prkatek-praktek dasarnya dan asas-asasnya berasal jauh sebelum itu, yaitu abad ke-7 atau 1400 tahun yang lalu, karena falsafah dan asas-asasnya telah digariskan di dalam Al-quran dan dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW. Hal ini di dasarkan pada Q.S. Al-Rum (30) : 39

---

<sup>64</sup> Lihat, Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Suatu Alternatif Kebutuhan Pembiayaan Masyarakat*, Jurnal Hukum Bisnis, Agustus 2002, h. 8

<sup>65</sup> *Ibid.*, h. 10

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّمِرْتَوْأ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْتَوُا عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٦٦﴾

Terjemahnya

*Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).<sup>66</sup>*

Larangan riba juga terdapat dalam Q.S. al-Baqarah (2) : 278-279, sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتِغُوا فَلََكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Terjemahnya :

*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.<sup>67</sup>*

<sup>66</sup>Deparetemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), h. 575

<sup>67</sup>*Ibid.*, h. 58-59

Riba merupakan pemerasan kepada orang yang sesak hidupnya (terdesak oleh kebutuhan). Islam sangat mencela penggunaan modal yang mengandung riba.<sup>68</sup> Dalam Perjanjian Baru larangan riba dijumpai dalam Lukas 6 : 35.

*Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah Yang Mahatinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat.*<sup>69</sup>

Jadi, Islam bukanlah satu-satunya agama yang melarang pembayaran bunga. Banyak pemikir zaman dahulu yang berpendapat bahwa pembayaran bunga adalah tidak adil. Bahkan menurut Zainul Arifin, meminjam uang dengan bunga dilarang pada zaman Yunani kuno. Aristoteles adalah orang yang amat menentang dan melarang bunga, sedang Plato juga mengutuk praktek bunga.<sup>70</sup>

Perkembangan beberapa bank syariah di dunia dari tahun 1973 sampai 1999 dapat ditampilkan dalam Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Perkembangan Perbankan Syariah Dunia<sup>71</sup>

Thn	Jlh Bank Islam	Nama Bank Islam
1973	1	The Mit Ghamr Bank
1972	1	Nasser Social Bank, Cairo

<sup>68</sup>Mustafa Edwin Nasution, et. al., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 42

<sup>69</sup>Lembaga Alkitab Indonesia, *Alkitab* (Cet. 80; Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2008), h. 77

<sup>70</sup>Lihat, Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Cet. III; Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005), h. 15

<sup>71</sup>Gemala Dewi, *op. cit.*, h. 58

1973	1	Philippine Amanah Bank
1975	2	Islamic Development Bank, Jeddah dan Dubai Islamic Bank, Dubai
1977	3	Faisal Islamic Bank, Egypt. Faisal Islamic Bank, Sudan dan Kuwait Finance House, Kuwait
1978	2	Jordan Islamic Bank, Jordan. Islamic Finance House Universal Holding, Luxemburg
1979	2	Bahrain Islamic Bank, Bahrain. Iran Islamic Bank Islamic Internasional Bank, Cairo
1980	1	Dar al-Mal al-Islami, Switzerland Islamic Finance
1981	4	House, England, Jordan Finance House, Jordan. Islamic Bank of Investmen House, Jordan
1982	3	Islamic Bank Bangladesh, Bangladesh Kibrish, Islamic Invesment House, Jordan
1983	10	Qatar Islamic bank, Qatar. Tadamon Islamic Bank, Sudan. Faisal Islamic Bank, Bahrain. Bank Islam, Malaysia. Faisal Islamic Bank, Senegal. Islamic Bank International, Denmark. Faisal Islamic Bank, Niger. Sudan Islamic Bank, Sudan. Bank al-Barakah al-Sudani, Sudan
1994	5	Al-Barakah Bank, Bahrain. Islamic Finance House, Jordan. Bait al-Tamwil al-Saudi al-Tunisi. Al-Baraka Turkish Finance Institution, Turkey.
1985	1	Al-Barakah Islamic Bank, Muritania
1992	1	Bank Muamalat Indonesia
1999	2	KC IFI Syariah, Bank Syariah Mandiri

Sumber : *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, ed. I (Gemala Dewi, 2004 : 58)

Tabel di atas dapat dipahami bahwa sejak tahun 1973 sampai dengan tahun 1999 telah berdiri 37 bank syariah. Namun istilah bank syariah hanya dikenal di Indonesia sedangkan di dunia Internasional dikenal dengan *Islamic Bank* atau Bank Islam. Namun praktek operasional-nya tetap sama.

Pesatnya perkembangan bank syariah menimbulkan ketertarikan bank konvensional untuk menawarkan produk-produk bank syariah. Hal tersebut terlihat dari tindakan

beberapa bank konvensional yang membuka sistem tertentu di dalam masing-masing bank dalam menawarkan produk bank syariah, misalnya *Islamic Windows* di Malaysia, *The Islamic Transactions* di cabang Bank Mesir, dan *The Islamic Services* di cabang-cabang bank perdagangan Arab Saudi.<sup>72</sup>

Kini, perbankan syariah telah mengalami perkembangan yang cukup pesat dan menyebar ke banyak negara, bahkan ke negara-negara Barat. *The Islamic Bank International of Denmark* tercatat sebagai bank syariah pertama yang beroperasi di Eropa, yakni pada tahun 1983 di Denmark. Kini, bank-bank besar dari negara-negara Barat, seperti *Citibank*, *ANZ Bank*, *Chase Manhattan Bank* dan *Jardine Fleming* telah membuka *Islamic Window* agar dapat memberikan jasa-jasa perbankan sesuai syariat Islam.<sup>73</sup>

Alasan dibukanya *Islamic Window* tersebut, karena di kalangan investor terjadi pergeseran paradigma dalam berinvestasi, yaitu mereka tidak lagi ber-investasi karena tertarik dengan bunga yang kelihatannya saja menjanjikan keuntungan yang berlipat ganda. Mereka berinvestasi secara lebih kritis, yaitu dengan meneliti realitas penghasilan yang mungkin diperoleh dan metode yang diterapkan oleh institusi pemutar uangnya. Nampaknya metode bagi hasil yang diterapkan oleh bank syariah lebih logis dan *fair* bagi mereka, sehingga keberadaan bank syariah bisa berkembang. Selain itu, bank-bank terkemuka tersebut juga memiliki alasan komersil, yaitu ingin menyerap dana dari investor-investor Timur Tengah yang memiliki banyak kekayaan dari minyak.<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup>*Ibid.*, h. 59

<sup>73</sup>Lihat, Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 24

<sup>74</sup>Lihat, Edy Wibowo dan Untung Hendy Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syariah* (Cet. I: Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), h. 10

Namun menurut penulis alasan yang dikemukakan di atas, merupakan cabang dari alasan pokok yang mendasari dibukanya *Islamic Window* di bank-bank terkemuka dunia tersebut. Sebenarnya yang mendasarinya adalah keadilan yang terdapat dalam bank syariah.

Banyaknya pendirian dan pesatnya perkembangan bank syariah di dunia telah memberikan alternatif baru bagi konsumen pengguna jasa perbankan untuk menikmati produk-produk perbankan dengan metode nonbunga. Hal ini mengisyaratkan bahwa dunia perbankan internasional telah mengadaptasi prinsip ekonomi yang ditawarkan oleh Islam.

#### E. Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Secara historis perbankan di Indonesia sudah dimulai sejak zaman kolonialis Belanda. Pada waktu itu operasional bank berdasarkan pada sistem bunga. Dalam hal bank memberikan jasa kepada nasabah, maka imbalan yang diminta bank berupa *fee*. Hal tersebut terus berlangsung pada era kemerdekaan dengan dilakukan nasionalisasi terhadap bank-bank milik Belanda. Antara lain *De Javasche Bank* dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1951, *Bank Escompto* yang semula bernama *Nederlandsche Indische Handelsbank* (NIH) dinasionalisasi menjadi Bank Dagang Negara dengan Undang-Undang Nomor 13/Prp/1960, dan sebagainya.<sup>75</sup>

Umat Islam Indonesia khususnya telah lama mendambakan adanya bank yang beroperasi sesuai dengan syariat Islam. K.H. Mas Mansur, Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah periode 1937-1944 telah menguraikan

---

<sup>75</sup>Abdul Ghofur Anshori, et. al., *Kapita Selekt Perbankan Syariah di Indonesia*. Cet. I; (Yogyakarta: UII Press, 2008), h. 4

pendapatnya tentang penggunaan jasa Bank Konvensional sebagai hal yang terpaksa dilakukan karena umat Islam belum mempunyai bank sendiri yang bebas riba.<sup>76</sup>

Pelaksanaan keinginan untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah di bidang lembaga keuangan di tanah air dimulai dengan berdirinya lembaga keuangan *Bait al-Mal wa al-Tamwil* (BMT) yang berstatus Badan Hukum Koperasi pada tahun 1980-an.<sup>77</sup>

Dengan dibebaskannya penentuan besar bunga kepada masing-masing bank, maka suatu bank dapat menetapkan bunga sebesar 0% yang memungkinkan beroperasinya bank tanpa bunga dengan dasar bagi hasil keuntungan. Namun karena belum dimungkinkan pendirian bank baru, sedangkan bank-bank yang ada masih menganggap sistem bank tanpa bunga sebagai bisnis yang dapat menguntungkan, bank syariah belum dapat berdiri, melainkan digunakan badan hukum koperasi sebagai bentuk hukumnya. Kemudian di Jakarta didirikan *Bait al-Tamwil* kedua dengan nama Koperasi Simpan-Pinjam Ridho Gusti yang didirikan tanggal 25 September 1988.<sup>78</sup>

Setelah dikeluarkannya PAKTO (Paket Kebijakan-an Pemerintah bulan Oktober) tahun 1998 yang berisi

---

<sup>76</sup>Lihat, Karnaen A. Perwataatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, (Depok: Usaha Kami, 1996), h. 30

<sup>77</sup>*Bait al-Tamwil* adalah lembaga keuangan dengan prinsip-prinsip syariah yang bertatus badan Hukum koperasi simpan pinjam. *Bait al-Tamwil* Jasa Keahlian Teknosa pada tanggal 30 Desember 1980 dengan akta perubahan tertanggal 21 Desember 1982. Hal ini didorong oleh keluarnya Deregulasi Perbankan Paket 1 Juni 1983, yang telah membuka belenggu penetapan bunga perbankan oleh pemerintah. Lihat, Duddy Yustiady, *Penjelasan Perbankan Syariah Secara Umum*, Makalah disampaikan pada Pelatihan Perbankan dan Asuransi Syariah di AJB Bumiputera, FISIP UI, 2003), h. 2

<sup>78</sup>Lihat, Gemala Dewi, *op. cit.*, h. 61



tentang liberalisasi perbankan yang memungkinkan pendirian bank-bank baru selain yang telah ada, dimulailah pendirian Bank-bank Perkreditan Rakyat Syariah di beberapa daerah di Indonesia. Pertama kali memperoleh izin usaha adalah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Berkah Amal Sejahtera dan BPRS Dana Mardhatillah pada tanggal 19 Agustus 1991, serta BPRS Amanah Rabaniah pada tanggal 24 Oktober 1991 yang ketiganya beroperasi di Bandung, dan BPRS Hareukat pada tanggal 10 Nopember 1991 di Aceh, yang kemudian mendorong didirikannya Bank Umum syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 Mei 1992.

Bank Muamalat Indonesia (BMI) merupakan bank umum Islam pertama yang beroperasi di Indonesia. Tujuan pendiriannya antara lain, adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terbanyak bangsa Indonesia sehingga semakin sempit kesenjangan sosial-ekonomi yang dirasakan selama ini. Nama Muamalat dipilih karena muamalat berarti hubungan atau interaksi, sehingga bank ini menekankan bahwa cara kerjanya selalu bertumpu pada upaya menciptakan keserasian hubungan.<sup>79</sup>

Pembentukan bank ini setelah adanya rekomendasi dari lokakarya Ulama tentang Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua (Bogor) pada tanggal 19-22 Agustus 1990, yang kemudian diikuti dengan diundangkannya UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan yang mengakomodasi bagi hasil maka berdirilah Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang merupakan bank umum Islam pertama yang beroperasi di Indonesia. Pembentukan Bank Muamalat Indonesia (BMI) diikuti Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup>Lihat, M. Quraish Shihab, *Lentera Al-Qur'an, Kisah dan Hikmah Kehidupan* (Cet.I: Bandung : PT Mizan Pustaka, 2008), h. 277

<sup>80</sup>Lihat, Zainul Arifin, *op. cit.*, h. 6

Setelah adanya rekomendasi dari lokakarya ulama tentang bunga dan perbankan di Cisarua, Bogor tanggal 19-22 Agustus 1990, hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya, Jakarta pada tanggal 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas tersebut, maka dibentuk kelompok kerja untuk mengupayakan pendirian bank tanpa bunga (bank syariah) di Indonesia.

Bank Muamalat Indonesia lahir sebagai kerja tim Perbankan MUI tersebut, akta pendirian Bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada tanggal 1 Nopember 1991. Pada saat itu terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak Rp. 84 miliar. Pada tanggal 3 Nopember 1991, pada acara silaturahmi presiden di Istana Bogor.<sup>81</sup>

Dengan diundangkannya UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, maka secara tegas Sistem Perbankan Syariah ditempatkan sebagai bagian dari sistem perbankan nasional.<sup>82</sup> UU tersebut telah diikuti dengan ketentuan pelaksanaan dalam beberapa surat keputusan Direksi Bank Indonesia tanggal 12 Mei 1999, yaitu tentang Bank Umum, Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. Hal yang sangat penting dari peraturan baru itu adalah bahwa bank-bank umum dan bank-bank perkreditan rakyat konvensional dapat menjalankan transaksi perbankan syariah melalui pembukaan kantor-kantor cabang syariah, atau mengkonversikan kantor cabang konvensional menjadi kantor cabang syariah. Perangkat hukum itu diharapkan telah menjadi dasar hukum yang

---

<sup>81</sup>*Ibid.*

<sup>82</sup> Lihat selengkapnya pada halaman lampiran.

lebih kokoh dan peluang yang lebih besar dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia.

Dewasa ini perkembangan bank syariah di Indonesia semakin besar dan sampai saat ini yang telah memberikan presentasi di Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebanyak 20 lembaga keuangan, walaupun yang sudah mendapat izin BI ada 18 Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Dan lebih dari 80 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia terbagi pada tiga periode,<sup>83</sup> yaitu :

a. Periode Rintisan (1990 - 1998)

Periode ini dimulai dengan lokakarya MUI tahun 1990 di Cisarua-Bogor, terbentuknya Tim Penelitian dan Pengembangan Perbankan Syariah BI pada Mei 1998 dan lahirnya UU No. 10 Tahun 1998, telah melahirkan hanya satu bank syariah yaitu Bank Muamalat pada tahun 1992.

b. Periode Pengembangan (1998 - 2002)

Periode ini dimulai dengan dibentuknya Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada Februari 1999; dikeluarkannya fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mulai April 2000; dan dibentuknya Biro Perbankan Syariah BI pada tanggal 1 Januari 2002, telah melahirkan 7 bank syariah yaitu, Bank IFI Syariah (1999), BNI Syariah (1999), Bank Syariah Mandiri (1999), Bank Bukopin Syariah (2000), Bank Jabar Syariah (2000), BRI Syariah (2001) dan Bank Danamon Syariah (2001).

c. Periode Pemantapan (2002 - 2005)

---

<sup>83</sup>KH. Ma'ruf Amin, *op. cit.*, h. 2-3

Periode ini ditandai dengan dikeluarkannya fatwa MUI tentang Bunga/Interest pada Desember 2003; dibentuknya Direktorat Perbankan Syariah BI pada 1 Januari 2004; diselenggarakannya *Ijtima' Sanawi* (Annual Meeting) DPS pada September 2004, telah melahirkan 12 bank syariah yaitu, BII Syariah (2003), HSBC Syariah (2003), Bank DKI Syariah (2004) Bank Syariah Indonesia (2004), Bank Sumut Syariah (2004), Bank Niaga Syariah (2004), BPD Aceh (2004), BPD Kalsel (2004), Bank Permata Syariah (2004), Bank NTB (2004) dan Bank BTN Syariah (2004). Dan pada tahun berikutnya akan menyusul bank syariah baru antara sembilan atau sepuluh bank.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka sejak tahun 1992, perkembangan perbankan syariah cukup pesat sampai saat ini. Hal itu boleh jadi karena adanya UU No. 10 tahun 1998 yang memungkinkan perbankan menjalankan *dual banking system*, artinya bank umum konvensional juga diperkenankan memberikan layanan secara syariah melalui mekanisme *Islamic window*, sehingga bank-bank konvensional yang menguasai pasar mulai melirik dan membuka unit usaha syariah.

Menurut K.H.Ma'ruf Amin,<sup>84</sup> berkembangnya perbankan syariah di Indonesia disebabkan oleh berbagai hal, antara lain:

- (1) Potensi market bank syariah di Indonesia cukup besar apalagi kalau dikaitkan dengan jumlah umat Islam. Jumlah pengguna bank syariah dari kalangan umat Islam dewasa ini masih sangat kecil di-

---

<sup>84</sup>K.H. Ma'ruf Amin adalah Ketua Badan Pelaksana Harian (BPH) Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI sejak 1999 - sekarang. Aktif sebagai kontributor perbankan syariah.

banding jumlah umat Islam. Belum lagi bahwa pengguna bank syariah sekarang ini tidak hanya umat Islam. Karena itu, potensial market dari bank syariah masih sangat besar.

- (2) Umat Islam sendiri pada akhirnya akan memilih bank syariah dibanding bank konvensional karena bank syariah sudah dijamin kehalalannya sedangkan untuk bank konvensional tidak ada jaminan bagi kehalalannya apalagi setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa sistem bunga dan semua transaksi dengannya adalah haram. Karena itu pada akhirnya umat Islam akan bersikap "kalau ada cara yang halal kenapa harus memilih yang haram"?
- (3) Bank syariah ternyata memiliki keunggulan kompetitif. Hal itu dapat dilihat dari kemampuan bank syariah memberikan bagi hasil yang lebih besar kepada pemilik dana dibanding dengan bank konvensional.
- (4) Bank syariah ternyata tidak menimbulkan resitensi bagi mereka yang bukan muslim bahkan nasabah bank syariah tidak hanya terdiri dari umat Islam melainkan juga dari kalangan non Muslim. Bahkan dalam obligasi syariah,<sup>85</sup> emitenya kebanyakan (75%) terdiri dari *corporate* milik kalangan non muslim.

---

<sup>85</sup>Obligasi Syariah yaitu surat pengakuan utang yang berjangka waktu lebih dari satu tahun dengan sistem bagi hasil, yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menarik dana dari masyarakat, guna pembiayaan perusahaan, atau oleh pemerintah untuk keperluan anggaran belanja. Lihat, Isriani Hardini dan Muh. Giharto, *Kamus Perbankan Syariah* (Cet. I; Bandung: Marja, 2007), h. 39

- (5) Bank syariah tidak akan mengalami *negative spread* karena bank syariah tidak membayar bunga deposito yang besarnya bisa melampaui pendapatan bank karena di bank syariah yang dibagikan adalah nisbah bagi hasil dari pendapatan bank tersebut.
- (6) Bank syariah telah menggerakkan potensi ekonomi syariah sehingga dewasa ini tanpa disadari telah terjadi Gerakan Ekonomi Syariah (GES) yang meliputi terjadinya senergi antar potensi ekonomi syariah di kalangan masyarakat karena prinsip yang dilakukan oleh bank syariah: tidak boleh membiayai kegiatan usaha yang tidak sejalan dengan syariah.
- (7) Melalui bank syariah, fikih muamalah dapat diterapkan secara optimal. Bahkan tidak jarang terjadi tuntutan pasar untuk melakukan telaah ulang terhadap pendapat-pendapat yang ada dalam fikih muamalah untuk dikaji ulang. Dan hal itu dapat dimungkinkan sepanjang tuntutan tersebut tidak bertentangan dengan *nash* yang ada.<sup>86</sup>

Saat ini, perkembangan perbankan syariah sebagai bagian dari aplikasi ekonomi syariah di Indonesia, telah memasuki babak baru. Pertumbuhan industri perbankan syariah telah bertransformasi dari hanya sekedar memperkenalkan suatu alternatif praktik perbankan syariah menjadi bagaimana bank syariah menempatkan posisinya sebagai pemain utama dalam percaturan ekonomi di tanah air. Bank syariah memiliki potensi besar untuk menjadi pilihan utama dan pertama bagi nasabah dalam pilihan transaksi mereka.

---

<sup>86</sup>K.H. Ma'ruf Amin, *op. cit.*, h. 3-4

Hal itu ditunjukkan dengan akselerasi pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Meskipun *share* bank syariah pada saat ini, baru mendekatai 2%, tetapi angka tersebut telah menunjukkan peningkatan luar biasa di-banding *share* pada tahun 1999 yang hanya 0,11%.<sup>87</sup>

Bank Syariah Mandiri sebagai salah satu pelaku perbankan syariah misalnya, telah melakukan lompatan besar dan warna tersendiri dalam perkembangan perbankan syariah nasional. Pada saat berdiri asset Bank Syariah Mandiri (BSM) hanya Rp. 448 Miliar, dan permaret 2008 telah tumbuh 31 kali lipat lebih dengan nilai asset Rp. 14 Triliyun. Pangsa Bank Syariah Mandiri (BSM) di antara bank syariah merupakan yang terbesar, yakni 36 % dari total asset perbankan syariah nasional. Jumlah nasabah Bank Syariah Mandiri (BSM) saat ini berjumlah 1 juta 102 ribu 640 orang.<sup>88</sup>

Saat ini, bank syariah di Indonesia berjumlah 31 bank yang terdiri atas 3 bank umum syariah dan 28 unit usaha sayariah. Jumlah *outlet* (gerai/konter) bank syariah terus bertambah, dan permaret 2008 berjumlah 726 kantor. Di samping *outlet* (gerai/konter) yang berdiri sendiri, unit usaha syariah dapat membuka layanan pada konter konvensional induknya. Hal ini dimungkinkan sejak kebijakan *office channeling* (gerai /outlet/konter) yang sangat mendukung perluasan aksesibilitas bagi masyarakat mendapat layanan syariah.<sup>89</sup> *Office Channeling* (gerai/outlet/konter) adalah suatu

---

<sup>87</sup>"Peran BSM dalam Perkembangan Perbankan Syariah" [Berita]. Media BSM, Edisi 8 Tahun VII Juli 2008, h. 8

<sup>88</sup>*Ibid.*

<sup>89</sup>"Pergeseran Prefensi Nasabah BSM" [Berita]. Media BSM, Edisi 8 Thn VII Juli 2008, h. 33

kebijakan yang memperkenankan bank konvensional yang telah mempunyai Unit Usaha Syariah (UUS) untuk membuka layanan syariah di Kantor Cabang atau di bawah Kantor Cabang yang masih konvensional, untuk dan atas nama Kantor Cabang Syariah pada bank yang sama dalam kegiatan penghimpunan dana. Jadi *office channeling* merupakan aplikasi layanan syariah.<sup>90</sup>

Pesatnya perkembangan perbankan syariah dengan kinerja yang baik tersebut memberikan sinyal bahwa dalam waktu relatif singkat perbankan syariah akan tampil sebagai lembaga keuangan yang mendapat perhatian masyarakat luas. Sehingga perbankan syariah mempunyai prospek yang cerah dalam ikut mensukseskan pembangunan ekonomi umat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya.

## **F. Peluang dan Tantangan Bank Syariah**

### **1. Peluang Bank Syariah**

Meskipun masih terdapat banyak kendala yang dihadapi oleh perbankan Islam, namun bagaimanapun juga masih ada peluang perkembangan lembaga-lembaga keuangan Islam ini untuk di masa-masa mendatang, seperti :

- (a) Pasar untuk lembaga-lembaga keuangan Islam masih mempunyai peluang besar karena mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Bahkan umat Islam Indonesia sebagai umat yang terbesar di dunia. Karena itu, hal ini merupakan sumber dana dan sekaligus peluang bisnis ke depan.
- (b) Ketika terjadi krisis ekonomi, Indonesia banyak yang mulai memperhatikan perbankan Islam, hal ini terbukti dengan besarnya antusias beberapa

---

<sup>90</sup>Lihat, Isriani Hardini dan Muh. Giharto, *op. cit.* h. 93



bank yang mengkonversi diri ke dalam perbankan syariah, yaitu paling tidak ada enam bank. Selain itu menurut survei bahwa 80% responden mengatakan bahwa krisis ekonomi disebabkan oleh praktek bank konvensional. Justru itu perbankan Islam diharapkan dapat memberikan kontribusi penyelesaian krisis ekonomi ini.<sup>91</sup>

- (c) Asumsi dasar lembaga keuangan Islam yaitu uang sebagai media transaksi membuat banyak lembaga keuangan Islam menahan diri melakukan transaksi spekulatif dalam valuta asing sehingga tidak mempunyai resiko nilai tukar.
- (d) Banyak bank yang telah masuk dalam pengawasan pemerintah dan banyak di antaranya yang disuntik dengan dana likuiditas dan tidak satupun bank Islam masuk dalam kategori ini, meskipun tidak mendapat bantuan yang signifikan. Kenyataan ini, perbankan Islam dianggap memiliki *resistance* yang cukup tinggi untuk menghadapi krisis yang serupa.<sup>92</sup>

Sekalipun perbankan syariah mempunyai prospek yang cerah untuk masa mendatang, namun harus mempunyai strategi pengembangan. Yang dapat didasarkan dan mengacu pada empat langkah utama yang meliputi:

---

<sup>91</sup>Afdawaiza, Isu Kontemporer di Sekitar Perbankan Islam (Antisipasi untuk Pengembangan ke Depan, *Makalah*, Simposium Nasional I Sistem Ekonomi Islam di Sahid Hotel Yogyakarta, tanggal 13-14 Maret 2002, h. 15.

<sup>92</sup> Abdul Salam Arief, *Analisis Perkembangan Bank Islam (Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia)*, Laporan penelitian Kelompok Pada Proyek Perguruan Tinggi Agama, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2000), h. 122

- (a) Penyusunan dan penyempurnaan landasan hukum dan ketentuan operasional bank syariah yang mengacu pada standar internasional. Agar bank syariah dapat beroperasi secara efisien, komparatif dan *istiqāmah* menerapkan prinsip syariah perlu adanya ketentuan dan fasilitas perbankan yang sesuai dengan karakteristik kegiatan usaha bank syariah. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah hal-hal yang mengatur mengenai: 1) Prinsip kehati-hatian, 2) Standar akuntansi, audit dan pelaporan, 3) Instrumen yang diperlukan untuk pengelolaan likuiditas, dan 4) Instrumen moneter yang sesuai dengan prinsip syariah untuk keperluan pelaksanaan tugas bank sentral dan lain-lain. Ketentuan-ketentuan ini sangat diperlukan agar bank syariah dapat menjadi elemen dari sistem moneter yang dapat menjalankan fungsinya secara baik dan mampu berkembang serta bersaing dengan bank konvensional.
- (b) Perizinan yang mendukung upaya perluasan kantor perbankan syariah dan pengawasan yang berorientasi pada prinsip kehati-hatian, dalam rangka memperluas pelayanan kepada masyarakat dan nantinya akan meningkatkan efisiensi usaha. Akhirnya juga dapat meningkatkan kompetisi ke arah peningkatan kualitas pelayanan mendorong inovasi produk dan jasa perbankan syariah. Pengembangan jaringan tersebut dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas bank umum dan BPRS yang telah beroperasi, perubahan kegiatan usaha bank konvensional yang memiliki kondisi usaha yang baik dan berminat untuk melakukan kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syariah, dan pembukaan

kantor cabang syariah bagi bank konvensional yang memiliki kondisi usaha yang baik serta berminat untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

- (c) Pengembangan instrumen moneter dan pasar keuangan syariah sebagai instrumen likuiditas. Penyusunan piranti moneter dan Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) dilakukan sejalan dengan amanat UU No. 23 Tahun 1999 dalam rangka mendukung kebijakan moneter dan operasional bank syariah.
- (d) Meningkatkan pemahaman masyarakat (*public education*) dan pengembangan SDM perbankan syariah. Pengembangan SDM di bidang perbankan syariah sangat penting karena keberhasilan pengembangan bank syariah pada level mikro ditentukan oleh kualitas manajemen dan tingkat pengetahuan serta keterampilan pengelola bank.<sup>93</sup>

## 2. Tantangan Bank Syariah

Dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Malaysia yang sudah melakukan pengembangan perbankan syariah sejak tahun 1988, ataupun Bahrain yang telah melakukannya lebih awal lagi yaitu semenjak tahun 1979, maka Indonesia termasuk negara yang terlambat dalam melakukan pengembangan perbankan syariah. Hal ini disebabkan beberapa faktor, yaitu sebagai berikut :

- (a) Adanya perbedaan pandangan di kalangan ulama Indonesia mengenai bunga yang secara garis besar terbagi pada tiga pendapat, yaitu haram, *syubhat* dan halal. Hal ini sangat menentukan respon

---

<sup>93</sup>Lihat, M. Syafii Antonio, *Bank Syariah dari*., h. 224-232

masyarakat terhadap bank Islam itu sendiri. Umar Shihab sebagai salah seorang Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat berpendapat bahwa bunga bank adalah halal dengan mendasarkan pendapatnya pada beberapa alasan, yaitu :

- Jumlah bunga yang dipungut dan diberikan oleh bank kepada nasabah jauh lebih kecil dibandingkan dengan riba yang diperlakukan pada zaman jahiliyah;
- Pemungutan bunga bank tidak akan membuat bank itu sendiri atau nasabahnya memperoleh keuntungan besar, atau sebaliknya tidak akan merasa dirugikan dengan pemberian bunga;
- Tujuan pengambilan kredit dari debitur pada zaman jahiliyah adalah untuk konsumsi, sementara sekarang dengan tujuan produktif; dan
- Adanya kerelaan antara kedua pihak yang bertransaksi, sebagaimana halnya kebolehan dalam jual beli dengan asas kerelaan (*antaradlin*).<sup>94</sup>

Karena itu, tidak sepatasnya bunga bank diharamkan, sebab meski-pun diidentikkan dengan riba, tetapi tujuan dan metode pelaksanaannya jauh berbeda dari apa yang dipraktekkan pada masa

---

<sup>94</sup>Umar Shihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, (Semarang : Dina Utama, 1996), h. 127. Sementara itu MUI berpendapat bahwa bunga bank boleh karena rukhsah yang diputuskan pada lokakarya MUI di Cisarua Bogor tahun 1990. Bahkan ada juga yang berpendapat bahwa bunga bank boleh dengan alasan bank tidak dianggap sebagai mukallaf yang memenuhi *ahliyah al-'ada* dan *ahliyat al-wujud*. Lihat Nadirsyah, "Bunga Bank dalam Perspektif Islam", dalam *Majalah Yurisdiksi*, Edisi I, Tahun 1999, h. 57-58.

jahiliyah yang telah diharamkan dalam al-Qur'an. Dan bunga bank lebih tepat dianalogikan dengan jual beli yang didasari atas suka sama suka".<sup>95</sup>

Majelis Tarjih Muhammadiyah memutuskan bahwa bunga bank yang diberikan oleh bank milik negara kepada nasabahnya, atau sebaliknya yang selama ini berlaku termasuk ke dalam perkara *syubhāt* (tidak tentu halal-haramnya). Akan tetapi dari faktor tersebut, hanya menyinggung bunga bank yang diberikan oleh bank-bank negara, dengan menyatakan bahwa bunga yang diberikan oleh negara dibolehkan. Karena bunga yang diberikan masih tergolong rendah, jika dibandingkan dengan bunga pada bank swasta. Akan tetapi kebolehan tersebut masih bersifat *syubhāt* (tidak identik dengan haram).<sup>96</sup>

Nahdatul Ulama sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia di samping Muhammadiyah, memutuskan masalah bunga bank tersebut dengan beberapa kali sidang, dengan terjadinya polarisasi pendapat pada tiga kelompok yaitu haram, halal dan *syubhāt*. Namun, meskipun terdapat perbedaan pandangan, *Lajnah Bahtsul Masāil* memutuskan bahwa yang lebih berhati-hati adalah pendapat pertama, yakni bunga bank adalah haram.<sup>97</sup>

Keputusan *Lajnah Bahtsul Masāil* yang lebih lengkap tentang masalah bank ditetapkan pada sidang di Bandar Lampung (1982). Kesimpulan sidang tersebut sebagai berikut :

---

<sup>95</sup> *Ibid*,

<sup>96</sup> Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia Perspektif Muhammadiyah dan NU*, (Jakarta: Universitas Yarsi, 1999), hlm.189.

<sup>97</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari..*, h. 63.

- Ada pendapat yang mempersamakan antara bunga bank dan riba secara mutlak, sehingga hukumnya haram.
  - Ada pendapat yang tidak mempersamakan bunga bank dengan riba, sehingga hukumnya boleh.
  - Ada pendapat yang menyatakan hukumnya *syubhāt* (tidak identik dengan haram)<sup>98</sup>
- (b) Pertimbangan kondisi sosial politik Indonesia yang kurang kondusif, *political will* dari pemerintah kurang maksimal, tingkat heterogenitas masyarakat Indonesia yang cukup tinggi, dan komitmen serta tanggung jawab yang harus dipikul karena mencantumkan label syariah.

Bandingkan di Mesir, dengan *Faisal Islamic Bank of Egypt* (FIBE) yang didirikan oleh pangeran Muhammad al-Saud tahun 1977 telah menjadi perbankan Islam terbesar di dunia dengan meraih prestasi yang membanggakan.<sup>99</sup> Di Kuwait, dengan *Kuwait Finance House* (KHF) yang merupakan satu-satunya bank Islam di sana telah menjadi lembaga finansial yang paling penting milik negara yang mengurus bidang perbankan, asuransi, real estate, usaha-usaha kerja sama dan perdagangan umum atas dasar bagi hasil. Modal pertama berasal dari 49% dari menteri dan 51% oleh swasta atau pribadi.<sup>100</sup>

---

<sup>98</sup>Lihat, *ibid*.

<sup>99</sup>Amrullah Ahmad, et.al (Ed.), *Islamisasi Ekonomi: Suatu Sketsa Evaluasi dan Prospek Gerakan Perekonomian Islam*, (Yogyakarta : PLT2M, 1985), h. 172.

<sup>100</sup> *Ibid*, h.162.

- (c) Adanya kendala dasar hukum yang belum memungkinkan pengembangan bank syariah dilakukan, karena dalam UU No. 14 tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan tidak mengenal bank syariah. Hal ini dalam kenyataannya juga menjadi kendala bagi berdirinya perbankan Islam lebih awal sebagai salah satu instrumen ekonomi Islam.<sup>101</sup>

Tetapi, berbagai kendala tersebut, setelah periode tahun 1992-1998 perkembangan perbankan syariah menunjukkan suatu kemajuan yang cukup menggembirakan. Ditandai bank syariah pertama berdiri di Indonesia yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992. Namun sampai tahun 1998, kemajuan perbankan syariah seakan-akan berjalan di tempat. Karena tidak ada lagi pendirian bank syariah. Kondisi stagnasi ini muncul karena disebabkan oleh beberapa hal:

- Pengetahuan dan kesalahpahaman masyarakat yang rendah mengenai perbankan syariah, sehingga konsep perbankan syariah kurang tersosialisasikan.<sup>102</sup> Implikasinya, bank syariah kalah populer dengan bank konvensional.
- Kurangnya pemahaman masyarakat tentang ekonomi Islam dan etika bisnis Islam yang dengan sendirinya menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan konsep-

---

<sup>101</sup> Zainul Arifin, *Memahami.....*, h. x

<sup>102</sup> Masyarakat Jakarta yang lebih dekat dengan informasi menunjukkan hanya 2.5% yang memahami istilah *mudhârabah* sebagai dasar produk dari bank syariah. Lihat Yuslam Fauzi "Peranan, Peluang dan Tantangan Bank Syariah sebagai Salah Satu Lembaga Pemberdayaan Umat dalam Memasyarakatkan Ekonomi Syariah". Makalah pada *Seminar Nasional Ekonomi Islam dan Kongres KOKASEI se-Indonesia*, Semarang 12 Mei 2000, h. 6.

konsep syariah dalam kehidupan sehari-hari. Kenyataan ini juga dipicu oleh keterbatasan informasi tentang eksistensi bank syariah. Hal ini ternyata akhirnya berimplikasi pada per-olehan pengumpulan dana.<sup>103</sup>

- Ketentuan operasional perbankan, instrumen moneter dan pasar uang syariah yang belum tersedia. Dalam ekonomi negara maju, bank-bank sentral tidak harus aktif karena pasar keuangannya telah dikembangkan dengan baik. Pasar yang telah maju tersebut dapat secara otomatis menjalankan sebagian besar fungsi-fungsinya yang disebabkan untuk efisiensi pasar. Namun, dalam negara yang sedang berkembang, di mana pasar keuangan adalah baru pada tahap awal kemajuan. Bank-bank sentral harus memainkan peranan penting dalam ekonominya. Hampir semua negara muslim sedang melalui tahap perkembangan dan tidak terkecuali di Indonesia. Berbagai lembaga keuangan yang di bangun untuk menghadapi perangkat pasar keuangan yang kurang maju dan perangkat hukum yang tidak mendukung, yang hanya diperuntukkan bagi perbankan konvensional. Bank Islam berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, karena mereka dituntut untuk menyesuaikan hukum-hukum yang tidak relevan atau yang berlawanan dengan nilai-nilai Islam.

Alat-alat kuantitatif yang berdasarkan bunga untuk mengendalikan per-luasan kredit adalah hal

---

<sup>103</sup>Agus Wahid, "Dilema BMI di Tengah Tuntutan Umat", Jurnal *Ulumul Qur'an*, No. 04, Vol. VI Tahun 1995, h. 61.



lain dari kesulitan yang dialami oleh bank-bank Islam. Bank sentral menggunakan *discount rate*, operasi pasar terbuka, *reserve ratio* dan *lender of last resort* untuk mengatur ekonomi melalui pengendalian bank. Dalam masalah likuiditas, bank Islam juga mengalami kendala.

Likuiditas dapat didefinisikan sebagai ketersediaan kas dan aset-aset likuid untuk memenuhi kewajiban-kewajiban sekarang. Jika bank gagal untuk memenuhi kewajiban jatuh tempo, maka bank tersebut akan mengalami resiko likuiditas. Untuk memecahkan masalah ini bank Islam mengalami kesulitan, karena :

- Rata-rata aset yang likuid di pasar terkait dengan bunga yang ada, sementara dalam bank Islam instrument yang serupa (likuiditas) belum ada, sehingga menjadi persoalan yang dilematis antara menjaga likuiditas dan mempertahankan nilai-nilai Islam.
- Pasar antar bank internasional juga sebagian terkait dengan bunga. Oleh karena itu, bank-bank Islam tidak dapat mengakses ke pasar tersebut. Pasar antar bank Islam masih sempit dan kekurangan instrumen yang memadai untuk mengalokasikan likuiditas secara efisien.
- Bank Islam tidak dapat memperoleh dana melalui fasilitas *the lender of the last resort*, karena bank sentral membebaskan bunga.

Di samping itu, regulasi sistem informasi laporan keuangan juga menjadi hambatan, hal ini ditandai dengan standar akuntansi mana yang seharusnya jadi acuan, apakah *British accounting Practice*, *American Financial Accounting Standar*

(FAS), *Generally Accepted Accounting Principle* (GAAP), atau *International Accounting Standard* (IAS). Karena itu, bank Islam mencoba-coba dalam penerapan akuntansi sehingga belum ada keseragaman di antara bank-bank yang lain, belum ada penyajian yang fair dan benar (*true presentation*), konsistensi dan berdaya banding (*comparability*).<sup>104</sup>

Faktor yang cukup signifikan adalah aspek manajemen perbankan syariah yang terkesan berbelit-belit. Hal ini juga merupakan kendala yang cukup dominan, sehingga masyarakat lebih senang berhubungan (transaksi) ke bank konvensional tanpa melihat aspek yuridisnya dari segi hukum Islam. Berkaitan dengan faktor manajemen ini, M. Akhyar Adnan, menyarankan agar manajemen bank Islam sebaiknya secara kritis mampu melakukan evaluasi perkembangan usaha termasuk konteks kompetitif dengan bank konvensional. Hal lain yang perlu diperhatikan, katanya hendaklah manajemennya berperilaku orientasi pasar dan bukan orientasi produk. Hal ini lanjutnya, terbukti dengan manajemen yang berorientasi pasar cenderung lebih efektif. Juga manajemen harus memposisikan nasabah sebagai mitra, bukan lebih tinggi atau lebih rendah.<sup>105</sup>

- (d) Masih minimnya sumber daya manusia penyelenggaraanya. Dalam proses operasionalisasinya, bank Islam masih kurang memiliki tenaga operasional yang betul-betul handal dibandingkan bank

---

<sup>104</sup> Abdul Salam Arief, *op.cit*, h. 11.

<sup>105</sup>M. Akhyar Adnan, "Beberapa Isue di Sekitar Pengembangan Lembaga Keuangan Berdasarkan Syariah", *Makalah* tidak diterbitkan, h. 9.

konvensional, karena dalam bank Islam harus menangani produk-produk bank yang membutuhkan perhitungan yang sangat rumit dan di sisi lain semestinya paham terhadap esensi ajaran moral dalam setiap produk yang ditawarkan. Kekeliruan dalam menilai proyek yang akan dibiayai bank sistem bagi hasil mungkin akan membawa akibat lebih besar daripada yang dihadapi bank konvensional yang hasil pendapatannya sudah tetap dari bunga.<sup>106</sup> Lembaga-lembaga akademik dan pelatihan di bidang ini sangat terbatas, sehingga tenaga terdidik dan berpengalaman di bidang perbankan syariah baik dari sisi bank pelaksana ataupun dari sisi bank sentral, (pengawas dan peneliti bank) masih sangat sedikit.

Warkum Sumitro mengatakan, sistem bagi hasil yang adil, menuntut tingkat profesional yang tinggi bagi pengelola bank untuk membuat perhitungan yang cermat dan terus menerus, karena perolehan dari sistem ini tergantung pada tingkat keberhasilan usaha nasabah, padahal pengelolaan yang profesional merupakan persoalan yang belum terpecahkan dalam perbankan konvensional yang kelahirannya lebih lama. Apalagi pada bank syariah yang kelahirannya jauh lebih muda. Tingkat profesionalisme nasabah juga

---

<sup>106</sup>Lihat, Karnaen Perwataatmadja dan M. Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana.*, h. 46. Lihat pula, Abdul Ghofur Anshori, *Prospek perbankan Syariah dalam Pembangunan Ekonomi Umat*, dalam Abdul Ghofur Anshori dkk., *Kapita Selektta Perbankan Syariah diIndonesia* (Cet. I: Yogyakarta: UII Press, 2008), h. 87

menjadi persoalan karena tingginya pendapatan bank tergantung keberhasilan usaha nasabah.<sup>107</sup>

- (e) Keterbatasan jaringan kantor bank syariah. Kurangnya jaringan ini berakibat menghambat kerjasama antar bank syariah, padahal kerjasama sangat diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah likuiditas, sehingga suatu badan usaha bank syariah perlu beroperasi dengan skala yang ekonomis, karenanya jumlah jaringan kantor bank yang luas juga akan meningkatkan efisiensi usaha.<sup>108</sup>

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa kategori kendala bank syariah itu menjadi dua faktor, yaitu *pertama*, faktor internal yang meliputi masih minimnya sumber daya manusia penyelenggara, permodalan, keterbatasan likuiditas, birokrasi yang terkesan berbelit-belit, serta jumlah kantor cabang yang masih kurang. *Kedua*, faktor eksternal, yang meliputi persepsi dan kepercayaan masyarakat yang masih kurang, belum tersosialisasikannya konsep perbankan syariah di kalangan umat Islam, terkesan eksklusif dan adanya kelompok yang *phobia* terhadap konsep perbankan Islam.

---

<sup>107</sup>Lihat, Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 28

<sup>108</sup>Lihat, M. Syafii Antonio, *Bank Syariah dari.....*, h. 225-226.

### *Bagian 3*

## **KONSEP UMUM TENTANG BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS)**

### **A. Pengertian dan Landasan Hukum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)**

Secara spesifik pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagaimana dalam pasal 1 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah: "BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran"<sup>109</sup>.

Pengertian tersebut, memberikan gambaran bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah suatu lembaga keuangan atau bank yang beroperasi atas dasar prinsip-prinsip muamalah yang mengacu pada syariat Islam, yang memiliki prinsip operasional yang berbeda dengan pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagaimana yang tercantum dalam peraturan Bank Indonesia tentang bank perkreditan rakyat berdasarkan prinsip syariah.

Adapun landasan hukum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah UU No 21 tahun 2008. Dalam UU tersebut secara tegas disebutkan bahwa Bank Pembiayaan

---

<sup>109</sup>Republik Indonesia, "UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan" (Jakarta: Sinar Grafika, t.th), h. 9.

Rakyat Syariah (BPRS) sebagai salah satu jenis bank yang kegiatan usahanya ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di daerah pedesaan yang berprinsip syariah.

Dasar pemikiran terbentuknya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Berawal dari sumber utama pedoman umat Islam yaitu al-Qur'an yang terdapat adanya larangan riba dan di dukung oleh sumber kedua yaitu hadis, dan beberapa dari sumber yang sesuai atas realitas yang ada. *Pertama*, larangan riba dalam al-Qur'an yang dijelaskan pada QS. Al-Baqarah (2): 275 bahwa:

.....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

Terjemahnya:

".....padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".<sup>110</sup>

Ayat tersebut dapat dipahami akan ketentuan-ketentuan yang diatur dan ditetapkan oleh Allah swt. tentang perbedaan yang transparan antara transaksi jual beli dengan transaksi riba<sup>111</sup>. Maksudnya bahwa jual beli itu hukumnya halal, sedangkan praktek riba hukumnya haram berapapun jumlahnya (baik sedikit maupun banyak, hasilnya tetap dikenakan hukum riba).

---

<sup>110</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur'an...., opcit.* h. 48

<sup>111</sup>Definisi Riba itu sendiri berasal dari bahasa Arab (*Usury* atau *Interest*, Bahasa Inggris) secara bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan) atau kelebihan. Secara linguistik berarti tumbuh dan membesar dan secara teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Sedangkan jual-beli dalam bahasa ialah menukar sesuatu dengan sesuatu, sedangkan menurut syara' artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu. Lihat Muhammad Rifai', *al-Fiqh Islami* (Semarang: CV. Toha Putra, 1978), h. 402-410.

Praktek riba sebenarnya sudah merajalela dari masa jahiliyah, sampai pada masa Rasulullah saw. telah berlaku umum di Jazirah Arab,<sup>112</sup> mungkin salah satu faktor menjamurnya sistem riba karena pada umumnya penduduk Jazirah Arab mata pencahariannya adalah perdagangan dan bahkan keseluruhan tata ekonomi berdasarkan riba. Jadi riba bukanlah hal yang baru dalam dunia Islam.

Dengan realitas ekonomi yang diwarnai praktek riba yang mendasari kehidupan kawasan masyarakat, diberikan solusi terbaik oleh Allah swt. untuk menyalurkan hartanya melalui muamalah yang sesuai dengan syariah Islam seperti jual-beli, zakat, infaq dan lain-lain.

Seperti halnya dengan larangan riba, dengan melihat akan kebiasaan masyarakat Jazirah Arab maka aturan tentang riba tidak diturunkan secara serentak untuk ditaati akan tetapi diturunkan secara bertahap agar masyarakat dapat menjalankan ajaran Islam secara sempurna. Sehingga umat Islam menjalankan ajaran agamanya merasa tidak dipaksa dan terpaksa.

*Kedua*, larangan riba dalam hadis. Aturan tersebut diperkuat oleh sumber hukum kedua yaitu hadis. Nabi pun tidak membiarkan bagian harta-harta atau aktivitas umatnya tersentuh dengan riba, bahkan siapapun yang terkait dengan transaksi riba baik langsung maupun tidak langsung disejajarkan dengan orang yang terkait dengan yang langsung mengambil/memakan riba dan ketidaksenangan Rasulullah saw. terhadap orang yang terkait dengan riba dengan turut mengutuknya. Sejalan dengan sabda Rasulullah saw.:

---

<sup>112</sup>Lebih lengkapnya lihat Muhammad Zuhri, *Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan (Suatu Tilikan Antisipatif)* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada Kerjasama Badan penerbitan IAIN Walisongo Press, 1997), h. 19.

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا، وَمُؤَكِّلَهُ،  
وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ<sup>113</sup>

Artinya:

"Jabir berkata bahwa Rasulullah saw. mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarkannya, dan orang yang mencatatnya, dan 2 orang saksinya, kemudian bersabda: "Mereka itu sama"<sup>114</sup>

Ringkasnya siapapun yang mengambil peran dalam praktek riba maka kedudukannya sama saja apapun posisinya, baik notaris, saksi, lebih-lebih pelakunya (pemeran utamanya). Selain berdasarkan pada ketentuan al-Qur'an dan hadis, dasar pemikiran beroperasinya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia selain didasari sebagai langkah aktif dalam rangka restrukturisasi perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket kebijakan keuangan, moneter perbankan secara umum. Dan secara khusus mengisi peluang terhadap kebijakan yang membebaskan bank dalam penetapan tingkat suku bunga<sup>115</sup> dan bagi hasil. Pertimbangan lainnya, belum tersentuhnya sistem perbankan bagi masyarakat pedesaan khususnya usaha-usaha kecil.<sup>116</sup> Akhirnya secara realistis, gagasan berdirinya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) didasarkan pada konsep bermuamalah yang secara bertahap telah berjalan selama beberapa dekade.

---

<sup>113</sup>Imam Abu Husain Muslim bin al-Hallaj al-Qusyairy an-Naysabury, *Sahih Muslim*, Juz ke-3 (Bairut : Daar Kutub Ilmiah, t.th), h.1219.

<sup>114</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Cet. 1; Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 54 .

<sup>115</sup>Warkum Sumitro, *op.cit.* h. 119.

<sup>116</sup>Bank Indonesia, *Cetak Biru Bank Perkreditan Rakyat* (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), h. 2.



Berdirinya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia sebagai salah satu bentuk jenis Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang tidak lepas dari sejarah BPR-BPR pada umumnya. Dimulai pada masa kolonial Belanda pada abad ke-19 dengan dibentuknya Lumbung Desa, Bank Desa, Bank Tani, dan Bank Dagang Desa dengan tujuan membantu para petani, pegawai dan buruh untuk melepaskan diri dari rentenir yang memberikan bunga kredit tinggi. Pasca kemerdekaan Indonesia, didirikan beberapa jenis lembaga keuangan kecil dan lembaga keuangan di pedesaan seperti Bank Pasar, Bank Karya Produksi Desa (BKPD), dan mulai awal 1970-an Lembaga Dana Kredit Pedesaan oleh Pemerintah Daerah.<sup>117</sup>

Tahun 1988, pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober 1988 yang dikenal dengan PAKTO 1988 melalui Keputusan Presiden RI No. 38 yang menjadi momentum awal pendirian BPR-BPR baru yang berisi tentang keberadaan dan kegiatan usaha BPR serta bank dapat beroperasi tanpa bunga.<sup>118</sup>

Perkembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sendiri tidak lepas dari andil OKI yang selalu menganjurkan dan mendorong negara-negara anggotanya untuk meningkatkan perekonomian rakyat di negara-negara masing-masing yang disertai dengan pendirian Islamic Development Bank (IDB) yang berkantor di Jeddah. Perkembangan yang pesat tersebut ternyata mempunyai pengaruh besar bagi negara-negara benua Asia khususnya

---

<sup>117</sup> *Ibid*, h. 1.

<sup>118</sup> *Ibid*. dan lihat pula A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat: Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 108.

Indonesia.<sup>119</sup> Dengan berdirinya bank syariah pada tahun 1992 dengan nama Bank Muamalat Indonesia (BMI). Kemudian di susul dengan bermunculanya bank-bank syariah maupun lembaga keuangan syariah lainnya termasuk BPRS. Pendirian bank Islam sendiri, baru dilakukan tahun 1992 berawal dari lokakarya mengenai "Bunga Bank dan Perbankan" yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Cisarua, Bogor, Jawa Timur tanggal 18-20 Agustus 1990. Ide ini kemudian dipertegas dalam Munas IV Majelis Ulama Indonesia di hotel Sahid Jaya, Jakarta tanggal 22-25 Agustus 1990. Atas dasar amanat Munas IV Majelis Ulama Indonesia inilah sebagai langkah awal untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia<sup>120</sup>

Berbicara tentang sejarah berdirinya bank perkreditan rakyat syariah di Indonesia maka tidak lepas dari berbicara Bank Muamalat Indonesia sebagai bank yang pertama mengaplikasikan sistem muamalah secara Islami seperti bagi hasil, *al-Wadiah*, *Mudharabah*.

## **B. Prinsip Operasional Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)**

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam operasionalnya harus bernafas syariah yang membawa misi keadilan, ketentraman, kesederajatan bagi masyarakat khususnya pengguna jasa perbankan. Kesadaran dalam mengaplikasikan sistem ekonomi Islam, khususnya dunia perbankan syariah tampaknya semakin jelas. Terbukti sistem tersebut tidak hanya dilakukan di negara-negara Islam,

---

<sup>119</sup> Lihat Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek* (Jakarta: Alvabet, 2000), h. 12.

<sup>120</sup> Lihat Sofyan Syafii Harahap, *Akuntansi Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h. 108. dan MB. Hooker, *Islam Mazhab Indonesia; Fatwa-fatwa dan Perubahan Sosial* (cet. II; Jakarta: Teraju, 2003), h. 274.

tetapi juga terdapat di negara-negara yang bukan negara Islam. Bahkan dilakukan pula dinegara-negara yang mayoritas penduduknya non muslim seperti China. Sehingga dapat diartikan penggunaan sistem ekonomi bukan karena banyaknya orang Islam, melainkan karena sistemnya yang dirasakan manfaatnya. Contohnya Malaysia yang mempunyai hampir 50% nasabah bukan dari golongan Islam. Mereka nota bene adalah orang Cina, akan tetapi karena melihat sisi cerah keuntungan di bank syariah dibandingkan bank yang beroperasi secara konvensional. Sehingga mereka rela menabung di bank yang di ketahui bahwa orang Islam sebagai pemilik saham bank.

Selain mendapatkan keuntungan jelas, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) juga memegang prinsip-prinsip syariah yang melekat pada lembaga keuangan syariah tersebut. Dengan adanya aturan perjanjian berdasarkan hukum antara Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan pihak lain yakni nasabah untuk menyimpan dana dan menyalurkan dana atau dalam pembiayaan kegiatan dengan kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah, artinya semua pihak harus memenuhi ketentuan-ketentuan syariah.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam menjalankan produk-produknya menganut prinsip-prinsip moral sebagai berikut :

#### 1. Prinsip keadilan

Adil merupakan norma paling utama dalam seluruh aspek termasuk perekonomian. Demikian pula halnya dalam muamalah, di larang mengadakan muamalah yang terdapat unsur ketidakadilan lebih-lebih jika sudah ada unsur penipuan. Seperti yang diungkapkan oleh Marxisme keadilan itu bertumpu pada kepemilikan, bahwa kepemilikan oleh individu adalah suatu kedzaliman dan menjadikan harta sebagai sarana produk milik negara, itulah keadilan.

Sebaliknya, Kapitalis membuat konsep keadilan dengan tindakan membebaskan manusia untuk berbuat dan bertindak tanpa campur tangan pihak manapun kecuali batas-batas sangat prinsip yang ditetapkan oleh hukum.<sup>121</sup> Kondisi tersebut merangsang berbagai efek bagi krisis di masyarakat baik krisis kebutuhan hidup yang hanya dikuasai kalangan tertentu, apalagi akan memunculkan krisis moral yang menguasai kalangan lainnya.

Aplikasi perbankan syariah tercermin suatu keadilan dimana penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dan nasabah.

## 2. Prinsip Kesederajatan

Pada prinsipnya kesederajatan menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank yang berkedudukan sama dan sederajat. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, resiko, dan keuntungan yang berimbang di antara nasabah.

## 3. Prinsip Ketentraman

Produk-produk bank syariah telah sesuai dengan prinsip dan kaidah muamalah Islam (halal) antara lain tidak ada unsur riba. Dengan demikian baik pihak bank maupun nasabah merasa mendapatkan ketentraman lahir dan batin.<sup>122</sup> Ketiga prinsip moral tersebut tercermin dalam penyaluran dana, penghimpunan dana serta pelayanan jasa.

Apalagi dengan keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai penasehat dan pemberi saran kepada

<sup>121</sup>Yusuf Qardhawi, *Daurul Qiyam Wa Akhlak Fil Iqtishadi Islami* diterjemahkan Zainal Arifin Lc dan Dahlia Husian dengan judul *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 224.

<sup>122</sup>Memberikan Pelayanan Jasa Perbankan Syariah Indonesia", tt.: [www.syariahamandiri.com](http://www.syariahamandiri.com). Akses tahun 2003, h. 1.

pihak bank mengenai hal-hal yang berkaitan antara bank dan aturan syariah. Sehingga sebagai nasabah merasa tenteram akan keberadaan harta/uangnya di bank baik sebagai penabung maupun peminjam dengan sebuah keyakinan bahwa yang dilakukan oleh bank selama ini tidak menyimpang dari ketentuan syariah.

Ketiga prinsip moral akan teraplikasi dalam prinsip-prinsip pengelolaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) baik untuk menghimpun dana maupun menyalurkan dana serta jasa-jasa perbankan, yakni:

(a) Prinsip Titipan (*Depository/al-Wadiah*)

Salah satu fungsi bank yakni menghimpun dana dari masyarakat selain dana dari modal pemilik bank dan modal cadangan. Karena dana yang dimiliki bank selain untuk biaya produksi BPRS juga pembiayaan nasabah sehingga perlu penghimpunan dana misalnya dana yang terkumpul akan dipergunakan untuk biaya pembangunan kantor, untuk pembiayaan usaha kepada nasabah dengan konsep syariah. Selanjutnya, strategi BPRS menghimpun dana dari masyarakat dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip sederhana yang diterapkan adalah prinsip *al-Wadi'ah* (titipan simpanan/*Depository*).

Dalam memobilisasi dana dengan menggunakan prinsip titipan (*akad al-Wadiah*). Sebagai dasar firman Allah swt. dalam QS.an-Nisaa (4) : 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا....

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah (titipan) kepada ahlinya (yang berhak menerimanya).....<sup>123</sup>

Ayat di atas dapat dipahami bahwa berupa apapun titipan orang harus disampaikan kepada orang yang berhak menerimanya. Dalam Islam diajarkan titipan berupa ucapan pun harus disampaikan kepada "sasaran" artinya sekecil apapun bentuk titipan itu harus disampaikan kepada yang bersangkutan. Sebagaimana ditegaskan dalam sebuah hadis Rasulullah saw.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ أَثْمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)<sup>124</sup>

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. berkata: Rasulullah saw. bersabda: Sampaikanlah amanat kepada yang berhak menerimanya dan janganlah membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu." (HR. Abu Daud).<sup>125</sup>

Penegasan tersebut mengisyaratkan bahwa kalau ditempatkan sebagai titipan, maka titipan harus dijaga. Kalau ternyata salah satu diantaranya berkhianat maka yang satunya tidak boleh membalas khianat tersebut, karena jika membalas untuk mengkhianatinya maka tidak kurang dari sama dosanya, walaupun terlebih dahulu berkhianat.

Secara umum *al-Wadiah* terdapat dua jenis: *Wadiah yal Amanah* dan *ya adh-Adamanah*. *Wadi'ah yad al-*

<sup>123</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an...*, op.cit, h. 88.

<sup>124</sup> Abu Daud Sulaiman bin Aya'sy, op. cit., h.276.

<sup>125</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, op. cit., h. 86.

*Amanah (Trustee Depository)*, harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan dan penerima titipan berkewajiban untuk menjaga barang tersebut sesuai dengan lazimnya dan sebagai kompensasinya penitip diperkenankan beban biaya ke penerima titipan sebagai tanda ucapan terima kasih atas tanggung jawab pada barang titipan tersebut (tanpa akad sebelumnya).

Intinya bahwa sesuatu atas barang yang digunakan atas dititipkan harus dikembalikan secara utuh (sebagaimana awal dititipkannya). Sedangkan *Wadi'ah yad adh-Dhamanah (Guarantee Depository)*, harta atau barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan atau dikelola untuk mendapatkan manfaat baik kepada pengelola maupun kepada penitip dan pihak tempat penitipan dapat mengambil atau memberikan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan.

Dalam aplikasi perbankan syariah di Indonesia pada umumnya memakai *Wadi'ah Yad adh-Dhamanah (Guarantee Depository)*. Melihat aktivitas perekonomian, harta merupakan sesuatu yang sangat penting, sehingga harus diputar (produktif) untuk mendapatkan hasil yang riil. Karena itu, Bank harus menjamin daripada titipan tersebut sekaligus memberi harga intensif berupa bonus tanpa syarat sebelumnya (jumlah nominalnya), tetapi inisiatif dari pihak bank tidak dipaksakan oleh pihak penitip. Sehingga hasil/bonus daripada titipan tersebut tidak tetap, boleh jadi akan lebih besar dibandingkan dengan sistem bunga atau sebaliknya lebih kecil dari sistem bunga atau malah sama, tergantung produktifitas pemanfaatan dana tersebut.

- (b) Bagi Hasil (*Profit Sharing*)

Prinsip syariah yang didasarkan bagi hasil adalah :

- *al-Musyarakah (Partnership, Project Financing Participation)*. Prinsip bagi hasil yang sangat memudahkan mengidentifikasi bank sistem syariah yakni sistem *Musyarakah*. Sistem *Musyarakah* telah dilegalkan dalam QS. An-Nisaa (4) : 12 :

.....فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ....

Terjemahnya:

..Maka mereka berserikat pada sepertiga....<sup>126</sup>

Ayat diatas memberikan makna bahwa dalam bermuamalah terdapat konsep bolehnya berserikat atau menjalin kerjasama. Kemudian dikukuhkan dalam hadis Qudsi tentang aturan berserikat:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)<sup>127</sup>

Terjemahnya:

"Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw., bersabda "Sesungguhnya Allah azza wa Jalla berfirman, Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya."<sup>128</sup>

<sup>126</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an.. op. cit.*, h. 117.

<sup>127</sup> Abu Daud Sulaiman bin Asyatsi al-Jasnany al-Azday, *Sunan Abu Daud*, Juz ke-3 (Suria: Daar al-Hadis, 1164 M) h. 677.

<sup>128</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *op. cit.*, h. 91.



Hadis tersebut mengisyaratkan kepada pihak-pihak yang melakukan kerjasama untuk menjunjung prinsip kepercayaan sebagai amanah karena Allah swt. selalu menyertai pihak yang berserikat dengan wujud menumbuhkan rasa saling menjaga dan Allah swt. memberi dan menambahkan rezeki. Tetapi Allah swt. akan meninggalkan kerjasama tersebut jika salah satunya berkhianat. Jadi, setiap perkongsian dituntut selalu oleh sifat jujur, saling percaya, saling menghargai dan sebagainya. Kandungan lainnya menunjukkan bahwa suatu aktivitas akan membuahkan hasil lebih baik jika dilakukan bersama-sama dengan tetap menjaga kebersamaan itu sendiri.

Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang, kemampuan, kepandaian (*skill*), peralatan, kepercayaan dan barang-barang lainnya yang dapat di nilai dengan uang.

Aplikasinya dalam perbankan, biaya dialokasikan oleh nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk suatu usaha/proyek. Setelah proyek selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut beserta bagihasil yang telah disepakati sebelumnya.

Dalam *musyarakah*, semua modal disatukan dan dikelola secara bersama-sama dan setiap pemilik modal berhak turut menjalankan proyek dan berhak rela menentukan kebijakannya. Namun pemilik modal tidak boleh memiliki tindakan seperti menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi, menjalankan proyek harus dengan seizin pemilik modal lainnya, biaya yang dipakai dalam proyek harus diketahui oleh pihak lain dan proyek yang akan

dijalankan harus disebutkan dalam akad/perjanjian. Inti prinsip tersebut mengantarkan para pemodal baik pemodal skill, peralatan, barang, dana dan modal-modal lainnya menjadi orang-orang yang terpercaya yang menimbulkan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap kewajiban-kewajiban dalam berusaha.

- *al-Mudharabah (Trust Financing, Trust Investment)*. Menurut Ahmad asy-Syarbasy dalam *al-Mu'jam al-Iqtisad al-Islami* yang dikutip oleh Syafi'i Antonio, bahwa *Mudharabah* berasal dari kata *Dharb* yang berarti memukul atau berjalan dengan kata lain proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya.<sup>129</sup>

Dalam al-Qur'an kata *Dharb* sepadan dengan firman Allah swt. Dalam QS. Al-Muzammil ( 73 ): 20

.... وَأَخْرُونا يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ....

Terjemahnya:

"...dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah swt...." (al-Muzammil:20)<sup>130</sup>

Firman Allah swt. dijumpai pula dengan QS. al-Jumuah (62): 10

.... فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ....

Terjemahnya:

---

<sup>129</sup> *Ibid*, h. 95.

<sup>130</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an.. op. cit*, h. 576.

“Apabila telah ditunaikan shalat maka ber-tebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah swt.”(al-Jumuah: 10).<sup>131</sup>

Pada aplikasinya, *al-Mudharabah* merupakan bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pihak pemilik modal (*Shahibul Maal*) menyediakan modal 100% dan mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*Mudharib*) yang turut menyediakan keahlian dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Kemudian keuntungan yang didapat akan dibagi sesuai kesepakatan dalam kontrak.<sup>132</sup> Tetapi jika terjadi kelalaian terhadap usaha yang dikelola mengakibatkan kerugian, maka kerugian yang timbul ditanggung oleh pihak *Shahibul Maal*. Sedangkan *Mudharib* hanya menanggung kerugian waktu, prestasi serta potensi keuntungan. Kecuali kerugian tersebut merupakan kelalaian atau kecerobohan *Mudharib*, maka kerugian baru ditanggung olehnya, bukan dibebankan ke *lubihahS Maal*. Sehingga pola manajemen pengelolaan dana tersebut sepenuhnya tanggung jawab *Mudharib*.<sup>133</sup>

Konsep *Mudharabah* jelas memberikan makna keadilan dalam berbisnis karena semua pihak akan mendapatkan keuntungan dan kerugian sesuai dengan kontribusinya pada kontrak kerjasama tersebut. Artinya bukan hanya *profit sharing* yang dibagi tetapi *lost sharing* juga ditanggung bersama

---

<sup>131</sup> *Ibid*, h. 554.

<sup>132</sup> Lihat Karim Business Consulting, *Produk Perbankan Syariah* (Jakarta: Biro Perbankan Syariah BI, 2001), h. 7.

<sup>133</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *op. cit.*, h 95.

sehingga pengelola dana merasa memiliki dana tersebut.

- *Al-Muzara'ah (Harvest-Yield Profit Sharing)*. Prinsip ini adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarapan, aplikasinya pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen. Dalam konteks lembaga keuangan Islam dapat memberikan pembiayaan bagi hasil yang bergerak dalam bidang *plantation* atas dasar prinsip bagi hasil dari hasil panen.<sup>134</sup>
- *Al-Musaqah*. Prinsip ini lebih sederhana daripada *al-Muzaraah*, dalam *Musaqah* si penggarap hanya bertanggungjawab atas penyiraman dan pemeliharaan dan sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.<sup>135</sup>

#### (c) Jual Beli (*Bai' / Sale and Purchase*)

Salah satu sistem transaksi dalam al-Qur'an dan hadis yakni jual beli. Dalam dunia perbankan syariah bentuk jual beli telah dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi.

Aktivitas jual beli jelas dihalalkan oleh Allah swt. sebagaimana firman-Nya dalam QS. Al-Baqarah (2): 275

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Terjemahan:

---

<sup>134</sup>*Ibid*, h 99.

<sup>135</sup>*Ibid*, h. 100.

"...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...." (QS. Al-Baqarah : 275).<sup>136</sup>

Ayat di atas memberikan legitimasi kehalalan jual beli dan legitimasi keharaman riba. Karena itu, konsep ditawarkan dalam dunia perbankan mengenai jual beli terdiri dari beberapa bentuk yakni *Bai' al-Murabahah*, *Bai' as-Salam*, dan *Bai' al-Isthisna*.

- *Bai' al-Murabahah*. Prinsip ini adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *Bai al-Murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan.<sup>137</sup>

Aplikasi perbankan syariah adanya kesepakatan antara bank dan nasabah kontrak dagang mengenai kelebihan yang didapat misalnya bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli dengan menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. *Bai' al-Murabahah* ini lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan dan barang dalam transaksi tersebut diserahkan lebih dahulu sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh.<sup>138</sup>

- *Bai' as-Salam (in-front payment sale)*. Prinsip ini yakni pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka<sup>139</sup> atau dengan istilah pembelian secara pesan (barang) atau order.

---

<sup>136</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an.....op. cit*, h. 44.

<sup>137</sup> Lihat Muhammad Syafii Antonio, *op.cit*, h. 101.

<sup>138</sup>Lihat Karim Business Consulting, *op.cit*. (Jakarta: Biro Perbankan Syariah BI, 2001), h. 2.

<sup>139</sup>Lihat Muhammad Syafii Antonio, *op. cit*, h. 108.

Transaksi jual beli secara *as-Salam* dimana barang yang perjualbelikan belum ada, namun pembayaran dilakukan terlebih dahulu dengan jalan tunai dimana bank sebagai pembeli dan nasabah sebagai penjual. Karena barangnya belum tersedia bukan berarti ketentuan-ketentuan terhadap barang itu diindahkan saja, bahkan barang tersebut tetap akan dijaga dari segi kualitas, kuantitas, harga, pada waktu penyerahan barangnya secara pasti.

*Bai'as-Salam* biasanya diaplikasikan pada pembiayaan bidang pertanian dalam dunia perbankan dengan waktu yang relatif pendek, juga pembiayaan barang industri seperti garmen.

- *Bai' al-Istishna'* (*purchase by order or manufacture*). Prinsip ini merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Model jual beli terakhir ini, bagian dari pada *Bai' as-Salam*, maksudnya pembayaran boleh di muka, di angsur (dicicil) atau kemudian.<sup>140</sup> *Bai al-Istishna* biasanya diaplikasikan pada pembiayaan konstruksi.

(d) Produk Sewa (*Ijarah/Operational Lease and Financial Lease*)

Transaksi *Ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat. Pihak bank sebagai perantara terhadap barang yang disewakan kepada nasabah baik berupa barang maupun jasa. Jadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) bukan hanya sebagai tempat untuk menabung atau meminjam akan tetapi juga di-gunakan fasilitas-fasilitas lewat sewa. Secara garis besarnya sewa terbagi atas dua jenis:

- *Al-Ijarah (Operational Lease)*. *Al-Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui

---

<sup>140</sup> *Ibid*, h. 113.

pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.<sup>141</sup> Artinya *Al-Ijarah* atau sewa murni dengan penyewaan barang yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak bermaksud memiliki barang tersebut. Dalam dunia perbankan dikenal dengan istilah *Operational Lease*.

Dalam aturan Islam berupa apapun yang disewa itu harus dibayar. Hal ini dipertegas dengan sabda Rasulullah saw. bahwa menyewa tenaga seseorang harus dihargai misalnya seorang pembantu yang memang disewa untuk membantu meringankan urusan rumah tangga atau penjaga bayi (*baby sister*), ia dipekerjakan di *household* (rumah tangga) bukannya dia tidak mempunyai hak sehingga sang majikan seperti memiliki keseluruhan tenaganya. Tetapi ia hanya di sewa tenaganya tanpa merasa memiliki keseluruhan kemampuannya. Secara literlet bahwa seorang yang dipakai tenaga secara fisik maupun non fisik harus diserahkan finansial (salary/gaji) sebelum keringatnya kering.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ  
قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه) <sup>142</sup>

Artinya:

"Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw. Bersabda, "Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering" <sup>143</sup>

<sup>141</sup> *Ibid*, h. 117.

<sup>142</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Qazwiny, *Sunan Ibnu Majah* (Juz ke-2; tt:tp,tth.) h. 817.

<sup>143</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *op. cit.*, h. 118.

Aplikasinya dalam dunia perbankan, dimana pihak bank sebagai pihak yang mendanai pembelian kemudian menyewakannya kembali kepada yang membutuhkan dengan menetapkan biaya sewa dan status barang tersebut tetap milik daripada pihak bank sehingga pihak penyewa hanya mempunyai hak pemanfaatan terhadap barang tersebut. Misalnya sewa kantor, pihak penyewa harus tetap menjaganya karena kantor tersebut bukan miliknya tetapi milik bank.

- *Al-Ijarah al-Muntahia bit-Tamlik (Financial Lease with Purchase Option)*. *Al-Ijarah al-Muntahia bit-Tamlik* atau sewa beli yakni di mana sipenyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa dan disebut dengan financial lease dalam dunia perbankan.<sup>144</sup>

Perbankan syariah umumnya mengaplikasikan model yang terakhir yakni *bai' al-Takhjiri* karena lebih mudah dari segi pembukuan dan bank tidak repot dengan pengurusan dari pada barang sewaan tersebut (aset yang disewakan). Sehingga bank lebih memilih *Bai' al-Takhjiri* dibandingkan dengan *al-ijarah* (sewa murni), di mana *Bai' al-Takhjiri* akhirnya akan diakhiri berpindahan kepemilikan dari status sewa menjadi status kepemilikan murni bagi nasabah.

(e) Akad pelengkap

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, maka bank memerlukan akad pelengkap bukan tujuan mencari keuntungan semata walau tetap terdapat biaya-

---

<sup>144</sup>Lihat Muhammad Syafii Antonio, "Bisnis dan Perbankan dalam Perspektif Islam" *Jurnal Syariah*, Edisi IV; Ujung Pandang: Fak. Syariah, 1998M/1419H., h. 69.



biaya yang seharusnya dikeluarkan. Akad pelengkap tersebut antara lain :

- *Al-Wakalah (Perwakilan/Deputyship)*. *Al-Wakalah* berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. *Al-Wakalah* adalah akad pemberian kuasa dari pemberian kuasa (*Muwakkil*) kepada penerima kuasa (wakil) untuk melaksanakan suatu tugas (*Taukil*) atas nama pemberian tugas.<sup>145</sup> Bidang muamalah juga seperti itu boleh mengambil seorang wakil. Aktivitas seperti jual-beli boleh memanggil dan menyuruh orang lain untuk mewakili yang berhak untuk membelikan sesuatu atau menjualkan sesuatu, mengadaikan (*ar-Rahn*) barang.
- *Al-Kafalah (Perwakilan/Guaranty)*. *Kafalah* adalah akad pemberian jaminan (*Makful Alaih*) yang diberikan satu pihak ke pihak lain di mana pemberi jaminan (*Kafil*) bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan (*Makful*).<sup>146</sup> *Al-Kafalah* ini mengalihkan tanggung jawab dari pihak yang di jamin kepihak penjamin sehingga penjaminlah yang terbebani oleh sebuah tanggung jawab yang diberikan padanya.

Konteks perbankan, sistem *al-Kafalah* dapat diaplikasikan, misalnya seseorang nasabah mempunyai proyek yang membutuhkan dana besar. Untuk melanjutkan sebuah proyek tersebut mengambil alternatif pendanaan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Namun dalam aturannya, pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) akan mengucurkan dana besar dengan adanya jaminan sebagai antisipasi resiko kerugian. Karena itu,

---

<sup>145</sup>Lihat Muhammad Syafii Antonio, *op. cit.* h. 120.

<sup>146</sup>Lihat A. Djazuli dan Yadi Janwari, *op. cit.* h. 69.

dengan sistem *Kafalah*, nasabah (*Makful*) boleh menjadikan seseorang sebagai *Kafil* dengan harapan si *Kafil* akan membayar dana pinjaman apabila dikemudian hari si *Makful* mengalami kesulitan dalam pelunasan dana yang dipinjam. Adapun yang dijadikan sebagai si *Kafil* bisa tokoh masyarakat, tokoh agama atau orang yang mempunyai nama baik di masyarakat.

- *Al-Hawalah (Alih Utang Piutang/Transfer Service)*. *Al-Hawalah* adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.<sup>147</sup> Beban utang dialihkan kepada orang lain yang tidak berutang pada mulanya namun selanjutnya harus membayar utang atas utang orang yang berutang pada mulanya. Perbuatan ini terdapat dalam sebuah hadis Rasulullah saw. :

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أَطْبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ<sup>148</sup>

Artinya:

“Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah sesuatu kezaliman. Dan jika salah seorang dari kamu diikutkan (*dihalawahkan*) kepada orang yang kaya/ mampu, terimalah *hawalah* itu.”<sup>149</sup>

Aktivitas perbankan *al-Hawalah* diaplikasikan antara lain *Factoring* atau Anjak Piutang, nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga dan memindahkan piutangnya ke bank, bank kemudian

<sup>147</sup> Lihat Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah...*, op. cit h. 126.

<sup>148</sup> Syekh Imam Alamatul Badarudin Iby Muhammad Mahmud bin Ahmad al-Ayni, *Shahih Bukhar*, (Juz ke-11, tt.: Daar Fikr, t.th.), h. 111.

<sup>149</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah.....*, op. cit., h.126.

membayar piutang tersebut dan menagihnya dari pihak ketiga.<sup>150</sup>

*Hawalah* lazimnya dipergunakan untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Namun bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang. Untuk menganatisipasi risiko kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berutang dan kebenaran transaksi antar memindahkan piutang dengan yang berutang.

Pada dasarnya *Hawalah* mengandung unsur tolong menolong dan bisa saja mencapai titik kewajiban untuk menolong selama usaha-usaha tersebut tidak boleh di tolong untuk melanjutkan usaha tersebut.

- *Ar-Rahn (Gadai/Mortgage)*. *Ar-Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.<sup>151</sup> Barang yang ditahan (gadaikan) memiliki nilai ekonomis, milik sendiri, jelas ukuran, sifatnya dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar serta dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan.

Walau secara hukum barang yang digadaikan dikuasai oleh bank. Tapi atas izin bank, nasabah dapat menggunakan barang tertentu yang digadaikan dengan tidak mengurangi nilai dan merusak barang yang digadaikan. Apabila barang yang digadaikan rusak atau cacat, maka nasabah harus bertanggung jawab atas barang yang digadaikan.<sup>152</sup>

---

<sup>150</sup>*Ibid*, h. 127.

<sup>151</sup> *Ibid*, h. 128.

<sup>152</sup> Lihat Karim Business Consulting, *op. cit.* h. 10.

Hingga barang yang digadaikan tetap utuh seperti semula.

Kemudian, barang yang digadaikan telah jatuh tempo nasabah tidak dapat membayar wanprestasinya (utang nasabah), maka bank dapat melakukan penjualan barang atas perintah hakim dan nasabah juga mempunyai hak untuk menjual barang tersebut bila dapat izin dari bank. Akan tetapi jika dalam penjualan barang tersebut yang dilakukan oleh bank melebihi daripada beban kewajiban nasabah maka kelebihan menjadi milik nasabah.

- *Al-Qadrh (Soft and Benevolent Loan)*. *Al-Qardh* adalah pinjaman uang yang diberikan kepada nasabah atas dasar kebajikan sosial dan peminjam tidak berkewajiban mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman dan biaya administratif.<sup>153</sup> Artinya tidak mengharap imbalan ketika meminjamkan dana ke nasabah. Aplikasi perbankan biasanya dalam beberapa hal, antara lain:
  - Produk pelengkap bagi nasabah yang sangat membutuhkan dana secepatnya dengan syarat sang nasabah telah di ketahui oleh pihak bank akan loyalitas dan bonafiditasnya untuk mengembalikan pinjamannya secepatnya pula. Seperti pinjaman talangan haji, di mana calon haji diberikan talangan dana untuk memenuhi syarat penyeteroran biaya perjalanan haji. Namun nasabah harus melunasi sebelum menunaikan ibadahnya.
  - Adanya nasabah yang memerlukan dana secepatnya akan tetapi tidak bisa menarik uang kerana tersimpan dalam bentuk deposito yang tak mungkin ditarik pada saat itu.

---

<sup>153</sup> Lihat Warkum Sumitro, *op. cit.*, h. 39.

- Sebagai produk penyaluran dana ke usaha kecil atau usaha mikro dalam membantu kemajuan berusaha karena kekurangan dana misalnya tapi peluang usahanya sangat baik dan menjanjikan.
- Bantuan sektor sosial seperti penanggulangan bencana alam, beasiswa untuk orang tak mampu (*dhuafa'*).<sup>154</sup>

Menurut Warkum bahwa selain itu bank juga memberikan *Qardh* yang ditujukan kepada nasabah yang memerlukan pinjaman konsumtif jangka pendek<sup>155</sup> atau berbentuk dana sosial yang lebih di kenal dengan *al-Qardhul al-Hasan* (dana kebajikan).

Jadi *al-Qardh* bukan untuk menunggu bagi hasil dari modal pinjaman atau untuk tujuan komersial saja tapi ada juga semata-mata meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan, untuk saling tolong-menolong, untuk mensejahterakan orang seperti pinjaman kepada pengusaha mikro/kecil atau hal yang berhubungan dengan konsumtif.

### C. Produk-Produk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Dalam operasionalnya, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) menawarkan beberapa produk kepada nasabah untuk penghimpunan dana, penyaluran dana dan jasa perbankan. Setiap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) bebas memilih produk-produk yang cocok dengan karakter nasabah sehingga produk-produk tersebut mudah dipahami oleh pihak terkait. Jadi prinsipnya pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) meluncurkan produk sesuai dengan *market share*nya. Namun kesemuanya tetap

<sup>154</sup> Lihat Muhammad Syafii Antonio, *op. cit.*, h. 133.

<sup>155</sup> Lihat Warkum Sumitro, *op. cit.*, h. 40.

berpedoman pada prinsip-prinsip operasional Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan ketentuan-ketentuan Dewan Syariah Nasional (DSN).

Adapun produk-produk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang beroperasi di Sulawesi Selatan antara lain:

a) Untuk produk penghimpunan dana, yakni:

- (1) Tabungan *Mudharabah*
- (2) Tabungan *Wadiah*
- (3) Tabungan Pendidikan
- (4) Tabungan Haji
- (5) Deposito *Mudharabah*

b) Untuk produk penyaluran dana, yakni:

- (1) *Murabahah* (jual beli)
- (2) Pembiayaan *Mudharabah*
- (3) Pembiayaan *Musyarakah*
- (4) Pembiayaan *Ijarah wa Iqtina*
- (5) Piutang *Bai Bithaman Ajil* (BBA)
- (6) Pinjaman *Qardh*
- (7) Pinjaman *al-Qardhul Hasan*

c) Produk Jasa, yakni produk *ar-Rahn* .

Produk penghimpunan dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) walaupun masih sangat minim, namun telah memenuhi sebagian kebutuhan masyarakat. Misalnya produk tabungan haji, umat yang ingin menunaikan ibadah haji dapat melaksanakan haji dengan berhubungan dengan pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Demikian juga dana pendidikan bagi putra-putri dapat melanjutkan pendidikan dengan menabung di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Selain itu, nasabah boleh menitipkan dana di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan produk tabungan *wadiah* yang setiap waktu dapat menabung dan menarik dana.

Deposito *Mudharabah* merupakan tabungan berjangka yang mempunyai tenggang waktu untuk mengambilnya misalnya 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan dan 24 bulan. Dana Deposito *Mudharabah* dikelola oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan menggunakan nisbah yang disepakati oleh nasabah dan pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Pembiayaan *Murabahah*, pihak bank sebagai penjual suatu jenis barang dan nasabah sebagai pembeli, dan selisih harga jual dan harga beli merupakan keuntungan bank. Harga pembelian tersebut akan dibayar oleh nasabah secara tangguh atau angsuran sesuai dengan kesepakatan ke dua belah pihak. Sedangkan pembiayaan *Mudharabah* pembiayaan berupa modal kerja oleh pihak bank kepada nasabah 100% modal untuk dikelola dalam usahanya dan keuntungan dibagi hasil berdasarkan nisbah yang disepakati.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) juga mengeluarkan produk dana sosial seperti dana *Qardul Hasan*. Namun cara mengelola *Qardul Hasan* setiap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) berbeda, ada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) mengelola *Qardul Hasan* dengan menyalurkan kepada nasabah untuk dipakai usaha namun tanpa bagi hasil dan mengembalikan kepada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tanpa ada batas waktu, ada pula menyalurkan khusus untuk karyawan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Dana *Qardul Hasan* berasal dari dana zakat, infaq, sedeqah serta dana non halal.

Selain produk penghimpunan dan penyaluran, terdapat pula Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) beroperasi seperti pengadaian dengan memberikan produk jasa *ar-Rahn* yang terbebas dari penetapan bunga. Produk *ar-Rahn* merupakan pembiayaan dengan prinsip gadai yang

mana barang yang diugungkan dititipkan untuk sementara dengan hanya membayar biaya pemeliharaan oleh nasabah ke pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Artinya dana yang diberikan oleh nasabah sebagai balas jasa kepada pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang menjaga keamanan barang yang gadaikan.

Produk-produk yang ditawarkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) ke masyarakat harus sesuai dengan kondisi kultur, sosial dan ekonomi masyarakat. Masyarakat Sulawesi Selatan potensial sumber daya alamnya maka BPRS semestinya berani menawarkan produk pengarahana dana seperti *Musaqah* dan *Muzaraah*. Karena umumnya daerah di Sulawesi Selatan merupakan agraris sebagian telah dialiri pengairan dan masih ada tadah hujan, kondisi ini cocok dengan produk *Muzaraah* dan *Musaqah*, selain itu sebagian cocok produk *Musyarakah*, *Mudharabah* serta *Murabahah* pada daerah tambak dan perniagaan.

#### **D. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) vs Bank Perkreditan Rakyat (BPR)**

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah salah satu bank yang keberadaannya telah di akui secara nasional, merupakan lembaga keuangan dalam menyalurkan dan menghimpun dana serta penggunaan fasilitas jasa sesuai dengan konsep syariah yang ditentukan oleh agama.

Berlandaskan al-Qur'an dan hadis maka sangat jelas untuk membedakan antara Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Dari segi nama, masyarakat akan tahu bahwa BPRS berbeda dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) berdasarkan syariah yang bersistem bagi hasil dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) berdasarkan bunga.



Beberapa hal yang sangat membedakan secara esensi antara Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), antara lain:

1. Aspek akad dan legalitas. Akad dalam Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) antara bank dan nasabah memiliki konsekuensi dunia akhirat karena dilakukan berdasarkan hukum Islam. Sehingga kedua belah pihak secara tidak langsung dapat pertanggung jawab terhadap hukum Allah dan hukum positif. Sedangkan bank konvensional tidak diuntut untuk membertanggung jawabkan di akhirat tapi hanya dihadapkan dunia dalam arti pertanggung jawaban legalitas hukum positif.
2. Lembaga penyelesaian sengketa. Dalam Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) jika terjadi perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabah, ke dua belah pihak menyelesaikan masalah tersebut di BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional) yang dulu dikenal dengan Badan Arbitrase Majelis Ulama Indonesia (BAMUI). Wadah penyelesaian perkara tersebut didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Berbeda halnya dengan BPR yang segala sesuatunya harus diselesaikan di Pengadilan Negeri.
3. Struktur Organisasi. Secara umum struktur organisasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) konvensional sama, seperti komisaris, direksi, dan lain-lain. Namun yang mengkhususkannya dengan terdapatnya dewan pengawasan yang tidak ada di BPR konvensional yakni Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berada dibawah pantauan Dewan Syariah Nasional (DSN) yang sebagai badan

otonomi Majelis Ulama Indonesia (MUI).<sup>156</sup> Sehingga Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) diawasi oleh 2 dewan pengawas yakni Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Bank Indoensia. Dewan Pengawas Syariah (DPS) dari segi kepatuhannya terhadap syariah dan Bank Indonesia terhadap kepatuhannya terhadap aturan-aturan perbankan secara umum.

4. Prinsip dan Produk. Perbedaan antara Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang lainnya mengenai produk pembiayaan dengan sistem bagi hasil. Dimana yang dibagi hasil dari nasabah ke bank bukan hanya dari segi keuntungan (*profit*) semata, akan tetapi kerugian (*lost*) pun dibagi. Kerugian yang dimaksud bukan hanya modal "uang" akan tetapi konsekuensi pikiran, tenaga, skill, dan waktu<sup>157</sup>.

Deretan perbedaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tersebut tetap memiliki kesamaan secara teknik seperti penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang dipakai, syarat-syarat umum untuk memperoleh pembiayaan seperti kartu identitas, proposal pembiayaan, laporan keuangan, dan hal-hal yang bertalian dengannya.

#### **E. Kendala dan Peluang Pengembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)**

Perkembangan industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) selama ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan salah satu pilar penting dalam sistem keuangan mikro di Indonesia terlihat berdirinya beberapa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan

---

<sup>156</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah.... op. cit.*, h.30-33.

<sup>157</sup> *Ibid*, h. 32.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) serta terbukanya beberapa cabang-cabang Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Meskipun demikian, masih banyak usaha kecil menengah dan masyarakat pedesaan yang belum dapat dilayani oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sejalan dengan perkembangan ekonomi, hal ini merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan guna meningkatkan peran Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan usaha kecil.

Selain peluang terdapat pula kendala yang harus dilalui oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di antara persaingan lembaga keuangan bank terdapat juga lembaga keuangan non perbankan yang bersistem syariah maupun bersistem konvensional.

Adapun kendala yang di hadapi oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), antara lain :

- 1) Muncul interpretasi yang berbeda tentang bunga di kalangan ulama.

Untuk mengembangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang tangguh dan sehat sebagai pilar perekonomian, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) membutuhkan pihak-pihak yang solid terhadap konsep syariah termasuk nasabah. Namun perbedaan pandangan di kalangan elit agama berbeda khususnya mengenai bunga bank menjadikan masyarakat turut bermacam-macam pandangan akan keberadaan bank bersistem syariah termasuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Karena itu, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) harus menggunakan strategi untuk mengajak masyarakat sebagai nasabah.

- 2) Terbatasnya Sumber Daya Insani (SDI).

Salah satu kendala utama Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah kurangnya Sumber Daya Insani (SDI), apalagi umur dan kajian tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia masih sangat baru sehingga masih kurangnya SDI yang profesional. BPRS merupakan suatu institusi yang harus diurus dan dikembangkan bukan hanya sebagai lembaga keuangan syariah yang dilegalitaskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Akan tetapi lebih dari itu BPRS harus dapat di terima oleh masyarakat sebagai konsep lembaga keuangan yang mempunyai misi moral agama. Karena itu, perbankan syariah memerlukan SDI yang berkualitas dari segi pemahaman syariah dan ekonomi umum.

- 3) Lamanya masyarakat terkontaminasi tentang praktek bunga sehingga diperlukan *timing* yang cukup lama untuk merubah pradigma masyarakat tersebut.
- 4) Penguatan permodalan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Untuk mendukung pertumbuhan yang sehat dan memperluas pelayanan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), serta melakukan ekspansi usaha, maka perlu adanya permodalan yang kuat.<sup>158</sup> Modal yang kuat, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dapat berkembang sesuai harapan masyarakat misalnya, masyarakat membutuhkan dana besar.
- 5) Persaingan yang lebih ketat di masa depan. Sejalan dengan bertambahnya lembaga-lembaga keuangan yang juga memberikan pembiayaan kepada UMK, persaingan di masa depan dalam pembiayaan kepada UMK semakin ketat. Persaingan tersebut terdapat adanya bank umum membuka unit-unit pelayanan

---

<sup>158</sup> Bank Indonesia, *op.cit*, h. 18.

mikro dan lembaga penyalur dana bergulir yang didukung oleh pemerintah.<sup>159</sup>

- 6) Lemahnya sosialisasi perbankan Islam. Melihat prosentase pengembangannya menurut Irman Gusman, wakil Ketua Dewan Pakar ICMI se-Indonesia bahwa salah satu kendala perbankan syariah karena lemahnya sosialisasi dengan pangsa pasar baru sekitar 0,4% dari total perbankan nasional.<sup>160</sup> Sehingga dalam sosialisasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dibutuhkan seluruh *stakeholder* untuk turut berperan dalam memberikan informasi keberadaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).
- 7) Masih terbatasnya jaringan. Lain hanya, Direktur Bank Muamalat Indonesia, A. Riawan Amin, menurutnya bahwa salah satu kendala utama perbankan syariah termasuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah keterbatasan jaringan.

"Problem utama perbankan syariah bukanlah terletak pada sosialisasi dan promosi, melainkan masih terbatasnya jaringan dengan banyak anggota masyarakat di berbagai pelosok daerah ingin menabung di bank syariah namun tidak ada kantor layanan bank syariah, akhirnya mereka terpaksa menggunakan bank konvensional."<sup>161</sup>

Artinya untuk menjangkau masyarakat potensial sebagai nasabah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) harus melakukan ekspansi lembaga dan ekspansi produk seperti membuka kantor cabang di daerah, membuat produk dengan melakukan mitra

---

<sup>159</sup> *Ibid*, h. 19.

<sup>160</sup> Irman Gusman, "Perlu Akseleri Perbankan Syariah" [Bisnis Syariah], *Republik*, No. 219 Tahun ke-11, 21 Agustus 2003, h. 2.

<sup>161</sup> Irman Gusman, *ibid*.

usaha dengan suatu lembaga yang memudahkan masyarakat mengakses dunia perbankan.

Kendala-kendala yang di hadapi oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tersebut bukan berarti tidak mempunyai peluang untuk menyebarluaskan pengembangan perbankan syariah di pelosok Indonesia. Pengembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia cukup punya peluang besar. Peluang pengembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di nusantara ini antara lain:

- 1) Landasan hukum operasional Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) jelas. Secara hukum (Yuridis) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sudah mempunyai suatu kekuatan hukum yang menguatkan kedudukan untuk berdiri dan pengembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sebagaimana dilegalkannya UU No. 10 Tahun 1998 atas perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan atau peraturan-peraturan mengenai BPRS yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.
- 2) Dukungan Kebijakan Pemerintah. Upaya pemerintah secara gencar untuk meningkatkan peran UMK dan masyarakat pedesaan dalam perekonomian nasional yang direalisasikan antara lain dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi yang menegaskan pentingnya pemberdayaan UMK, khususnya dalam hal peningkatan akses UMK kepada sumber daya finansial<sup>162</sup>
- 3) Mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam merupakan peluang/harapan untuk tersosialisasinya BPRS di Indonesia.

---

<sup>162</sup> Bank Indonesia, *BluePrint... op.cit*, h. 17.

- 4) Potensi kerjasama keuangan dengan lembaga Lain. Peluang kerjasama keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan berbagai lembaga lain sangat terbuka, terutama karena Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan ketentuan perbankan, diawasi dan dibina oleh Bank Indonesia. Kerjasama yang dapat dilakukan dapat berupa penyaluran pinjaman, pembiayaan kepada UMK maupun dalam pendanaan kepada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) itu sendiri,<sup>163</sup> dengan sistem *Linkage program* antara Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan Bank Umum dalam rangka mendorong penyaluran kredit UMK melalui Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).
- 5) Potensi Pasar yang Besar.<sup>164</sup> Sebagian besar masyarakat pedesaan populasinya mencapai sekitar 56,6% dari total masyarakat Indonesia belum tersentuh pelayanan perbankan dan masih tergantung pada pelayanan keuangan informal dan program pemerintah. Kondisi tersebut merupakan potensi yang baik untuk dikelola oleh BPRS sehingga dapat membuka lembaga keuangan di lokasi pedesaan.

Berbagai kendala Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) untuk dikembangkan namun peluang bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tetap terbuka lebar. Karena Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) mendapat dukungan pemerintah, praktisi perbankan dan bahkan kondisi masyarakat terdapat peluang yang potensial untuk dikelola oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

---

<sup>163</sup> *Ibid.*

<sup>164</sup> *Ibid*, h. 16.

## Bagian 4

### KONSEP UMUM UMARA DAN ULAMA

#### A. Pengertian dan Tugas Umara pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

##### 1. Pengertian Umara

Umara berasal dari kata *amara-amran-imaara* yang berarti me-merintahkan, menjadi penguasa. Umara sendiri merupakan jamak dari kata *al-amiru* yang berarti amir, pangeran, putera mahkota. Sepadan dengan arti *al-malik* (raja), *al-ra'is* (kepala, pemimpin, penguasa) atau *qaidul a'maa* (penuntun/penunjuk jalan orang buta)<sup>165</sup> atau berarti pemimpin pemerintahan.<sup>166</sup>

Umara yang berarti pemimpin, dalam al-Qur'an disinggung akan keharusan umat menaati pemimpin yang disebut sebagai *ulil amr* sebagaimana QS.An-Nisa (4): 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

Terjemahnya:

---

<sup>165</sup>Ahmad Warson, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 38.

<sup>166</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (ed.II; Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 1242.



"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul-Nya (sunnahnya)."<sup>167</sup>

Dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*, ulil Amri berarti pemimpin dalam negara. Sedangkan menurut ulama Tafsir membuat definisi ulil amri sebagai berikut:

- a) Raja dan kepala pemerintahan yang patuh dan taat kepada Allah dan Rasulullah saw.
- b) Para raja dan ulama
- c) Amir di zaman Rasulullah saw., setelah ia wafat, kemudian jabatan itu berpindah kepada *Qadi*, komanda militer, dan mereka yang meminta anggota masyarakat untuk taat atas dasar kebenaran
- d) Para mujtahid atau orang memiliki otoritas dalam menetapkan hukum.<sup>168</sup>

Pendefinisian atas ulil amri oleh ulama tafsir, yang menarik ketika ulama sebagai salah satu pengertiannya. Artinya ulama yang mempunyai tugas penyampai ajaran-ajaran Islam juga harus mempunyai nilai-nilai *leadership* seperti ulul amri yang dipahami selama ini.

Adapula yang mengartikan umara adalah sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara dan bagian-bagiannya atau sekelompok orang (penguasa) secara

---

<sup>167</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2004), h. 88. Selanjutnya disebut Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*.....

<sup>168</sup>Abdul Azis Dahlan et. al., *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996) h. 1842.

bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan<sup>169</sup> atau pemimpin pemerintahan.<sup>170</sup>

Dalam tulisan ini, umara yang dimaksudkan adalah pemerintah. Pemerintah yang berwenang dalam menentukan kebijakan tentang perbankan dalam hal ini adalah Bank Indonesia sebagai bank Sentral atau dikenal *banker's bank*. Bank Indonesia sendiri mempunyai status lembaga negara independen dalam menjalankan tugas-tugasnya sehingga Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan menjalankan setiap tugas dan wewenang-nya.

## 2. Tugas Umara dalam BPRS

Tugas umara adalah menyelenggarakan pemerintahan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat. Menurut al-Mawardi, kewajiban pemimpin meliputi 10 poin: (1) menjaga penerapan agama yang benar; (2) menerapkan hukum dalam setiap permasalahan yang terjadi dengan cara yang adil; (3) melindungi keamanan negara sehingga rakyat dapat beraktivitas dengan bebas dan tidak dihantui ketakutan; (4) menegakkan hukum pidana sehingga hak-hak warga terlindungi; (5) menjaga perbatasan negara dengan sistem keamanan yang baik sehingga dapat menangkal serangan musuh; (6) jihad untuk memerangi musuh; (7) mengambil pajak dan zakat dari warga sesuai dengan ketentuan syariat; (8) mendistribusikan dana baitul mal dengan baik dan tepat pada waktunya; (9) mempekerjakan orang-orang yang amanah dan kapabel dalam bidangnya; (10) memantau langsung perkembangan yang terjadi pada warganya dan tidak hanya memercayakannya kepada wakilnya agar dapat

---

<sup>169</sup>Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia* (Jakarta: CV. Anda Utama, 1992), h.. 756.

<sup>170</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *op.cit.*, h. 1242.

memiliki lebih banyak waktu untuk menikmati dunia atau untuk beribadah.

Dalam kaitan dengan kegiatan perbankan, Bank Indonesia sebagai bank sentral dan merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah, mempunyai posisi sebagai pengatur, pembina dan pengawas terhadap perbankan baik bank yang bersistem syariah maupun bersistem bunga. Selanjutnya, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugas-nya yakni: 1) menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, 2) mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan 3) serta mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia.

Secara sektoral Bank Indonesia membidangi masalah moneter, perbankan, manajemen intern dan sistem pembayaran. Namun dalam penelitian ini dikhususkan kepada sektoral perbankan. Dalam sektor Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Bank Indonesia hanya sebatas mengatur dan mengawasi. Dalam rangka tugas mengatur dan mengawasi perbankan, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan atau kegiatan usaha tertentu dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), melaksanakan pengawasan atas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dan mengenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>171</sup> Dalam pelaksanaan tugas ini, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip kehati-hatian.

Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan, selain memberikan dan mencabut izin usaha BPRS, Bank Indonesia juga dapat memberikan izin pembukaan, pe-

---

<sup>171</sup>Bank Indonesia "Pengaturan dan Pengawasan Bank", Akses 20 Mei 2008.

nutupan dan pemindahan kantor Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), memberikan persetujuan atas kepemilikan dan pengelolaan BPRS, serta memberikan izin kepada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.<sup>172</sup>

Dalam bidang pengawasan, Bank Indonesia melakukan pengawasan langsung dalam bentuk pemeriksaan secara berkala maupun sewaktu-waktu bila diperlukan. Pengawasan juga dilakukan secara tidak langsung dengan melakukan penelitian, analisis dan evaluasi terhadap laporan yang disampaikan oleh pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).<sup>173</sup>

Dalam melaksanakan tugasnya Bank Indonesia bersifat independen sebagaimana dalam UU No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia pada pasal 1 ayat 2 bahwa: "Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas campur tangan pemerintah dan atau pihak lain kecuali hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini."<sup>174</sup> Artinya Bank Indonesia lembaga Negara yang bebas melaksanakan tugasnya tanpa adanya tekanan oleh pemerintah eksekutif maupun legislatif. Bank Indonesia telah diberi kewenangan seluas-luasnya untuk mengatur tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Karena itu, dengan posisi yang tak terikat Bank Indonesia harus mempunyai prioritas kebijakan dalam mengembangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) khususnya Sulawesi Selatan sebagai pintu kawasan Indonesia Timur.

---

<sup>172</sup>Bank Indonesia, PBI No 6/17PBI/2004 Tentang bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Berdasarkan Prinsip Syariah, Akses 27 Mei 2008. Selanjutnya di sebut *PBI No 6*.....

<sup>173</sup>*Ibid*

<sup>174</sup>Republik Indonesia, UU No 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.

### 3. Kebijakan dan Strategi Umara dalam Pengembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Dalam rangka persaingan lembaga keuangan yang semakin ketat, Bank Indonesia selaku pemegang kendali proses pengembangan BPRS ke arah yang lebih baik telah merancang strategi dan mengeluarkan berbagai aturan. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh umara dalam pengembangan BPRS yakni:

- a) Mengukuhkan posisi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam sistem keuangan di Indonesia dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- b) Peraturan Bank Indonesia No. 6/17/PBI/2004 Tentang Bank Perkreditan Rakyat (BPR) berdasarkan Syariah
- c) Terbitnya Peraturan Mengenai Transparansi Kondisi Keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) No 7/47/PBI 2005.
- d) Penyusunan Arsitektur Perbankan Indonesia (API)
- e) Mengeluarkan Paket Kebijakan Perbaikan iklim Investasi
- f) Meningkatkan efektifitas sistem pengawasan
- g) Terbentuknya RUU tentang Perbankan Syariah

Selanjutnya umara telah merancang langkah-langkah bagi pengembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang telah dituangkan dalam *Arsitektur Perbankan Indonesia* (API) tahun 2004 yang merupakan sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dalam rentang waktu sampai 10 tahun termasuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Kesiapan umara untuk mengembangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagaimana dalam API dikarenakan sebelumnya tidak adanya kejelasan mengenai pengembangan perbankan dalam jangka panjang sehingga nasabah belum cukup terakomodasi, belum memadainya

infrastruktur pendukung perbankan. Karena itu API sangat mendesak bagi perbankan Indonesia dalam rangka memperkuat fundamental industri perbankan.<sup>175</sup>

Keseriusan umara dalam pengembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) ditindaklanjuti secara khusus merancang strategi-strategi dalam bentuk program-program kerja berjangka 5 tahun sebagaimana dalam *Blue Print BPR*, penyebutan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) termasuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Program-program Bank Indonesia tersebut sebagai berikut:

- a) Strategi 1 Memperkuat Kelembagaan. Dalam rangka mempekuat kelembagaan, umara merancang untuk 5 tahun selanjutnya, yakni:
  - (1) Memperkuat permodalan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) melalui pemenuhan modal disetor minimum sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dengan periode pelaksanaan 2006-2010
  - (2) Mempermudah pembukaan kantor cabang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan periode pelaksanaan 2006-2007
  - (3) Menetapkan *exit strategy* bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan antara lain modal disteor minimum, jumlah pengurus dan sertifikasi direktur dengan periode pelaksanaan 2006-2009.
  - (4) Mendorong pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) baru d luar pulau Jawa dan Bali dengan periode pelaksanaan 2006-2011
  - (5) Mendorong kerjasama (*linkage program*) antara Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan lembaga keuangan dan lembaga lain untuk

---

<sup>175</sup>Bank Indoensia, *Arsitektur Perbankan Indoensia* (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), h. 3-4.

penyaluran kredit kepada UMK dan masyarakat pedesaan dengan periode pelaksanaan 2006-2007.<sup>176</sup>

b) Strategi 2 Meningkatkan Kualitas Pengaturan.

- (1) Menyempurnakan ketentuan yang terkait dengan pemenuhan modal disetor minimum dengan periode pelaksanaan 2007-2011
- (2) Melakukan *review*, evaluasi dan penyempurnaan ketentuan kehati-hatian, kelembagaan dan penilaian tingkat kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan pertimbangan strata total asset dan praktik terbaik internasional dengan periode pelaksanaan 2006-2011
- (3) Menyusun pedoman pengawasan berbasis risiko atau *risk based supervision* (RSB) dan mengimplementasikannya berdasarkan pedoman dan pengatur sesuai dengan RSB tersebut dengan periode pelaksanaan 2008-2009.
- (4) Melakukan penelitian tentang pengaturan yang diperlukan untuk pengembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam rangka peningkatan peran dan kontribusinya sebagai lembaga pembiayaan UMK dan masyarakat pedesaan dengan periode pelaksanaan 2006-2011.<sup>177</sup>

c) Strategi 3 Meningkatkan efektivitas sistem pengawasan.

- (1) Meningkatkan kompetensi pengawasan melalui pelatihan secara terus-menerus dan sertifikasi pengawas dengan periode pelaksanaan 2006-2011
- (2) Menyempurnakan sistem identifikasi penyimpangan dan pelanggaran dengan pelaksanaan teknik

---

<sup>176</sup>Bank Indonesia, *Blue Print BPR* (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), h.26

<sup>177</sup>*Ibid.*

- pengawasan yang terfokus dengan periode pelaksanaan 2007-2011
- (3) Menyempurnakan pelaporan secara *online* kepada Bank Indonesia dengan periode pelaksanaan 2007
  - (4) Menyempurnakan sistem informasi dan manajemen pengawasan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang terintegrasi sebagai sarana *early warning sistem* yang meningkatkan kualitas pembinaan serta penegakan ketentuan-ketentuan yang berlaku dengan periode pelaksanaan 2006-2011
  - (5) Menyempurnakan informasi dan publikasi tentang perkembangan dan kondisi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) secara regular dengan periode pelaksanaan 2006-2011.<sup>178</sup>
- d) Strategi 4 Mendorong kualitas tata kelola (*governance*), manajemen dan operasional yang sehat dan profesional.
- (1) Mengimplementasikan standar minimum tata kelola (*governance*) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) antara lain meliputi penerapan pengendalian intern dan manajemen risiko dengan periode pelaksanaan 2008-2009
  - (2) Mewajibkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) untuk melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas pelaksanaan tata kelola Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sesuai standar yang telah ditetapkan dengan periode pelaksanaan 2009
  - (3) Meningkatkan profesionalisme SDM Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) melalui program sertifikasi bagi Direktur Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan pelatihan bagi SDM Bank Pem-

---

<sup>178</sup>*Ibid*, h. 27.



- biayaan Rakyat Syariah (BPRS) lainnya dengan periode pelaksanaan 2009-2011
- (4) Memfasilitasi peningkatan keterampilan dan pengetahuan SDM Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) mengenai inovasi produk baik simpanan mauun pembiayaan terutama kredit pada sector pertanian dan masyarakat pedesaan dengan periode pelaksanaan 2006-2009
  - (5) Mendorong pemanfaatan teknologi informasi untuk operasional dan penyusunan laporan keuangan intern Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) maupun laporan kepada Bank Indonesia dengan periode pelaksanaan 2008-2009.<sup>179</sup>
- e) Strategi 5 Mewujudkan infrastruktur pendukung industri Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).
- (1) Meningkatkan peran Asosiasi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai mitra Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dengan periode pelaksanaan 2006-2011
  - (2) Mendorong terbentuknya Lembaga Apex sesuai kebutuhan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan periode pelaksanaan 2006-2011
  - (3) Mendorong penyempurnaan program Sertifikasi Direktur Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam rangka meningkatkan profesionalisme SDM Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan periode pelaksanaan 2009-2011
  - (4) Mendorong kerjasama Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan lembaga penjamin kredit dalam rangka penyaluran kredit kepada UMK dan

---

<sup>179</sup> *Ibid.*

masyarakat pedesaan dengan periode pelaksanaan 2008-2009

- (5) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam rangka pembiayaan UMK dan masyarakat pedesaan dengan periode pelaksanaan 2007-2011<sup>180</sup>
- f) Strategi 6 Mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan nasabah.
  - (1) Melakukan pemantauan dan evaluasi ketentuan tentang pengaduan nasabah dengan periode pelaksanaan 2008
  - (2) Melakukan pemantauan dan evaluasi pedoman transparansi informasi produk dengan periode pelaksanaan 2008
  - (3) Menjalankan dan bekerjasama dengan lembaga terkait untuk melaksanakan edukasi bagi masyarakat mengenai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan periode pelaksanaan 2007-2011<sup>181</sup>

Strategi-strategi umara dalam mengembangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) diperlukan karena Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) mempunyai posisi yang strategis untuk melayani kebutuhan masyarakat. Apalagi sebagian besar masyarakat pengusaha mikro dan kecil serta masyarakat di daerah pedesaan yang belum dapat dijangkau oleh pelayanan lembaga keuangan lainnya seperti perbankan dalam memberikan pembiayaan dan penyimpanan dana. Apalagi pelayanan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) difokuskan pada pelayanan UMK dan masyarakat pedesaan.

---

<sup>180</sup> *Ibid*, h. 28

<sup>181</sup> *Ibid*.

## B. Konsep Umum Ulama

### 1. Pengertian Ulama

Kata ulama berasal dari akar kata *'alima-ya'lamu-ilmān*; artinya mengetahui/pengetahuan; lawan dari kebodohan (*dhiiddu al-jahl*). Isim *fā'il*-nya *'ālim* dan bentuk jamaknya *'ālimūn*, *'ullām* atau *'ulamā'*; maknanya adalah orang yang berilmu, terpelajar, sarjana,<sup>182</sup> cendekiawan<sup>183</sup>.

Kata *'ulamā'* dalam al-Quran kata dinyatakan sebanyak dua kali. *Pertama*, kata ulama terdapat dalam QS. al-Fathir (35): 28

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

Terjemahnya:

"Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya hanyalah ulama. (QS al-Fathir [35]: 28)."<sup>184</sup>

*Kedua*, kata ulama terdapat pula di QS asy-Syuara' (26): 197

أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَتُونا بَنِي إِسْرَءِيلَ

Terjemahnya:

"Dan apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka, bahwa para ulama Bani Israil mengetahuinya?"

Berujuk dari kata ulama di atas, maka konteks *pertama* meng-indikasikan bahwa yang dimaksud ulama adalah orang yang mempunyai pengetahuan untuk dapat membaca ayat-ayat *kauniyah* (fenomena alam) dan takut

<sup>182</sup>Ahmad Warson, *op.cit.*, h. 966.

<sup>183</sup>Cyril Glasse, *The Concise Encyclopedia of Islam*, diterjemahkan oleh Ghufon A. Mas'adi dengan judul *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT RajaGafindo Persada, 2002), h. 417.

<sup>184</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an....., op.cit.*, h. 438.

kepada Allah swt. Dalam firman-firman Allah swt. terdapat ajakan untuk memperhatikan alam semesta, hujan dari langit, buah-buahan, gunung-gunung, binatang yang kesemuanya merupakan konsumsi bagi manusia maupun makhluk hidup lainnya. Karena itu, ulama harus mempunyai pengetahuan tentang kebesaran dan kekuasaan Allah swt.

Konteks *kedua*, pembicaraan al-Qur'an yang kebenaran kandungannya telah diakui (diketahui) oleh ulama bani Israil.<sup>185</sup> Dari ayat ini dipahami bahwa seorang ulama, selain pengetahuan *kauniyyah* juga pengetahuan *Qur'aniyyah* sebagaimana kebenaran-kebenaran yang disampaikan al-Qur'an yang telah diketahui oleh ulama bani Israil. Jadi ulama tidak hanya sebatas mengetahui tentang pengetahuan agama tetapi juga pengetahuan umum.

Muhammad Arkoun yang seorang pemikir muslim dan ahli filsafat dari al-Jazair, melihat bahwa ulama adalah orang yang berkecimpung dalam lapangan ilmu pengetahuan, yang memusatkan perhatiannya terhadap masalah makna serta penafsiran teks dan fenomena.<sup>186</sup> Sedangkan menurut Ibnu Abbas, alim ulama adalah mereka yang meyakini bahwa Allah swt. mengetahui segala sesuatunya. Sedangkan Hasan Basri orang yang takut kepada Allah swt. yang Maha Ghaib, menginginkannya apa yang diinginkan Allah swt. serta menghindari kemurkaan Allah. Abu Hayyin al-Taimiyah bahwa ulama adalah orang-orang yang mengenal Allah dan mengenal batas-batas kewajiban.<sup>187</sup>

---

<sup>185</sup>Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1994), h. 382.

<sup>186</sup>Lihat Abdul Aziz Dahlan et.al, *op.cit*, h. 1841.

<sup>187</sup>Abu Fidaal Ibnu Katsir al-Qurays, *Tafsir al-Qur'an al-Adzhim* (Juz III; Madinah: Maktabat-Ululm wal al Hakim, 1413H/1993M), h.531-532

Term ulama dalam istilah lain, *utu al-ilm* (orang yang berpengetahuan), *ulu al-ilm* (mempunyai ilmu), dan *ulu al-albab* (mempunyai akal yang bersih). Namun sebagian besar di Indonesia mengartikan *ulul al-bab* diterjemahkan cendekiawan muslim, karena termasuk golongan yang banyak zikir dan pikir serta memohon ampunan Allah. Term lain juga searti dengan ulama adalah *ahl al-lukmah* (hukama), *ahl al-Figh* (fuqaha) dan *ahl al-Dzikir* (yang mengetahui sesuatu)<sup>188</sup>.

Peristilahan ulama sendiri berbeda-beda setiap tempat maupun budaya apabila disandingkan antara peristilahan di masyarakat dengan tugas yang di embannya, maka yang terlihat adalah tugas masing-masing subjek terdapat kurang lebih porsi yang sama misalnya sebagai pengembang, pendakwah, penceramah dan sebagainya. Namun penyebutan pada si subjek berbeda misalnya kyai di Pulau Jawa, ajengan di Sunda, bendere di Madura, buya untuk masyarakat Sumatera, topanrita atau anregurutta untuk masyarakat Sulawesi Selatan.<sup>189</sup> Menelusuri peristilahan ulama tersebut merupakan pemberian secara etnografis, akan tetapi jika ditelusuri terminologis dan kultur istilah kyai, ajengan, bendere, buya, topanrita atau anregurutta mempunyai makna yang sama dan kesemuanya merupakan panggilan lokal buat ulama setempat.

Menurut Horikoshi, posisi kyai merupakan mediator, *culture broker* atau pialang budaya dalam masyarakat dan ia merupakan kelompok elite agama diantara elit agama lain-

---

<sup>188</sup>Muchtar Husein, *Konsepsi Ulama Menurut al-Qur'an (Abstrak Disertasi)*, Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 1997, t.h.

<sup>189</sup>Imam Prayogo, *Kyai dan Politik: Membaca Citra Politik Kyai* (Malang: UIN Malang Press, 2007), h. 27.

nya seperti ulama, cendikiawan muslim, ustazd dan sejenisnya yang kurang populer dibandingkan dengan kyai.<sup>190</sup>

Bertitik tolak dari pengertian-pengertian tentang ulama, maka dapat disimpulkan bahwa ulama adalah seorang yang ahli dibidangnya baik bersifat *Kauniyyah* maupun *Quraniyyah* sebagai sarana pendekatan kepada Allah swt. dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari serta menyampaikannya untuk publik.

Namun peneliti pun, tetap membatasi bahwa berbicara secara pragmatis dan untuk kepentingan umat maka penunjukan ulama seyogyanya memberi pembatasan seperti orang yang ahli pada ilmu kedokteran maka masyarakat tidak akan menganggapnya sebagai ulama. Sebagaimana di Indonesia, istilah ulama yang paling dikenal dengan ulama adalah *fiqh minded*. Karena itu, ulama difokuskan pada orang-orang yang ahli pada nilai-nilai ajaran agama Allah swt. dan takut serta tunduk kepada-Nya.

## 2. Karakteristik Ulama

Setiap penunjukan sesuatu mengindikasikan mempunyai karakteristik atau ciri-ciri yang dimiliki sesuatu tersebut baik ia sebagai subjek maupun objek. Demikian halnya ulama mempunyai ciri khas tersendiri, apalagi ia sebagai "*idol*" yang tidak usang oleh waktu dan akan selalu "*terpakai*" sepanjang perjalanan manusia. Ulama akan selalu mendapatkan posisi tersendiri di tengah-tengah masyarakat.

Menurut Imam al-Gazali, kriteria ulama sebagai berikut:

- (a) Tidak menggunakan ilmunya untukmemburu kemegahan dunia
- (b) Seiring antara ucapan dan perbuatan

---

<sup>190</sup>*Ibid*, h. 29.

- (c) Memperdalam ilmu yang bermanfaat dan meng-hindari ilmu-ilmu yang kurang bermanfaat yang hanya menimbulkan perdebatan dan pertengkaran atau hanya sebagai bahan diskusi semata.
- (d) Tidak cend erung kepada kemewahan/kenikmatan dalam gaya hidupnya seperti kenikmatan dalam makanan, minuman, pakaian, rumah tangga, maupun kenikmatan
- (e) Menjaga jarak dengan penguasa dan tidak men-datangi mereka kecuali terpaksa
- (f) Tidak tergesa-gesa dalam memberikan fatwa tentang suatu masalah sampai ditemukannya suatu kejelasan hukum
- (g) Sangat konsen terhadap ilmu hati (kalbu), pengawasan hati dan makrifat.
- (h) Selalu mempertahankan keyakinan sehingga suatu keharusan untuk mengetahui ilmu yaqin.
- (i) Menunjukkan rasa tawadhu dengan bersikap sederhana dalam segala tingkah laku, sikap, tutur kata, diam dan bergerak, pakaian bahkan merasa hina di hadapan Allah dan menunjukkan rasa takutnya dalam segala tingkah laku.
- (j) Lebih banyak membicarakan ilmu amaliah, amalan dan yang bisa merusak amal, mengeruhkan hati, menimbulkan rasa was-was dan tindakan yang dapat menggerakkan kedalam kemugkaran
- (k) Kepercayaan terhadap ilmu berdasarkan pada pandangan hati, tidak berdasarkan *teks-book* dan tidak pula taklid-taklid orang lain.
- (l) Menjaga bahkan menjauh dari bid'ah<sup>191</sup>

---

<sup>191</sup>Lihat Imam al-Gazali, *Alamatul akl-Ulmail Akhirat* yang diterjemahkan oleh Fuad Kauma dengan judul *Ulama Akhirat* (Jakarta: CV. Pustaka Mantig, 1996), h. 23-131.

Sungguh tidak ringan tugas seorang ulama yang menghadapi permasalahan sangat kompleks, permasalahan umat berjalan mengiringi zaman ataupun zaman akan membentuk masalah yang kontraversi. Sehingga menuntut ulama mengikuti perkembangan zaman.

Kriteria ulama yang dipaparkan oleh al-Gazali sangat sempurna sebagai orang yang berkecimpung di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai dewan pengawas. Misalnya ulama sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) ketika menetapkan fatwa keharaman bunga sebagai riba maka minimal ia harus menabung di bank tanpa bunga. Kemudian persyaratan pendirian setiap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) harus mempunyai Dewan Pengawas Syariah (DPS), ulama yang mempunyai keilmuan syariah yang sempurna tidak boleh menjadikan peluang untuk memburu dunia dengan memilih Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang memberikan *salary* yang tinggi, memilih Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang besar atau tidak memberi sanksi kepada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang diawasi karena mempunyai *salary* yang tinggi. Akan tetapi ulama harus proaktif dalam mengawasi operasional Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sehingga perkembangannya dapat diterima secara lengkap oleh masyarakat.

Identifikasi Badruddin H. Subky, seorang ulama sekurang-kurangnya harus memiliki tujuh kriteria, yakni:

- (a) Menguasai ilmu agama (*tafaqqu al-Din*) dan dapat membimbing umat dengan memberikan bekal imu-ilmu keislaman yang bersumber dari al-Qur'an, hadis, ijma dan qiyas
- (b) Ikhlas dalam melaksanakan ajaran
- (c) Mampu menghidupkan sunnah Rasul dan mengembangkan Islam secara kaffah



- (d) Berakhlak luhur, berfikir kritis, aktif mendorong masyarakat melakukan perbuatan positif, bertanggung-jawab dan istiqamah
- (e) Berjiwa besar, kuat mental dan fisik, tahan uji, hidup sederhana, beribadah, berjamaah, tawadhu, kasih sayang terhadap sesama, *mahabbah* serta *khushyasyah* dan tawakkal kepada Allah swt.
- (f) Mengetahui dan peka terhadap situasi zaman serta mampu menjawab setiap persoalan untuk kepentingan Islam dan umatnya.
- (g) Berwawasan luas dan menguasai beberapa cabang ilmu demi pengembangannya
- (h) Menerima pendapat orang lain yang tidak bertentangan dengan Islam dan bersikap tawadhu<sup>192</sup>

Uraian diatas memberikan gambaran sosok yang sempurna sebagai sosok ulama yang ideal. Berkaitan dengan ulama di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), maka seorang ulama harus mempunyai ilmu pengetahuan yang luas, ulama harus seiring dengan fatwa yang dikeluarkannya dalam arti ketika bunga bank haram, seharusnya ulama bergabung dengan bank syariah atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), serta mengetahui sistem perbankan secara makro maupun mikro. Sebagaimana diketahui ke-universalan ulama sebagai figur pemberi solusi-solusi permasalahan umat merupakan hal penting dalam kelangsungan hidup dunia dan akhirat.

Namun kenyataanya ulama sendiri terjadi perbedaan pandangan terhadap keberadaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) atau perbankan syariah. Hal ini, bisa saja terjadi karena orientasi yang berbeda pada corak kehidupan ulama. Menurut Imam Prayogo bahwa ulama

---

<sup>192</sup>Badruddin H. Subkhy, *Dilema Ulama dalam Perubahan Zaman* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 47.

terdapat dua model yakni dalam produk sosialisasi dan adapula bentuk pilihan ulama. Kedua tipologi tersebut mempunyai arti dan konsekuensi yang berbeda. Tipologi yang dalam bentuk sosialisasi, jika ulama tersebut bersifat pasif sedangkan pilihan ulama lebih pada penentuan sikap karena memiliki kekuatan yang paling tepat bagi dirinya.<sup>193</sup> Sehingga perjalanan ulama mengantarkannya untuk menentukan suatu pilihan dimasa yang akan datang.

Menurut Muhammad Qasim Mathar dalam tulisannya *Ulama dan Kekerasan*, bahwa ulama terbagi atas tiga bagian dengan merujuk pada ayat al-Qur'an Qs Fathir (35):32

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ وَلَا الظَّالِمَاتُ وَلَا التَّوَرُّ

Terjemahnya:

"Kemudian Kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang Kami pilih di antara hamba-hamba Kami, lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri dan di antara mereka ada yang pertengahan dan di antara mereka ada (pula) yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar"<sup>194</sup>

Merujuk ayat diatas, Qasim Mathar menjelaskan bahwa pemegang pewaris kitab suci al-Qur'an tersebut terbagi dalam tiga bagian yakni: tipe menganiaya diri sendiri, tipe pertengahan (moderat) dan tipe kebaikan-nya amat banyak.<sup>195</sup>

<sup>193</sup> Imam Prayogo, *op. cit*, h. 266

<sup>194</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an ...op.cit*, h. 438

<sup>195</sup> Muhammad Qasim Mathar, "Jendela Langit: Ulama dan Kekerasan," *Fajar*, Selasa 10 April 2007, h. 4.

Senada yang diungkapkan dalam *Tafsir Ibn Katsir*, tipe-tipe tersebut: (1) Tipe menganiaya diri sendiri (*ulama dzhalim*),<sup>196</sup> orang mengerjakan sebagian perbuatan yang wajib (menurut hukum agama) dan juga tidak meninggalkan sebagian perbuatan terlarang, (2) Tipe pertengahan (moderat/*ulama muqtasid*), orang-orang yang melaksanakan segala kewajiban agamanya, dan meninggalkan larangannya, tetapi kadang ia tidak mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dipandang sunah atau masih mengerjakan sebagian pekerjaan yang dipandang makruh, dan (3) Tipe kebbaikannya amat banyak (*ulama sabiqun bil khairat*), orang yang selalu mengerjakan amalan wajib dan sunat, meninggalkan segala perbuatan yang haram dan makruh serta sebagian hal-hal yang mubah (dibolehkan)<sup>197</sup>

Tipe-tipe tersebut diatas dapat pula mengantarkan untuk mengidentifikasi ulama-ulama telah jelas berbeda dilihat sudut pandangan dan sikap yang ditampilkan sebagai elite agama di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Ulama pun mempunyai pilihan-pilihan sendiri dalam mengaplikasikan ilmu yang didapatkannya dengan konsentrasi pada perbankan atau ekonomi Islam.

Ketika fatwa dianggap sebagai keputusan tertinggi dalam wilayah keagamaan, maka fatwa tersebut berlaku seperti kebijakan atau perundang-undangan pemerintah. Sehingga sikap ulama teridentifikasi adanya ulama bergabung dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

---

<sup>196</sup>Ulama *Dzhalim* juga dikenal istilah ulama *Su'*. Oleh Imam al-Gazali ulama *Su'* adalah ulama yang tingkah lakunya sangat buruk. Namun hemat penulis, orang yang bertingkah laku seperti itu tidak dikategorikan sebagai ulama karena sangat jauh dari kriteria sebagai seorang ulama.

<sup>197</sup>H. Salim Bahresy dan Said Bahresy, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid: VI (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1990), h. 172.

/bank syariah tapi tetap pula di bank konvensional dan ada pula ulama langsung mentransfer diri ke Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)/bank syariah.

### 3. Posisi Ulama dalam BPRS

Ulama mempunyai posisi strategi di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), karena secara structural setiap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) harus mempunyai Dewan Pengawas Syariah (DPS). Sementara pihak yang duduk dalam Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah orang yang mempunyai pemahaman tentang syariah secara sempurna khususnya mengenai perbankan syariah/muamalah. Apalagi Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan bentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) yang berada di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Majelis Ulama Indonesia (MUI) sendiri merupakan lembaga perkumpulan seluruh ulama di Indonesia yang mempunyai tugas-tugas tersendiri.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan pihak yang ditempatkan pada posisi setingkat dengan Dewan Komisaris pada setiap bank. Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) ditetapkan oleh Rapat Pemegang Saham dari calon yang telah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN).<sup>198</sup> Namun perjalanannya, bahwa setiap anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) tidak mensyaratkan harus dari kalangan ulama yang selama ini berlangsung, akan tetapi setiap rang yang mempunyai keilmuan yang sempurna.

Tingkat nasional, terdapat Dewan Syariah Nasional (DSN) yang didirikan pada tahun 1998 yang kemudian

---

<sup>198</sup>Najamuddin, "Aplikasi Musyarakah dan Mudharabah Dalam Perbankan Syariah." [www.badilag.net/data/Artikel/Ekonomi](http://www.badilag.net/data/Artikel/Ekonomi), Akses 27 Mei 2008, h. 28.

dikukuhkan oleh SK Dewan Pimpinan MUI No. Kep-754/MUI/II/1999 tertanggal 10 Pebruari 1999 yang merupakan lembaga otonom di bawah majelis Ulama Indonesia yang ketua dan sekertaris umumnya secara *ex officio* dijabat oleh ketua dan sekertaris MUI.<sup>199</sup>

Lembaga Dewan Syariah Nasional (DSN) tidak bertugas seperti Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), tetapi dibentuk untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas LKS seperti rekasadana syariah, modal ventura, asuransi syariah. Sebagaimana dalam Keputusan DSN No. 01 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan MUI bahwa: "Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah"<sup>200</sup>

Dewan Syariah Nasional (DSN) juga yang merekomendir para ulama yang akan ditugaskan menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS). Anggota Dewan Syariah Nasional (DSN) terdiri dari para ulama, praktisi dan pakar dalam bidang-bidang yang terkait dengan perekonomian syariah, yang ditunjuk dan diangkat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan masa bakti empat tahun<sup>201</sup>

Keberadaan Dewan Syariah Nasional majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) belum diatur secara khusus dalam sebuah undang-undang, namun dasar hukum yang meng-

---

<sup>199</sup>Abu Zaky, Peran DSN, [www.pa-kendal.net](http://www.pa-kendal.net), Akses 27 Mei 2008.

<sup>200</sup> "Keputusan DSN No 01 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan MUI" dalam DSN MUI dan BI, *Himpunan Fatwa DSN* (ed. ke-2, Jakarta: Pt Intemesa, 2003), h 281.

<sup>201</sup>Zainul Arifin, "Dewan Pengawas Syariah," [wordpress.com](http://wordpress.com), Akses 27 Mei 2008.

ikat bagi Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah Peraturan Bank Indonesia No 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah dalam peraturan ini juga hanya dijelaskan mengenai keberadaan Dewan Syariah Nasional (DSN) di lembaga keuangan.

Berbeda Dewan Syariah Nasional (DSN), Dewan Pengawas Syariah (DPS) diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang mengakomodasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai lembaga pengawas syariah terhadap bank yang menerapkan prinsip syariah karena Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai lembaga pengawas syariah yang bertugas mengawasi operasional dan praktik lembaga keuangan syariah agar tetap konsisten dan berpegang teguh pada prinsip syariah. Walaupun diketahui bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan bentuk-an Dewan Syariah Nasional (DSN) untuk lebih meng-efektifkan perannya di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) atau bank syariah.

#### 4. Tugas Ulama dalam BPRS

Menilik kriteria-kriteria ulama yang sangat ideal, maka akan ternilai dalam bukti nyata aplikasi mengemban tugasnya sebagai pencerah dalam kehidupan masyarakat. Tugas yang diemban ulama telah mendapat apresiasi dari Rasulullah saw. dengan memberikan predikat tertinggi pada ulama sebagaimana sabdanya:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسْرَهَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ رَجَاءَ  
 بْنِ حَيَّوَةَ يُحَدِّثُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ جَمِيلٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا  
 مَعَ أَبِي الدَّرْدَاءِ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ إِنِّي

جِئْتُكَ مِنْ مَدِينَةِ الرَّسُولِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَدِيثٍ بَلَغَنِي أَنَّكَ  
تُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا جِئْتُ لِحَاجَةٍ قَالَ فَإِنِّي  
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ  
عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا  
رِضًا لَطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالَمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي  
الْأَرْضِ وَالْجِبْتَانِ فِي حَوْفِ الْمَاءِ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ  
الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ  
الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَامًا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ وَافِرٌ<sup>202</sup>

Artinya:

“Musaddad Ibn Musarhad menyampaikan kepada kami dari Abdullan ibn Daud, saya telah mendengar ‘Ashim ibn Jara’ Ibn Haiwa yang telah menyampaikan dari Daud Ibn Jamil. Dari Katsir Ibn Qasim berkata bahwasanya saya duduk bersama dengan Abi Darda di masjid Dimasq, maka datang seorang laki-laki dan berkata hai Abu Darda’ saya ini datang kepadamu dari

---

<sup>202</sup>Hadis ini termasuk hadis populer, namun beberapa ulama hadis melemahkan hadis ini disebabkan karena kekacauan dan kesimpangsiuran para perawinya, oleh Hasan al-Kinany menanggapinya termasuk hadis *hasani*. Berbeda dengan al-Hakim memandang sebagai hadis *Shahih*. Dan hadis ini dapat ditemukan di *Fath al-Bary* kitab Ibnu Hajar al-Asqalani, kitab Abu Daud, al-Turmudzi, dan Ibnu Hibban. Dalam kitab *Shahih Bukhari* oleh Imam Bukhari tetap menulis dalam kitabnya tapi tidak mengungkapkan bahwa ungkapan itu adalah hadis Nabi Muhammad saw. Lihat Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibn Mughlurah Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 1 (utp.: Daar al-Fikr, 1401H/1981M), h. 25 atau Mustafa Muhammad Imarah, *Terjemahan Jucakhirul Bukhari* (Semarang: Darul Ihya Indonesia, 1994) h. 48-50 dan Muhammad Quraish Shihab, *op.cit.*, h. 378.

kota Rasulullah untuk menyampaikan apa yang telah disampaikan Rasulullah. Rasulullah saw. bersabda: barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu Allah akan menuntunya ke jalan surga dan sesungguhnya para malaikat akan mengepakkan sayapnya karena ridhohnya pada orang yang menuntut ilmu. Dan sesungguhnya orang yang berilmu dimohon ampunan oleh malaikat segala apa yang ada di langit dan di bumi dan apa yang dikedalaman air dan sesungguhnya kelebihan orang yang berilmu daripada ahli ibadah adalah seperti kelebihan bulan di malam hari terhadap semua bintang-bintang dan sesungguhnya ulama adalah pewaris nabi dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham dan mewariskan ilmu. Maka barangsiapa mengambilnya akan dicukupkan" (H.R. Bukhari)

Karena itu, ulama seyogyanya memberikan contoh teladan dalam berperilaku dan tindakan memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi umat sebagaimana tindakan Rasulullah saw. menjawab problema yang di alami oleh umatnya dahulu. Hadis tersebut tidak mengindikasikan kepada Nabi Muhammad saw. saja tapi pewaris dari seluruh Nabi.

Dalam bertingkah laku, umat Islam menjadikan al-Qur'an dan hadis sebagai *the way of life*, sebagai cara hidup tidak hanya sebatas *how to life together* sebagai bagaimana cara hidup. Maka diperlukan ulama untuk menjelaskan isi konsep sumber ajaran Islam tersebut, untuk menggantikan Nabiullah Muhammad saw. yang terlebih dahulu memberikan amanah sebagai pewaris "tahta".

Menurut Muhammad Quraish Shihab, ada empat tugas utama yang harus dijalankan oleh ulama sesuai



dengan tugas kenabian dalam mengembangkan kitab suci,<sup>203</sup> dengan menggunakan “selempang” pewaris para Nabi, yakni:

- a) Menyampaikan (*tabligh*) ajaran-ajaran-Nya, sesuai dengan perintah. Sebagaimana dalam QS. al-Maidah (5): 67

يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ...

Terjemahnya:

“Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu..”<sup>204</sup>

- b) Menjelaskan ajaran-ajaran-Nya berdasarkan ayat. Sebagaimana QS an-Nahl (16): 44

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan Kami turunkan kepadamu al-Qur’an, agar kamu menjelaskan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka supaya mereka memikirkan”<sup>205</sup>

- c) Memutuskan perkara atau problema yang dihadapi masyarakat berdasarkan ayat. Sebagaimana QS.al-Baqarah (2): 213

وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ

Terjemahnya:

<sup>203</sup> Muhammad Quraish Shihab, *op.cit.*, h. 385.

<sup>204</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an...op.cit.*, h. 120.

<sup>205</sup> *Ibid*, h. 273.

“Dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab dengan benar, untuk memberi keputusan diantara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan”<sup>206</sup>

- d) Memberikan contoh pengamalan, sesuai dengan hadis Aisyah, yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang menyatakan bahwa perilaku Nabi adalah praktek dari al-Qur'an.

Sejalan dengan tugas ulama untuk menyampaikan dan menjelaskan ajaran agamanya, ulama sendiri telah menjadi bagian dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)/bank syariah sebagai pencetus dan sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS). Ulama yang tugasnya demikian kompleksnya, ia harus selalu menyampaikan segala yang tersurat dan tersirat dalam al-Qur'an sebagai suatu kewajiban, tanpa harus menunggu dipanggil oleh umat untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran dalam al-Qur'an.

Selain penyampai, ulama harus memutuskan perkara atau problem yang dihadapi masyarakat berdasarkan al-Qur'an dan Hadis. Misalnya problema masyarakat dalam menentukan sikap terhadap bunga bank. Karena itu ulama harus menentukan sikap terlebih dahulu dengan mengeluarkan fatwa tentang bunga sebagaimana dalam keputusan fatwa MUI No 1 tahun 2004 Tentang Bunga (*Intersat/fa'idah*)<sup>207</sup> dan fatwa-fatwa MUI yang telah dibukukan dalam Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang diterbitkan kerjasama dengan BI (umara) Setelah berfatwa, tugas ulama adalah memberi contoh kepada masyarakat. Artinya ulama harus menjauhi bunga dengan cara men-

---

<sup>206</sup> *Ibid*, h. 34.

<sup>207</sup> Keputusan Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (*Intersat/Fa'idah*), [www.mui.or.id/mui\\_in/fatwa](http://www.mui.or.id/mui_in/fatwa), Akses 9 Mei 2008.

tranfer diri dari bank yang menganut sistem bunga menuju bank yang bersistem tanpa bunga (syariah).

Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga bertugas sebagai dewan pengawas yakni dewan yang melaksanakan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dalam kegiatannya Dewan Pengawas Syariah (DPS) wajib bagi setiap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan berkedudukan di kantor pusat yang memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan.<sup>208</sup> Artinya orang yang diangkat sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus memiliki pengetahuan syariah dan perbankan/keuangan secara umum.

Dalam PBI No. 6/17PBI/2004 Tentang BPRS Berdasarkan Prinsip Syariah pasal 29 disebutkan tugas, wewenang dan tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) antara lain, meliputi:

- (1) memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Bank Pembiayaan Syariah (BPRS) terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN)
- (2) menyampaikan laporan hasil hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap enam bulan kepada direksi, komisaris, Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Bank Indonesia
- (3) menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank Pembiayaan Syariah (BPRS)
- (4) memberikan opini dari aspek terhadap pelaksanaan operasional Bank Pembiayaan Syariah (BPRS) secara keseluruhan dalam laporan publikasi Bank Pembiayaan Syariah (BPRS)

---

<sup>208</sup> Bank Indonesia, *PBI No 6,....op.cit.*

- (5) mengkaji produk dan jasa baru yang akan dikeluarkan oleh Bank Pembiayaan Syariah (BPRS) untuk dimintakan fatwa kepada Dewan Syariah Nasional (DSN)
- (6) bila perlu dapat meminta dokumen dan penjelasan langsung dari satuan kerja Bank Pembiayaan Syariah (BPRS) serta ikut dalam pembahasan intern termasuk dalam pembahasan komite pembiayaan<sup>209</sup>

Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada bank dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada Pengawasan syariah dan tata cara Pelaporan Hasil Pengawasan Syariah bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang telah ditetapkan oleh peraturan Bank Indonesia.<sup>210</sup>

Karena itu, ulama-ulama di Sulawesi Selatan yang ditunjuk sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus menjalankan tugasnya dan melakukan sosialisasi Bank Pembiayaan Syariah (BPRS), agar memudahkan, melancarkan, memberikan ketetapan hukum terhadap berjalannya suatu Bank Pembiayaan Syariah (BPRS) sesuai syariah sehingga memberikan ketentraman dan kepuasan bagi pengguna/nasabah bank akan kesyariaannya.

## 5. Kedudukan Fatwa Ulama dalam Pengembangan BPRS

Perjalanan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tidak terlepas dari suara para ulama dalam bentuk fatwa yang kemudian terdapatnya posisi dewan pengawas syariah di setiap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Namun yang sangat menyita perhatian pada wacana perbankan syariah adalah masalah berbagainya pendapat mengenai landasan awal untuk beroperasinya bank syariah yakni posisi bunga bank termasuk riba sehingga diperlukan

---

<sup>209</sup> *Ibid*

<sup>210</sup> Bank Indonesia, "Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/19/DPbs Jakarta 24 Agustus 2006" [www.bi.go.id/NR](http://www.bi.go.id/NR), Akses 27 Mei 2008.

pendirian bank yang berprinsip syariah. Fatwa ulama pun beraneka ragam.

Ijtimia Komisi Fatwa MUI yang diselenggarakan pada tanggal 16 November 2003 mengeluarkan fatwa bahwa bunga bank adalah riba dan riba hukumnya haram. Fatwa tersebut memiliki peran strategi sebagai salah satu instrumen bagi penciptaan iklim yang kondusif mengingat perbankan syariah nasional masih merupakan industri baru yang sedang berada dalam masa pertumbuhan, maka iklim yang kondusif merupakan syarat bagi pengembangnya.

Selanjutnya, ulama khususnya yang berkecimpung di Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan fatwa mengiringi perjalanan perkembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan terdapatnya beberapa fatwa produk sebagai pedoman operasional, yakni:

- Fatwa tentang Giro No. 01/DSN-MUI/IV/2000
- Fatwa tentang Tabungan No. 02/DSN-MUI/IV/2000
- Fatwa tentang Deposito No. 03/DSN-MUI/IV/2000
- Fatwa tentang Murabahah No. 04/DSN-MUI/IV/2000
- Fatwa tentang Jual Beli Saham No. 05/DSN-MUI/IV/2000
- Fatwa tentang Jual Beli Istishna No. 06/DSN-MUI/IV/2000
- Fatwa tentang Pembiayaan Mudharabah No. 07/DSN-MUI/IV/2000
- Fatwa tentang Pembiayaan Musyarakah No. 08/DSN-MUI/IV/2000
- Fatwa tentang Pembiayaan Ijarah No. 09/DSN-MUI/IV/2000
- Fatwa tentang Wakalah No. 10/DSN-MUI/IV/2000
- Fatwa tentang Kafalah No. 11/DSN-MUI/IV/2000
- Fatwa tentang Hawalah No. 12/DSN-MUI/IV/2000

- Fatwa tentang Uang Muka dalam Murabahah No. 13/DSN-MUI/IV/2000
- Fatwa tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam LKS No. 14/DSN-MUI/IX/2000
- Fatwa tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam LKS No. 15/DSN-MUI/IX/2000
- Fatwa tentang Diskon dalam Murabahah No. 16/DSN-MUI/IX/2000
- Fatwa tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda Pembayaran No. 17/DSN-MUI/IX/2000
- Fatwa tentang Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif Daam LKS No. 18/DSN-MUI/IX/2000
- Fatwa tentang Al-Qardh No. 19/DSN-MUI/IX/2000
- Fatwa tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah No. 20/DSN-MUI/IX/2000
- Fatwa tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah No. 21/DSN-MUI/IX/2001
- Fatwa tentang Jual Beli Istishna Paralel No. 22/DSN-MUI/III/2002
- Fatwa tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabahah No. 23/DSN-MUI/III/2002
- Fatwa tentang Safe Deposit Box No. 24/DSN-MUI/III/2002
- Fatwa tentang Rahn No. 25/DSN-MUI/III/2002
- Fatwa tentang Rahn Emas No.26 /DSN-MUI/III/2002
- Fatwa tentang Al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik No. 27/DSN-MUI/III/2002
- Fatwa tentang Jual Beli Mata Uang (al-Sharf) No 28/DSN-MUI/III/2002
- Fatwa tentang Pembiayaan Pengurusan Haji LKS No. 29/DSN-MUI/VI/2002
- Fatwa tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah No. 30/DSN-MUI/VI/2002

- Fatwa tentang Pengalihan Hutang No. 31/DSN-MUI/VI/2002
- Fatwa tentang Obligasi Syariah No. 32/DSN-MUI/VI/2002
- Fatwa tentang Obligasi Syariah Mudharabah No. 33/DSN-MUI/IX/2002
- Fatwa tentang LC Impor Syariah No. 34/DSN-MUI/IX/2002
- Fatwa tentang LC Ekspor Syariah No. 35/DSN-MUI/IX/2002
- Fatwa tentang Sertifikat Wadiah BI No. 36/DSN-MUI/IX/2002
- Fatwa tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah No. 37/DSN-MUI/IX/2002
- Fatwa tentang Sertifikat IMA No. 38/DSN-MUI/IX/2002
- Fatwa tentang Asuransi Haji No. 39/DSN-MUI/IX/2002
- Fatwa tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal No. 40/DSN-MUI/IX/2003<sup>211</sup>

Fatwa-fatwa tersebut menjadi pedoman bagi praktisi perbankan sebagai acuan beroperasinya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) secara khusus dan perbankan syariah secara umum. Kedudukan fatwa tersebut wajib diterapkan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) setara dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Munculnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) patut dihargai sebagai apresiasi ulama terhadap perbankan

---

<sup>211</sup>Himpunan fatwa merupakan pedoman bagi seluruh lembaga keuangan syariah yang telah dikeluarkan oleh DSN MUI. Lihat Tim Penulis DSN MUI, *Himpunan Fatwa DSN* (Jakarta: PT Intermedia, 2003), h. 1-263

syariah dan upaya akselerasi pengembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sehingga dengan berpedoman pada fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menambah kepercayaan umat terhadap kesyariahan operasional Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Kelengkapan pedoman operasional Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (fatwa ulama dan aturan umara) mempertegas eksistensi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), namun keputusan tetap ditangan strategi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merambah pasar perbankan dan kaputusan nasabah untuk memilih penggunaan layanan jasa perbankan yang berprinsip syariah atau konvensional.

Realisasi kebijakan pengembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) memang tidak dapat secara sempurna diberlakukan dalam waktu yang singkat. Karena itu, dibutuhkan seluruh pihak untuk berkontribusi dalam proses akselesari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).



*Bagian 5***KEBERADAAN DAN PERKEMBANGAN  
BPRS DI SULAWESI SELATAN****A. Perkembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah  
(BPRS) di Sulawesi Selatan**

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) terus berkembang di Indonesia, hal tersebut mendorong semakin banyaknya masyarakat yang menyadari pentingnya ekonomi berbasis syariah, berbagai lembaga konvensional berlomba-lomba membuka unit atau cabang syariah. Tujuannya agar dapat memberikan pelayanan keuangan syariah bagi masyarakat. Karena itu, pengembangan lembaga keuangan mikro dewasa ini merupakan topik yang hangat dibicarakan, karena keberadaanya sangat dibutuhkan, terutama Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Demikian halnya di kawasan Indonesia Timur seperti Sulawesi Selatan salah satu kota yang patut diperhitungkan di kancah nasional dari sudut politik, budaya, sosial, serta ekonomi, serta berbagai potensi yang dimilikinya untuk mengembangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sebagai pintu kawasan Indonesia Timur, Sulawesi Selatan telah berkembang dengan pesat khususnya lembaga keuangan baik konvensional maupun konsep syariah dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Misalnya bank umum syariah di Indonesia terdapat 3 unit yakni Bank Mandiri Syariah, Bank Muamalat dan Bank Mega Syariah, kesemuanya telah beroperasi di Sulawesi Selatan. Khusus Bank Mega Syariah yang baru

lauching April 2008 ini pertanda bahwa terdapat *market share* yang signifikan di Sulawesi Selatan. *Market share* Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) didukung dengan potensi yang dimiliki oleh Sulawesi Selatan, antara lain:

1. Penduduk Mayoritas Beragama Islam

Penduduk Sulawesi Selatan yang mayoritas beragama Islam ( $\pm 80\%$ ), merupakan salah satu faktor yang memberikan potensi cukup signifikan terhadap pertumbuhan pengembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Pertumbuhan penduduk di Sulawesi selatan sejak tahun 2006-2010 meningkat yaitu 7.060.127 pada tahun 2006 menjadi 7.629.138 jiwa untuk tahun 2010<sup>212</sup> atau meningkat 3,12% atau rata-rata 1,56% pertahun. Peningkatan jumlah penduduk berdasarkan hasil Survey Sosial dan Ekonomi Nasional (SUSENA) dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 4. Jumlah Penduduk Sulawesi Selatan, tahun 2006 - 2010

NO	Tahun	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan %
1	2006	7.060.129	0
2	2007	7.280.351	3,12
3	2008	7.379.370	1,36
4	2009	7.494.701	1,56
5	2010	7.629.138	1,79

Sumber: Data BPS diolah 2010

---

<sup>212</sup>Badan Pusat Statistik, *Sulawesi Selatan dalam Angka 2007* (Makassar: BPS, 2007), h 38.

Peningkatan kuantitas penduduk yang pesat bukan berarti bahwa bank syariah dikhususkan untuk muslim saja akan tetapi seluruh umat manusia.

## 2. Meningkatkan Semangat Keberagamaan Masyarakat.

Semangat keberagamaan masyarakat Sulawesi Selatan terus "meningkat". Hal ini terlihat beberapa kecenderungan setiap kabupaten memunculkan nilai-nilai agama yang terwujud dalam peraturan-peraturan daerah, berkembangnya lembaga-lembaga bernuansa keagamaan, bahkan besarnya hambatan penegakan syariat Islam<sup>213</sup> dengan berdirinya Komite Penegakan Syariat Islam. Perkembangan penerapan ajaran agama di masyarakat termasuk perubahan pola pemikiran mengenai lembaga keuangan dari bunga ke bagi hasil, atau dari konvensional ke perbankan syariah.

## 3. Sumber Daya Ekonomi yang Potensial.

Sumber daya ekonomi yang potensial sangat cocok dengan produk-produk perbankan syariah. Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari lahan

---

<sup>213</sup>Dalam sejarah pergumulan politik, hambatan penerapan hukum Islam setidaknya lima level yakni: *Level pertama*, penerapan masalah-masalah hukum keluarga, seperti perkawinan, perceraian, dan kewarisan; *Level kedua*, urusan-urusan ekonomi dan keuangan, seperti perbankan Islam dan zakat, *Level Ketiga* praktek-praktek keagamaan seperti mengenakan jilbab bagi wanita muslimah; *Level Keempat*, penerapan hukum pidana Islam terutama bertalian dengan jenis-jenis sanksi yang dijatuhkan bagi pelanggar, & *Level kelima*, penggunaan Islam sebagai dasar negara dan sistem pemerintahan. Lihat Rumadi, "Perda Syariat Islam: Jalan Lain Menuju Negara Islam?," *Tashwir*, Edisi No. 20, (Jakarta: LAKPESDAM Nahdatul Ulama, 2006), h.5-6 & lihat pula Khamami Zada, "Perda Syariat: Proyeksi Syariatisasi yang Sedang Berlangsung," *Riset Redaksi*, Edisi No. 20 (Jakarta: LAKPESDAM Nahdatul Ulama, 2006), h. 17-18.

pertanian, tambak, perikanan, perkebunan sangat cocok dengan produk *Muzaraah* dan *Musaqah* dapat diterapkan di wilayah seperti Sidrap yang terkenal pertaniannya, Luwu terkenal dengan perkebunan kakao, Barru dan Bone dikenal dengan tambaknya. Produk *Mudarabah*, *Musyarakah* dapat pula diterapkan didunia bisnis/perdagangan yang juga menyerap tenaga kerja cukup besar, seiring dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja

4. Kebutuhan masyarakat akan lembaga keuangan yang bernuansa Islam

Dari beberapa potensi-potensi yang dimiliki Sulawesi Selatan maka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, keberadaan perbankan syariah yakni bank umum syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang melayani UMKM. Ber-dasarkan kebijakan dan ketentuan, maka secara kuantitas Bank Perkreditan Rakyat (BPR)/Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Sulawesi Selatan mengalami perkembangan signifikan seperti Tabel berikut:

Tabel 5. Perbandingan Jumlah BPR dan BPRS di Sulawesi Selatan

No	Kelembagaan	Tahun 2009	April 2010
1	BPR	20	22
2	BPRS	6	6
Jumlah		26	28

Sumber: Data Bank Indonesia Makassar diolah 2010

Tabel di atas memberikan gambaran bahwa perkembangan jumlah total Bank Perkreditan rakyat (BPR) maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang beroperasi di Sulawesi Selatan hingga 2010. Untuk Bank Perkreditan rakyat (BPR) mengalami peningkatan

10% dari total Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di tahun 2009 yakni dari jumlah 20 menjadi 22 unit Bank Perkreditan rakyat (BPR) pada tahun 2010. Sedangkan untuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) secara kuantitas mengalami stagnasi karena jumlahnya tetap dari tahun 2009 ke 2010 tetap berjumlah 6 (enam) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Selanjutnya perkembangan BPRS dilihat asetnya mengalami peningkatan. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai lembaga intermediasi melalui kegiatan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) pada tahun 2009 dan 2010 mengalami peningkatan jumlah tabungan 6% dari Rp. 50,994 milyar menjadi Rp. 53.865 milyar. Sedangkan untuk Deposito juga meningkat dari jumlah Rp 73.426 milyar menjadi Rp 96.841 milyar atau pertumbuhan mencapai 32%. Dengan total pertumbuhan 17,88% dari Rp 124.420 milyar untuk 2009 menjadi Rp 150.706 milyar untuk 2010. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Sulawesi Selatan (Juta Rp) untuk jelasnya lihat pada Tabel berikut:

Tabel 6. Penghimpunan DPK oleh BPRS 2009-2010

No	Jenis Penghimpunan Dana	Tahun	
		2009	2010
1	Tabungan	50.994	53.865
2	Deposito	73.426	96.841
Total		124.420	150.706

Sumber: Bank Indonesia Makassar diolah 2010

Meningkatnya aset Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) pertanda positif bagi perkembangannya kedepan karena telah mendapat respon dari masyarakat. Produktifnya dana yang dihimpun oleh

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) diperlukan penyaluran dana ke masyarakat. Untuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Sulawesi Selatan penyaluran dana terjadi peningkatan ini pertanda bahwa masyarakat membutuhkan dana investasi untuk berusaha dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif dan produktif. Data BPS, diketahui bahwa pertumbuhan pinjaman yang diberikan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) secara tahunan mengalami peningkatan signifikan. Hal ini terlihat penyaluran di tahun 2009 mencapai Rp 269.342 milyar menjadi Rp 348.418 milyar di tahun 2010 atau meningkat sebesar 29,35%.

Perkembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Sulawesi Selatan tumbuh tidak secara instant, akan tetapi melewati berbagai kendala-kendala misalnya menjamurnya lembaga keuangan, sumber daya insani mengenai syariah belum memadai, belum optimalnya pembiayaan ke masyarakat menengah ke bawah, serta kurang dukungannya dari beberapa pihak.

Selain itu, umumnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang telah beroperasi telah mengalami perubahan nama bahkan terjadi akuisisi pemegang saham dan kepengurusan hingga beberapa kali. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang beroperasi di Sulawesi Selatan tersebut yakni:

1. PT BPRS Niaga Madani yang didirikan 1 September 1993 di Kab. Pinrang dengan nama PT BPRS Sinar Mentari yang merupakan wujud komitmen tokoh Muhammadiyah untuk kegiatan perekonomian dan perbankan. PT BPRS Sinar Mentari yang berlokasi di Pinrang di tahun 1994 berganti nama menjadi PT BPRS Fastabiqul Khairat dan pindah lokasi di

Makassar di tahun 2001 kemudian di tahun 2002 berganti nama menjadi PT BPRS menjadi PT BPRS Niaga Madani.<sup>214</sup>

2. PT BPRS Indo Timur yang beroperasi 2004 dulunya bernama PT BPRS Ikhwanul Ummah. BPRS tersebut berdiri atas prakarsa beberapa tokoh agama di Kota Makassar bekerjasama dengan beberapa orang yang memiliki komitmen kuat untuk menjalankan ekonomi perbankan bersistem syariah dengan Dewan Komisaris H. Haruna dan Direksi dimotori oleh Muh Ardiansyah Adnan serta DPS oleh KH. KHasan Tahir<sup>215</sup>
3. PT BPRS Dana Moneter dulunya PT BPRS Matahari Ufuk Timur yang beroperasi 16 Agustus 1994 berlokasi di Maros kemudian terjadi akuisisi 2003 yang berlokasi di Makassar<sup>216</sup> bahkan terjadi beberapa kali perubahan akta. Perubahan akta pendirian karena terjadinya perubahan pengurus dan peningkatan modal disetor.

BPRS yang dimotori oleh Hj. Melinda Aksa, telah menunjukkan arah yang lebih baik tergambar pada laporan keuangan tahunan 2009-2010. Pada laporan tahunan tersebut, perkembangan kinerja perusahaan antara tahun 2009 menyebutkan aktiva perusahaan Rp 4.585.660 (Rp 000,-) meningkat menjadi Rp 5.467.244 (Rp 000,-) pada tahun 2010. Pada laporan keuangan tahunan<sup>217</sup>

---

<sup>214</sup> PT. BPRS Niaga Madani, Makassar, 2008.

<sup>215</sup> PT. BPRS Indo Timur, Makassar, 2008.

<sup>216</sup> PT. BPRS Dana Moneter, *Laporan Keuangan Tahunan 2006*. Makassar, 2008

<sup>217</sup> PT. BPRS Dana Moneter, *Laporan Keuangan Tahunan 2007*. Makassar, 2008

4. PT BPRS Gowata yang didirikan pada tanggal 29 Maret 1996 dengan Dewan Komisaris oleh H. Mallinkai Maknun dan H. Syamsul Rijal. Walaupun berjalan tanpa direksi, BPRS tersebut telah beroperasi hingga sekarang dengan dibawah pengawasan syariah M. Yasin Lompo dan H. Amirullah.<sup>218</sup>
5. PT BPRS Surya Sejati di Takalar
6. PT BPRS Al-Ittihad didirikan tahun 2002 dulunya berstatus BMT al-Ittihad. BPRS tersebut sekarang secara operasional dipimpin oleh Ambo rappe dengan direktur utama oleh Ramli Dullah. BPRS yang berlokasi di Pasar Sentral Sengkang telah mengalami peningkatan, dalam annual report jumlah total *funding* per Desember 2010 Rp 889.245 (dalam ribuan) dari Rp 829.035 (dalam ribuan) pada tahun 2009.<sup>219</sup> Secara kelembagaan BPRS Al-Ittihad tidak terdapat penambahan kantor.

Ke enam Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) telah beroperasi dengan lokasi yang kesemuanya sangat strategis sehingga keberadaannya ditengah masyarakat sebagai sebuah lembaga keuangan mikro dapat memberikan solusi ekonomi dengan system syariah.

## **B. Keberadaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Sulawesi Selatan**

Keberlangsungan lembaga keuangan dapat terlihat dengan adanya sambutan positif dari beberapa pihak khususnya masyarakat yang sangat membutuhkan fasilitas perbankan. Keberadaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

---

<sup>218</sup>PT. BPRS Gowata, *Susunan Organisasi* 2007. Gowa, 2008

<sup>219</sup>PT. BPRS Al-Ittihad, *Struktur Organisasi* 2008, Wajo, 2008.



Makassar di tahun 2001 kemudian di tahun 2002 berganti nama menjadi PT BPRS menjadi PT BPRS Niaga Madani.<sup>214</sup>

2. PT BPRS Indo Timur yang beroperasi 2004 dulunya bernama PT BPRS Ikhwanul Ummah. BPRS tersebut berdiri atas prakarsa beberapa tokoh agama di Kota Makassar bekerjasama dengan beberapa orang yang memiliki komitmen kuat untuk menjalankan ekonomi perbankan bersistem syariah dengan Dewan Komisaris H. Haruna dan Direksi dimotori oleh Muh Ardiansyah Adnan serta DPS oleh KH. KHasan Tahir<sup>215</sup>
3. PT BPRS Dana Moneter dulunya PT BPRS Matahari Ufuk Timur yang beroperasi 16 Agustus 1994 berlokasi di Maros kemudian terjadi akuisisi 2003 yang berlokasi di Makassar<sup>216</sup> bahkan terjadi beberapa kali perubahan akta. Perubahan akta pendirian karena terjadinya perubahan pengurus dan peningkatan modal disetor.

BPRS yang dimotori oleh Hj. Melinda Aksa, telah menunjukkan arah yang lebih baik tergambar pada laporan keuangan tahunan 2009-2010. Pada laporan tahunan tersebut, perkembangan kinerja perusahaan antara tahun 2009 menyebutkan aktiva perusahaan Rp 4.585.660 (Rp 000,-) meningkat menjadi Rp 5.467.244 (Rp 000,-) pada tahun 2010. Pada laporan keuangan tahunan<sup>217</sup>

---

<sup>214</sup> PT. BPRS Niaga Madani, Makassar, 2008.

<sup>215</sup> PT. BPRS Indo Timur, Makassar, 2008.

<sup>216</sup> PT. BPRS Dana Moneter, *Laporan Keuangan Tahunan 2006*. Makassar, 2008

<sup>217</sup> PT. BPRS Dana Moneter, *Laporan Keuangan Tahunan 2007*. Makassar, 2008

pertanian, tambak, perikanan, perkebunan sangat cocok dengan produk *Muzaraah* dan *Musaqah* dapat diterapkan di wilayah seperti Sidrap yang terkenal pertaniannya, Luwu terkenal dengan perkebunan kakao, Barru dan Bone dikenal dengan tambaknya. Produk *Mudarabah*, *Musyarakah* dapat pula diterapkan didunia bisnis/perdagangan yang juga menyerap tenaga kerja cukup besar, seiring dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja

4. Kebutuhan masyarakat akan lembaga keuangan yang bernuansa Islam

Dari beberapa potensi-potensi yang dimiliki Sulawesi Selatan maka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, keberadaan perbankan syariah yakni bank umum syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang melayani UMKM. Ber-dasarkan kebijakan dan ketentuan, maka secara kuantitas Bank Perkreditan Rakyat (BPR)/Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Sulawesi Selatan mengalami perkembangan signifikan seperti Tabel berikut:

Tabel 5. Perbandingan Jumlah BPR dan BPRS di Sulawesi Selatan

No	Kelembagaan	Tahun 2009	April 2010
1	BPR	20	22
2	BPRS	6	6
Jumlah		26	28

Sumber: Data Bank Indonesia Makassar diolah 2010

Tabel di atas memberikan gambaran bahwa perkembangan jumlah total Bank Perkreditan rakyat (BPR) maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang beroperasi di Sulawesi Selatan hingga 2010. Untuk Bank Perkreditan rakyat (BPR) mengalami peningkatan

10% dari total Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di tahun 2009 yakni dari jumlah 20 menjadi 22 unit Bank Perkreditan rakyat (BPR) pada tahun 2010. Sedangkan untuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) secara kuantitas mengalami stagnasi karena jumlahnya tetap dari tahun 2009 ke 2010 tetap berjumlah 6 (enam) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Selanjutnya perkembangan BPRS dilihat asetnya mengalami peningkatan. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai lembaga intermediasi melalui kegiatan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) pada tahun 2009 dan 2010 mengalami peningkatan jumlah tabungan 6% dari Rp. 50,994 milyar menjadi Rp. 53.865 milyar. Sedangkan untuk Deposito juga meningkat dari jumlah Rp 73.426 milyar menjadi Rp 96.841 milyar atau pertumbuhan mencapai 32%. Dengan total pertumbuhan 17,88% dari Rp 124.420 milyar untuk 2009 menjadi Rp 150.706 milyar untuk 2010. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Sulawesi Selatan (Juta Rp) untuk jelasnya lihat pada Tabel berikut:

Tabel 6. Penghimpunan DPK oleh BPRS 2009-2010

No	Jenis Penghimpunan Dana	Tahun	
		2009	2010
1	Tabungan	50.994	53.865
2	Deposito	73.426	96.841
Total		124.420	150.706

Sumber: Bank Indonesia Makassar diolah 2010

Meningkatnya aset Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) pertanda positif bagi perkembangannya kedepan karena telah mendapat respon dari masyarakat. Produktifnya dana yang dihimpun oleh

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) diperlukan penyaluran dana ke masyarakat. Untuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Sulawesi Selatan penyaluran dana terjadi peningkatan ini pertanda bahwa masyarakat membutuhkan dana investasi untuk berusaha dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif dan produktif. Data BPS, diketahui bahwa pertumbuhan pinjaman yang diberikan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) secara tahunan mengalami peningkatan signifikan. Hal ini terlihat penyaluran di tahun 2009 mencapai Rp 269.342 milyar menjadi Rp 348.418 milyar di tahun 2010 atau meningkat sebesar 29,35%.

Perkembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Sulawesi Selatan tumbuh tidak secara instant, akan tetapi melewati berbagai kendala-kendala misalnya menjamurnya lembaga keuangan, sumber daya insani mengenai syariah belum memadai, belum optimalnya pembiayaan ke masyarakat menengah ke bawah, serta kurang dukungannya dari beberapa pihak.

Selain itu, umumnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang telah beroperasi telah mengalami perubahan nama bahkan terjadi akuisisi pemegang saham dan kepengurusan hingga beberapa kali. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang beroperasi di Sulawesi Selatan tersebut yakni:

1. PT BPRS Niaga Madani yang didirikan 1 September 1993 di Kab. Pinrang dengan nama PT BPRS Sinar Mentari yang merupakan wujud komitmen tokoh Muhammadiyah untuk kegiatan perekonomian dan perbankan. PT BPRS Sinar Mentari yang berlokasi di Pinrang di tahun 1994 berganti nama menjadi PT BPRS Fastabiqul Khairat dan pindah lokasi di

Makassar di tahun 2001 kemudian di tahun 2002 berganti nama menjadi PT BPRS menjadi PT BPRS Niaga Madani.<sup>214</sup>

2. PT BPRS Indo Timur yang beroperasi 2004 dulunya bernama PT BPRS Ikhwanul Ummah. BPRS tersebut berdiri atas prakarsa beberapa tokoh agama di Kota Makassar bekerjasama dengan beberapa orang yang memiliki komitmen kuat untuk menjalankan ekonomi perbankan bersistem syariah dengan Dewan Komisaris H. Haruna dan Direksi dimotori oleh Muh Ardiansyah Adnan serta DPS oleh KH. KHasan Tahir<sup>215</sup>
3. PT BPRS Dana Moneter dulunya PT BPRS Matahari Ufuk Timur yang beroperasi 16 Agustus 1994 berlokasi di Maros kemudian terjadi akuisisi 2003 yang berlokasi di Makassar<sup>216</sup> bahkan terjadi beberapa kali perubahan akta. Perubahan akta pendirian karena terjadinya perubahan pengurus dan peningkatan modal disetor.

BPRS yang dimotori oleh Hj. Melinda Aksa, telah menunjukkan arah yang lebih baik tergambar pada laporan keuangan tahunan 2009-2010. Pada laporan tahunan tersebut, perkembangan kinerja perusahaan antara tahun 2009 menyebutkan aktiva perusahaan Rp 4.585.660 (Rp 000,-) meningkat menjadi Rp 5.467.244 (Rp 000,-) pada tahun 2010. Pada laporan keuangan tahunan<sup>217</sup>

---

<sup>214</sup> PT. BPRS Niaga Madani, Makassar, 2008.

<sup>215</sup> PT. BPRS Indo Timur, Makassar, 2008.

<sup>216</sup> PT. BPRS Dana Moneter, *Laporan Keuangan Tahunan 2006*. Makassar, 2008

<sup>217</sup> PT. BPRS Dana Moneter, *Laporan Keuangan Tahunan 2007*. Makassar, 2008

4. PT BPRS Gowata yang didirikan pada tanggal 29 Maret 1996 dengan Dewan Komisaris oleh H. Mallinkai Maknun dan H. Syamsul Rijal. Walaupun berjalan tanpa direksi, BPRS tersebut telah beroperasi hingga sekarang dengan dibawah pengawasan syariah M. Yasin Lompo dan H. Amirullah.<sup>218</sup>
5. PT BPRS Surya Sejati di Takalar
6. PT BPRS Al-Ittihad didirikan tahun 2002 dulunya berstatus BMT al-Ittihad. BPRS tersebut sekarang secara operasional dipimpin oleh Ambo rappe dengan direktur utama oleh Ramli Dullah. BPRS yang berlokasi di Pasar Sentral Sengkang telah mengalami peningkatan, dalam annual report jumlah total *funding* per Desember 2010 Rp 889.245 (dalam ribuan) dari Rp 829.035 (dalam ribuan) pada tahun 2009.<sup>219</sup> Secara kelembagaan BPRS Al-Ittihad tidak terdapat penambahan kantor.

Ke enam Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) telah beroperasi dengan lokasi yang kesemuanya sangat strategis sehingga keberadaannya ditengah masyarakat sebagai sebuah lembaga keuangan mikro dapat memberikan solusi ekonomi dengan system syariah.

## **B. Keberadaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Sulawesi Selatan**

Keberlangsungan lembaga keuangan dapat terlihat dengan adanya sambutan positif dari beberapa pihak khususnya masyarakat yang sangat membutuhkan fasilitas perbankan. Keberadaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

---

<sup>218</sup>PT. BPRS Gowata, *Susunan Organisasi* 2007. Gowa, 2008

<sup>219</sup>PT. BPRS Al-Ittihad, *Struktur Organisasi* 2008, Wajo, 2008.

(BPRS) khususnya selain datang membawa misi keadilan, ketentraman, saling menolong, juga sebagai wadah solusi permasalahan umat.

Perkembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan salah satu piranti penting dalam sistem keuangan di Indonesia. Posisi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) didirikan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya kembali ke masyarakat diharapkan memainkan peran dalam menggerakkan roda pembangunan ekonomi masyarakat khususnya di pedesaan. Meskipun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dibangun untuk masyarakat pedesaan, namun masih banyak masyarakat belum tersentuh oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) karena umumnya masih berada pada kota-kota strategis misalnya di Sulawesi Selatan terdapat di Kota Makassar, Gowa, Takalar dan Sengkang. Bahkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) turut bersaing dengan perbankan umum baik dari konvensional maupun syariah. Adapun respon masyarakat Sulawesi Selatan terhadap keberadaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagaimana Tabel 7.

Keberadaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Sulawesi Selatan berdasarkan hasil deskriptif terhadap 88 responden, terdapat 64% dengan penilaian tinggi (3,01-3,00) dan 34% dengan penilaian cukup tinggi (1,01-4,00). Dan penilaian sangat tinggi (3,01-4,00) sebanyak 2%. Nilai tertinggi dari responden 64% menandakan bahwa BPRS diakui keberadaanya di masyarakat Sulawesi Selatan.

Tabel 7. Tanggapan Masyarakat Terhadap Keberadaan BPRS di Sulawesi Selatan

No	Keberadaan BPRS	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Tinggi (3,01-4,00)	02	02
2	Tinggi (2,01-3,00)	56	64

3	Cukup Tinggi (1,01-2,00)	30	34
4	Tidak Tinggi (0,01-1,00)	00	00
Jumlah		88	100

Sumber: Data Primer diolah 2010

Keberadaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dapat diterima oleh publik karena *market share*nya tidak hanya kalangan muslim saja tapi juga non muslim. Misalnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Indo Timur yang lokasinya di tengah-tengah masyarakat dan pertokoan Tionghoa. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhammad Yasir, Kasi Pemasaran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Niaga Madani bahwa nasabah non muslim (khususnya Tionghoa) mencapai 25% nasabah dan umumnya sebagai debitur.<sup>220</sup> Artinya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) mendapat peluang untuk dikembangkan walaupun lembaga keuangan ini bernuansa religius.

Selain itu, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dapat meningkatkan ekonomi masyarakat,<sup>221</sup> mudah mengakses Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), adanya pembiayaan ke masyarakat ekonomi menengah ke bawah tanpa jaminan/agunan, karena ingin hijrah dari konsep bunga karena menganggap riba, pihak BPRS memberikan pelayanan dengan datang menjemput tabungan, pinjaman dan pelayanan lainnya, adanya keingintahuan

---

<sup>220</sup> Muhammad Yasir, Kasi Pemasaran PT. BPRS Niaga Madani, *Wawancara*, Makassar, 26 April 2008.

<sup>221</sup> Bank Indonesia, *Cetak Biru Bank Perkreditan Rakyat* (Jakarta: Direktorat Pengawasan BPR, 2006), h. 21.



masyarakat mengenai bagi hasil<sup>222</sup>, bagi hasilnya sangat tinggi<sup>223</sup>, karena adanya hubungan kerjasama antara tempat bekerja dengan pihak perbankan untuk menerima gaji atau pihak katalisator lainnya<sup>224</sup> dan untuk melanjutkan rekening keluarga.<sup>225</sup>

Meskipun kemudahan-kemudahan yang didapatkan masyarakat dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) untuk mengaksesnya namun paradigma masyarakat umumnya masih bersifat komersil. Sebagaimana yang diungkapkan oleh pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gowata, Qamaria bahwa animo masyarakat sebagai nasabah tinggi tapi untuk mendapatkan pinjaman dana atau sebagai nasabah debitur, tapi animonya untuk menabung masih kurang.<sup>226</sup>

Berbeda dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dana Moneter, oleh Andi Muhammad Yusuf, Direktur Utama,<sup>227</sup> bahwa keberadaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang dipimpinnya sekarang ini diakui masyarakat. Hal ini tergambarkan dari peningkatan yang sangat signifikan jumlah nasabah yang peningkatannya cukup besar pada tahun 2008-2010 ketika terjadi perubahan manajemen dilihat dari aset yang dimilikinya, pembiayaan dan pendapatan yang selalu meningkat pula. Meskipun

---

<sup>222</sup>Muhammad Ardiansyah Adnan, 30 tahun, Direktur Utama, *Wawancara*, Makassar 18 Maret 2008.

<sup>223</sup>Muhammad Jufri, 51 tahun, Wiraswasta, *Wawancara*, Sengkang 10 April 2008.

<sup>224</sup>Kamaruddin, 41 tahun, Mubaligh, *Wawancara*, Sengkang 9 April 2008.

<sup>225</sup>Rini Agustina, 28 tahun, URT, *Wawancara*, Makassar 10 April 2008.

<sup>226</sup>Qamaria, 46 tahun, Akunting, *Wawancara*, Gowa 25 Maret 2008.

<sup>227</sup>Andi Muhammad Yusuf, 38 tahun, Direktur Utama, *Wawancara*, Makassar, 19 Maret 2008.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dana Moneter ini selalu terjadi hampir sejak berdirinya mengalami perubahan struktur manajemen yakni perubahan pada tahun 2008 ke 2009, tahun 2009 serta 2010, terjadinya peningkatan tersebut masih sangat kecil menyentuh *market share*nya yakni untuk usaha kecil dan menengah, umumnya hanya membiayai karyawan dan untuk pedagang menengah kebawah sekitar 30%. Adapun animo masyarakat non muslim juga mengakui keberadaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), namun kurangnya kontribusi masyarakat non muslim karena pihak perbankan masih selalu fokus pada masyarakat muslim dulu dengan alasan dana yang dilemparkan ke masyarakat sangat terbatas.<sup>228</sup> Demikian pula masyarakat non muslim bergabung sebagai nasabah karena pembiayaan (sebagai debitur), sehingga strategi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) untuk meningkatkan nasabah penabung dengan membuat peraturan bahwa selain sebagai debitur juga harus sebagai nasabah penabung walaupun tindakan tersebut hanyalah *makeover* karena arus dana hanyalah media transfer.<sup>229</sup> Namun diakui bahwa animo masyarakat non muslim sangat kurang walaupun BPRS berada pada lokasi etnis Tionghoa.

Operasional Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Sulawesi Selatan akan kesesuaian syariah dalam pandangan responden sebagaimana pada Tabel berikut:

Tabel 8. Tanggapan Responden Berkaitan Operasional BPRS di Sulawesi Selatan

No	Operasional BPRS	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Sesuai (3,01-4,00)	28	32
2	Sesuai (2,01-3,00)	46	52

<sup>228</sup> *Ibid.*

<sup>229</sup> Muhammad Ardiansyah Adnan, *op.cit.*

3	Cukup Sesuai (1,01-2,00)	14	16
4	Tidak Sesuai (0,01-1,00)	00	00
Jumlah		88	100

Sumber : Data Primer diolah 2010

Kesesuaian syariah yang diukur dari 88 responden menunjukkan bahwa terdapat 52% menyatakan sesuai, 32% menunjukkan sangat sesuai dan terakhir cukup sesuai 16%. Hal ini berindikasi bahwa responden sangat terbuka untuk memberikan informasi bahwa BPRS yang beroperasi selama ini masih belum sepenuhnya syariah dengan analisis deskriptif 16% atau 14 responden menunjukkan ketidak syariahnya. Corak ketidak syariahan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) karena banyak faktor dimana masih banyaknya pihak perbankan sendiri belum mengetahui secara komprehensif mengenai mekanisme perbankan syariah, tidak aktifnya Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Pihak perbankan sendiri mengakui hal tersebut bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) kadangkala masih bertransaksi tidak sesuai syariah tapi hal tersebut merupakan proses menuju syariah dan dari sisi umur bank syariah masih muda, jadi proses belajar dari konsep non syariah ke syariah. Ketidak syariahnya bank syariah misalnya pada sistem *murabahah* (jual beli) pada proses ini yang semestinya membeli barang adalah pihak perbankan kemudian menjual ke nasabah, artinya barang yang diperjualbelikan merupakan barang pihak bank, namun prakteknya pihak debitur sendiri langsung membeli barang, adanya pendapatan non halal yang diambil dari pungutan, dan kerjasama dengan pihak perbankan konvensional.

## *Bagian 6*

# **PENGEMBANGAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DI SULAWESI SELATAN**

### **A. Peran Umara**

Umara (Bank Indonesia) sebagai badan otonom yang diberi kewenangan khusus untuk menangani masalah keuangan secara umum dan perbankan secara khusus merupakan *stakeholder* utama yang memegang peranan penting untuk menggerakkan peningkatan perkembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia, termasuk didalamnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Sebagai lembaga yang diberi kewenangan mengatur dan mengarahkan perkembangan lembaga perbankan, maka dalam penelitian akan dikaji peran umara dalam pengembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Sulawesi Selatan terutama yang berkaitan dengan kebijakan, pengawasan dan sosialisasi. Untuk mengetahui peran umara tersebut, maka penelitian akan menguraikan secara detail sebagai berikut:

#### **1. Kebijakan**

Umara atau Bank Indonesia sebagai otoritas moneter perpanjangan tangan pemerintah selalu menjaga stabilitas keuangan dari berbagai kondisi yang bisa menggoyahkan perekonomian secara global dengan cara melaksanakan berbagai macam kebijakan-kebijakan yang terukur dan hati-hati dengan terus mencermati berbagai dinamika perekonomian.

Adapun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan yang berkaitan dengan pengembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah: mengukuhkan posisi BPRS dalam sistem keuangan di Indonesia, terbitnya Pokok-pokok Ketentuan Pendirian BPR/BPRS, Peraturan Bank Indonesia No. 6/17/PBI/2004 Tentang BPR berdasarkan Syariah, terbitnya Peraturan Mengenai Transparansi Kondisi Keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) No 7/47/PBI2005, penyusunan Arsitektur Perbankan Indonesia (API), mengeluarkan Paket Kebijakan Perbaikan iklim Investasi<sup>230</sup>, meningkatkan efektifitas sistem pengawasan, terbentuknya RUU tentang Perbankan Syariah.

Mengetahui tanggapan responden terhadap peran umara berkaitan dengan aspek kebijakan dapat dicermati berdasarkan Tabel terlihat bahwa dari 88 responden yang memberikan tanggapan 52,3% diantaranya mengatakan bahwa umara aktif dalam mengembangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan bentuk kebijakan-kebijakan yang memudahkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), selanjutnya 27,3% orang mengatakan cukup aktif dan hanya 15,9% yang mengatakan sangat aktif dilihat pada Tabel 9 sebagai berikut:

---

<sup>230</sup> Bank Indonesia, *op.cit*, h. 17.

Tabel 9. Tanggapan Responden Terhadap Keaktifan Umara dalam Kebijakan Pengembangan BPRS di Sulawesi Selatan

No	Kebijakan	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Aktif (3,01 - 4,00)	14	15,9
2	Aktif (2,01- 3,00)	46	52,3
3	Cukup Aktif (1,01 - 2,00)	24	27,3
4	Tidak Aktif (0,01 - 1,00)	0	0,0
Jumlah		88	100,0

Sumber: Data Primer diolah 2010

Tingginya persentase responden yang mengatakan umara aktif dan cukup aktif dalam pengembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Sulawesi Selatan karena sampai saat ini, umara selalu mengeluarkan aturan-aturan yang memudahkan bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), seperti:

- a. Mengukuhkan posisi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam sistem keuangan di Indonesia  
 Sebagaimana landasan hukum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah secara tegas menyebutkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan salah satu jenis bank yang kegiatan usahanya terutama ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di daerah pedesaan berdasarkan prinsip syariah. Walaupun kegiatan usahanya sangat terbatas dibandingkan dengan bank umum. Karena hanya meliputi penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka dan dalam operasionalnya hanya dibatasi dalam satu propinsi saja.

Tabel 9. Tanggapan Responden Terhadap Keaktifan Umara dalam Kebijakan Pengembangan BPRS di Sulawesi Selatan

No	Kebijakan	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Aktif (3,01 - 4,00)	14	15,9
2	Aktif (2,01- 3,00)	46	52,3
3	Cukup Aktif (1,01 - 2,00)	24	27,3
4	Tidak Aktif (0,01 - 1,00)	0	0,0
Jumlah		88	100,0

Sumber: Data Primer diolah 2010

Tingginya persentase responden yang mengatakan umara aktif dan cukup aktif dalam pengembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Sulawesi Selatan karena sampai saat ini, umara selalu mengeluarkan aturan-aturan yang memudahkan bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), seperti:

- a. Mengukuhkan posisi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam sistem keuangan di Indonesia  
 Sebagaimana landasan hukum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah secara tegas menyebutkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan salah satu jenis bank yang kegiatan usahanya terutama ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di daerah pedesaan berdasarkan prinsip syariah. Walaupun kegiatan usahanya sangat terbatas dibandingkan dengan bank umum. Karena hanya meliputi penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka dan dalam operasionalnya hanya dibatasi dalam satu propinsi saja.

- b. Peraturan Bank Indonesia No. 6/17/PBI/2004 Tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Syariah

Peraturan Bank Indonesia tersebut mengatur operasional Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) antara lain: Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dapat melakukan aktivitas perbankan seperti pelayanan kas terhadap nasabah di luar kantor Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagaimana dalam ketentuan umum pasal 1 ayat 5 huruf a-c bahwa: "...kegiatan pelayanan kas terhadap pihak yang telah menjadi nasabah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) antara lain: (a) kas mobil atau kas terapung yaitu kegiatan kas dengan menggunakan alat transportasi darat atau air; (b) *Payment Point* yaitu kegiatan pelayanan pembayaran melalui kerjasama antara Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan pihak lain yang meruakan nasabah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS); (c) Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yaitu kegiatan kas yang dilakukan secara elektronik untuk memudahkan nasabah, antara lain dalam rangka menarik atau menyetor secara tunai, atau melakukan pembayaran melalui pemindahbukuan, dan memperoleh informasi mengenai saldo/mutasi rekening nasabah."

Ketentuan tersebut memberi peluang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) untuk memberi pelayanan ke nasabah karena Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) diberi kesempatan untuk membuka kas dengan media kas mobil, kemudahan lainnya dengan *payment point* nasabah dapat bertransaksi berupa pembayaran seperti membayar



tagihan listrik, tagihan telepon atau tagihan air lewat BPRS atau pihak yang telah melakukan *memorandum of understanding* dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

- c. Terbitnya Pokok-pokok Ketentuan Pendirian BPR/BPRS<sup>231</sup>

Dalam peraturan tersebut, umara (Bank Indonesia) telah memberi peluang bagi pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) seperti modal disetor bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) berbeda dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yakni untuk modal disetor Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebesar Rp 5.000.000,- (lima milyar rupiah), sedangkan untuk modal disetor Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebesar Rp 2.000.000,- (dua milyar rupiah). Hal ini pertanda bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang masih baru dalam kancah perekonomian dapat berkembang untuk melayani masyarakat.

Selain itu, peraturan Bank Indonesia mengharuskan setiap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) membentuk dan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mempunyai integritas, kompetensi dan reputasi keuangan. Kemudian, usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) wajib melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat ke masyarakat kembali.

- d. Terbitnya Peraturan Mengenai Transparansi Kondisi Keuangan BPRS No 7/47/PBI2005

---

<sup>231</sup>Bank Indonesia Makassar, *Pokok-Pokok Ketentuan Pendirian BPR/BPRS* (Makassar: Bank Indonesia Makassar, 2005), h. 1.

Itikad Bank Indonesia sebagai regulator mengembangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) lebih baik lagi maka diperlukan informasi keadaan keuangan dan informasi lainnya kepada publik secara berkala, akurat dan benar. Karena itu, Bank Indonesia mengeluarkan peraturan mengenai transparansi kondisi keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan No. 7/47/PBI2005.

Transparansi keuangan dibuat oleh pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan menyajikannya dalam bentuk laporan keuangan yang terdiri dari laporan tahunan dan laporan keuangan Publikasi Triwulanan.<sup>232</sup> Dalam laporan tersebut dipublikasikan ke khalayak ramai khususnya bagi nasabah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) bersangkutan.

Laporan tersebut terdiri dari informasi mengenai kepengurusan, kepemilikan dan perkembangan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan perkembangan kelompok usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), strategi dan kebijaksanaan manajemen serta laporan manajemen. Sedangkan untuk laporan keuangan tahunan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, arus kas, perubahan ekuitas, sumber dan penggunaan dana zakat, infaq dan shadaqah serta sumber dan penggunaan dana *Qardh*.

- e. Penyusunan Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Arsitektur Perbankan Indonesia (API), merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk

---

<sup>232</sup>Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPRS* (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), h. 4.

dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu sampai sepuluh tahun berlandaskan visi mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka mendorong per-tumbuhan ekonomi nasional.<sup>233</sup>

- f. Mengeluarkan Paket kebijakan Perbaikan iklim Investasi.<sup>234</sup>

Sebagaimana dalam Inpres No 3/2006 yang menegaskan bahwa pentingnya pemberdayaan UMK, khususnya dalam peningkatan akses sumber daya financial. Karena itu, umara pun menyediakan jasa keuangan mikro, antar lain berupa:

- usaha pengembangan kewirausahaan untuk menciptakan wirausaha kecil baru
  - pembangunan sentra industri kecil dan koperasi
  - kemudahan perizinan dan perlindungan bagi usaha mikro
  - penyediaan kemampuan petani supaya mampu menghasilkan produk yang mampu bersaing sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan petani.
  - penguatan pemberdayaan UMK melalui bantuan dan akses modal usaha
- g. Meningkatkan efektifitas sistem pengawasan. Untuk industri Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang sehat, kuat, produktif dan dipercaya tidak terlepas dari sistem pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia. Sistem pengawas-an yang efektif diharapkan dapat mendeteksi

---

<sup>233</sup> Bank Indonesia, *Arsitektur....*, opcit., h.3.

<sup>234</sup> Bank Indonesia, *Cetak Biru BPR* (Jakarta: Bank Indoensia, 2006), h. 17.

penyimpangan dan pelanggaran sedini mungkin serta memastikan dipenuhinya ketentuan-ketentuan yang berlaku.

- h. Peraturan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)<sup>235</sup>

Permodalan yang kuat sangat diperlukan dalam rangka melakukan pengembangan usaha. Karena itu, untuk proses perkembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang sehat umara mengeluarkan peraturan sebagaimana dalam PBI No. 8/22/BI/2006 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Berdasar-kan Syariah.

Dalam peraturan tersebut Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) diwajibkan menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aktiva. Modal minimum yang harus disediakan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai berikut:

1. Modal Inti. Pada pasal 4 ayat (1) bahwa yang dimaksud modal inti terdiri dari modal disetor, agio saham, dana setoran modal, modal sumbangan, cadangan umum, cadangan tujuan, laba yang diatahan setelah diperhitungkan pajak, laba tahun lalu setelah diperhitungkan pajak, laba tahun berjalan setelah diperhitungkan taksiran pajak dan kekurangan penyisihan peng-

---

<sup>235</sup>Bank Indonesia, PBI No. 8/22/PBI/2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum BPRS, <http://www.bi.go.id/>, Akses 27 Mei 2008.

hapusan aktiva produktif paling tinggi sebesar 50%.<sup>236</sup>

2. Modal Pelengkap. Modal pelengkap tercantum dalam pasal 5 yang terdiri sebagai berikut:

- (a) selisih penilaian kembali aktiv tetap.
- (b) cadangan umum penyisihan penghapusan aktiva produktif paling tinggi 1,25% dari aktiva ketimbang menurut resiko.
- (c) Modal pinjaman (modal kuasi) yaitu pinjaman yang didukung oleh instrument atau warkat yang mempunyai persyaratan sebagai berikut:
  - berdasarkan prinsip *qardh*.
  - tidak dijamin oleh BPRS penerbit (*issuer*) dan sifatnya dipersamakan dengan modal serta telah dibayar penuh
  - tidak dapat dilunasi atau diatrik atas inisiatif pemilik, tanpa persetujuan Bank Indonesia
  - mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam jumlah kerugian BPRS melebihi saldo laba dan cadangan-cadangan yang termasuk modal inti, meskipun bank belum dilikuidasi.
- (d) Investasi subordinasi paling tinggi sebesar 50% dari modal inti.

i. Terbentuknya RUU tentang Perbankan syariah.

Undang-undang sebagai landasan pelaksanaan penyediaan kemampuan petani supaya mampu menghasilkan produk yang mampu bersaing

---

<sup>236</sup> *Ibid*, h. 3

sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan petani. masih menggunakan UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan. UU tersebut turut dipergunakan oleh bank konvensional sebagai landasan hukum operasionalnya. Jadi UU Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menyatu dalam satu UU. Sehingga badan legislatif sebagai perancang undang-undang membuat Rancangan Undang-undang mengenai khusus bank syariah. Namun RUU tersebut masih mendapatkan halangan dari beberapa anggota legislatif antara lain Fraksi Partai Damai Sejahtera yang secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara Pancasila bukan negara berdasarkan agama,<sup>237</sup> yang pada awalnya menyetujui RUU tersebut.

## 2. Pengawasan

Pengawasan bagi bank sangat diperlukan, hal ini disebabkan karena masih terdapatnya beberapa prinsip-prinsip prudensial yang masih belum diterapkan secara baik, koordinasi pengawasan yang masih perlu ditingkatkan, kemampuan SDM pengawasan yang belum optimal.<sup>238</sup> Karena itu, secara keseluruhan upaya peningkatan kapabilitas pengawasan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) maka usaha umara untuk menerapkan *25 Basel Core Principles for Effective Banking Supervision*<sup>239</sup> yang termasuk meningkatnya sarana teknologi pengawasan.

---

<sup>237</sup>"PDS Tolak Pembahasan RUU Perbankan Syariah, [www.tempointeraktif.com](http://www.tempointeraktif.com), Akses Selasa 29 Januari 2008.

<sup>238</sup> Bank Indonesia, *Arsitektur .....*, *op.cit.*, h. 11.

<sup>239</sup> Ahmad Soerko Tratmono dan Dadang Muljawan, *Penilaian Mengenai Penerapan 25 Basle Core Principle dalam Pengaturan dan Pengawasan Bank Syariah* (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), h. 5-7.

Sistem pengawasan yang dilakukan oleh umara menyangkut kepatuhan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) terhadap operasional syariah dan kepatuhan terhadap aturan-aturan perbankan secara umum, walaupun terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) secara struktural di setiap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) karena Bank Indonesia masih menemukan di operasional Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) belum menerapkan sistem syariah. Namun Hal itu senada dengan yang diungkapkan oleh pihak Bank Indonesia, Saevitri Lihanara, Pengawas Bank Muda Senior bahwa Bank Indonesia menemukan ketidakpatuhan syariah di bawah pengawasan BI lebih dahulu daripada Dewan Pengawas Syariah (DPS) karena Bank Indonesia setiap waktu melakukan pengawasan dan masuk keseluruhan operasional perbankan.<sup>240</sup> Sehingga pengawasan yang dilakukan oleh umara tersebut lebih diintensifkan karena selain sebagai pengawas juga sebagai pembina. Jadi umara melakukan pengawasan sekaligus sebagai pembina perbankan.

Pengawasan yang dilakukan umara adalah meningkatkan koordinasi dengan lembaga pengawas lain di tahun 2004-2007. Kemudian melakukan reorganiasi sektor perbankan di Indonesia dengan menyempurnakan *High Level Organization* di Bank Indonesia tahun 2004-2006, mengkonsolidasikan satker pengawasan dan pemeriksaan termasuk pembentukan *pooling spesialis* tahun 2004-2006, mengkonsolidasikan Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Biro Kredit di Bank Indonesia untuk mengalihkan fungsi pengembangan UMKM dari Biro Kredit ke Direktorat Peng-

---

<sup>240</sup> Saevitri Lihanara, Pengawas Bank Muda Senior BI, *Wawancara*, Makassar: 18 April, 2008.

awasan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 2006-2007, penyempurnaan organisasi Direktorat Pengawasan Perbankan Syariah tahun 2005-2006.

Selain tersebut di atas umara juga melakukan penyempurnaan infrastruktur pendukung pengawasan bank dengan meningkatkan kompetensi pengawas bank umum dan BPR baik konvensional maupun syariah melalui sertifikasi di lembaga pengawas internasional tahun 2004-2005, penyiapan SDM pengawas spesialis, menyempurnakan sistem IT pengawasan BPR/BPRS serta manajemen dokumen pengawasan bank tahun 2005-2006.

Selanjutnya umara kedepan, juga mendorong kinerja peran lembaga fatwa dan lembaga arbitrase syariah sebagai bagian upaya peningkatan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah tahun 2004-2010, mendorong pengembangan keuangan syariah 2006-2010.

Untuk tahun 2008-2010 umara lebih kepada meningkatkan kemampuan operasional bank untuk mendorong melakukan *sharing* penggunaan fasilitas operasional guna menekan biaya dan memfasilitasi kebutuhan pendidikan dalam rangka meningkatkan operasional bank, meningkatkan kualitas SDM BPR/BPRS melalui sertifikasi profesional bagi pengurus BPR/BPRS tahun 2005-2008. Untuk mengetahui secara jelas keaktifan umara melakukan pengawasan dalam rangka pengembangan di Sulawesi Selatan berdasarkan tanggapan responden dapat dilihat Tabel 10 sebagai berikut.



Tabel 10. Tanggapan Responden Terhadap Keaktifan Umara dalam Pengawasan Pengembangan BPRS di Sulawesi Selatan

No	Pengawasan	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Aktif (3,01 - 4,00)	54	61,4
2	Aktif (2,01- 3,00)	28	31,8
3	Cukup Aktif (1,01 - 2,00)	6	6,8
4	Tidak Aktif (0,01 - 1,00)	0	0,0
Jumlah		88	100,0

Sumber: Data Primer diolah 2010

Berdasarkan Tabel di atas terlihat bahwa keaktifan umara dalam pengawasan berdasarkan tanggapan responden sangat bervariasi. Yang dominan adalah persentase responden yang mengatakan sangat aktif (61,4%), sedangkan persentase terkecil adalah responden yang mengatakan cukup aktif (6,8%).

Tingginya tanggapan responden yang mengatakan umara aktif melakukan pengawasan dalam rangka pengembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) terlihat dari banyaknya kebijakan-kebijakan yang diluncurkan dan semuanya berpihak ke Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), baik menyangkut pengawasan dalam perbaikan produk maupun pengawasan dalam pengembangan kelembagaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Sulawesi Selatan. Selain itu, pihak pengelola Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) secara rutin diwajibkan memberikan laporan tentang perkembangannya.

### 3. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang keberadaan . Bentuk upaya yang dilakukan umara dalam membantu mensosialisasikan BPRS adalah melalui promosi edukasi untuk nasabah yang di mulai tahun 2004. Wujud dari edukasi dari umara untuk masyarakat, seperti: pamflet ayo ke bank, melalui media dan sebagainya.

Selain itu, dalam mensosialisasikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), umara juga melakukan Festival Ekonomi Syariah (FES) bekerjasama dengan berbagai pihak seperti perbankan syariah, media cetak, praktisi perbankan dan akademis, melakukan seminar, *talk show* dan cerdas cermat tingkat SLTA dan pameran tentang perbankan syariah. Untuk memasyarakatkan kegiatan tersebut, umara menyelenggarakan di lokasi strategis seperti di Mall dan tempat yang ramai dikunjungi oleh khalayak.

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap keaktifan umara dalam mensosialisasikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Sulawesi Selatan kepada masyarakat dapat dilihat pada Tabel 11 sebagai berikut:

Tabel 11. Tanggapan Responden Terhadap Keaktifan Umara Dalam Sosialisasi Pengembangan BPRS di Sulawesi Selatan

No	Sosialisasi	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Aktif (3,01 - 4,00)	12	13,6
2	Aktif (2,01- 3,00)	34	38,6
3	Cukup Aktif (1,01 - 2,00)	38	43,1
4	Tidak Aktif (0,01 - 1,00)	4	4,5
Jumlah		88	100,0

*Sumber: Data Primer diolah 2010*

Berdasarkan Tabel 11 di atas terlihat bahwa keaktifan umara mensosialisasikan dalam rangka pengembangan berdasarkan tanggapan responden ternyata persentase terbesar adalah yang mengatakan cukup aktif, yakni sebesar 43,1%, sedangkan persentase yang terkecil adalah responden yang mengatakan tidak aktif, yakni sebesar 4,5%. Adapun responden yang mengatakan aktif dan sangat aktif persentasenya masing-masing sebesar 38,6% dan 13,6%.

Dominannya persentase tanggapan responden yang mengatakan umara cukup aktif dalam mensosialisasikan pengembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) disebabkan karena menurut responden umara hanya sebatas sebagai fasilitator sekaligus sebagai mediator, sehingga yang harus aktif adalah para pengelola Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) itu sendiri, karena mereka lebih memahami apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukan sosialisasi yang baik dan menguntungkan.

## **B. Peran Ulama**

Berbicara tentang perbankan tidak lepas dengan basis perbankan itu sendiri. Bank yang pertama di Indonesia adalah bank konvensional berbasis bunga dan kemudian di susul bank Islam berbasis syariah. Dari basis bunga dan basis syariah ternyata tidak sampai sebatas terdapatnya tempat transaksi uang dan fasilitas produk lainnya, tetapi ke duanya mengusung tujuan mulia untuk mensejahterakan masyarakat. Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) nilai-nilai moral harus terpatrit di seluruh pihak perbankan sehingga umat dapat merasakan keberadaan BPRS dengan nilai-nilai *religius*. Namun kenyataannya perkembangan

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) masih belum beroperasi sesuai syariah dan kontribusinya dirasakan minim oleh masyarakat sehingga seluruh stakeholder harus mengarahkan tenaga bagi kemajuan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) terutama ulama.

Ulama sebagai elit agama mempunyai *power* untuk pengembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) karena mempunyai posisi strategis di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), mempunyai kekuatan di masyarakat sebagai tokoh agama. Dalam penelitian akan diuraikan peran ulama dalam pengembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), terutama yang berkaitan dengan: fatwa, pengawasan dan sosialisasi. Selanjutnya akan diuraikan secara jelas sebagai berikut:

#### 1. Fatwa

Ulama sangat penting bagi kelangsungan beragama sebagaimana kedudukannya yang sangat tinggi diberikan oleh Rasul sebagai pewaris nabi. Sebagai pewaris nabi ulama mempunyai tugas yang secara umum sama dengan nabi yakni *tablig*, *bayan*, dan *tahkim* sebagai pengalih tugas atau fungsi kenabian, berperan sebagai mengembang amanah yang diwariskan nabi.

Landasan bagi pelaksanaan tugas para ulama dalam mencari solusi terhadap persoalan-persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat dapat dijumpai dalam al-Quran, yakni QS. al-Baqarah (2): 213.

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ...

Terjemahnya:

"Manusia itu adalah umat yang satu (setelah timbul perselisihan) maka Allah mengutus para nabi

sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan....."<sup>241</sup>

Ada beberapa ide pokok yang terkandung dalam ayat di atas. *Pertama*, bahwa Allah swt menciptakan manusia pada mulanya sebagai *ummatah wahidah* (umat yang satu) sebelum terjadinya tragedi pertikaian; *kedua*, bahwa Allah mengutus para nabi untuk membawa berita gembira dan memberi peringatan kepada umat manusia; *ketiga*, bahwa Allah menyertakan al-Kitab kepada para nabi sebagai pedoman untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

Sejalan dengan semangat tugas kenabian peranan ulama dalam pengembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sangat diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat karena hal ini menyangkut muamalah dalam konsep al-Qur'an dan al-Hadis. Bank yang beroperasi sesuai syariah juga masih baru dikalangan beberapa pihak, apalagi ketika memasuki wilayah operasionalnya yang mengadopsi cara kerja perbankan sebelumnya yakni konvensional yang menggunakan sistem bunga dalam segala transaksinya. Karena itu, ulama sangat diperlukan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam bentuk fatwa, yang kesemuanya itu dilakukan sesuai dengan amanah yang diembannya.

Berbicara mengenai kultur Sulawesi Selatan yang religius "masih" sangat menjunjung tinggi nilai-nilai

---

<sup>241</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an ...op.cit*, h.34.

ajaran Islam dengan bukti peng-hargaannya kepada para ulama. Dengan ulama maka masyarakat dapat mengetahui konsep Islam dalam perbankan syariah khususnya dan muamalah umumnya. Ulama mempunyai kedudukan tersendiri dihati masyarakat sehingga ketokohan ulama sangat potensial untuk menyampaikan pesan-pesan ajaran mengenai konsep perbankan syariah. Karena itu, ulama sebagai peletak batu pertama bagi pendirian perbankan syariah seyogyanya menjalankan tugasnya ke masyarakat.

Untuk mengetahui tanggapan responden tentang keaktifan ulama dalam memberikan fatwa dalam rangka pengembangan BPRS di Sulawesi Selatan dapat dilihat pada Tabel 12 berikut:

Tabel 12. Tanggapan Responden Terhadap Keaktifan Ulama Memberikan Fatwa dalam Pengembangan BPRS di Sulawesi Selatan

No	Fatwa	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Aktif (3,01 - 4,00)	10	11,4
2	Aktif (2,01- 3,00)	20	22,7
3	Cukup Aktif (1,01 - 2,00)	40	45,5
4	Tidak Aktif (0,01 - 1,00)	16	20,4
Jumlah		88	100,0

Sumber: Data Primer diolah 2010.

Berdasarkan Tabel 12 di atas terlihat bahwa persentase tanggapan responden yang dominan adalah yang menyatakan cukup aktif (45,5%), sedangkan yang menyatakan aktif dan sangat aktif masing-masing hanya sebesar 22,7% dan 11,4%. Kemudian yang menyatakan tidak aktif sebesar 20,4%.

Tingginya persentase yang menyatakan cukup aktif dan tidak aktif disebabkan karena terjadi perbedaan-

an pandangan dikalangan para ulama mengenai persoalan muamalah diantaranya persoalan bunga bank. Adapun perbedaan pandangan dikalangan para ulama dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Mustafa Ahmad Az-Zaqra, guru besar hukum Islam dan hukum perdata, Syria, mengemukakan praktek riba yang diharamkan adalah praktek riba yang mengandung unsur pemerasan orang-orang kaya terhadap orang-orang miskin yang berhubungan dengan hutang piutang bersifat konsumtif, bukan hutang piutang yang bersifat produktif.<sup>242</sup> Tegasnya sistem bunga yang *bersifat konsumtif* diharamkan dan bunga *bersifat produktif* boleh mengambilnya. Dengan kata lain bahwa kebolehan bunga bank berlaku untuk kredit usaha yang bersifat produktif, akan tetapi sebaliknya bunga yang bersifat konsumtif hukumnya haram.
- Menurut Arifuddin Ahmad bahwa bunga yang tidak diperbolehkan ketika terdapat unsur *Adha'afan Mudhaafan*.<sup>243</sup> Senada dengan A. Hasan, seorang ahli tafsir menganalisa ayat-ayat al-Qur'an dan hadis bahwa riba secara harfiah adalah "tambahan" atas uang yang dipinjam. Tambahan yang ditetapkan dan diambil oleh debitur dikategorikan riba apabila tambahannya mencapai *Adha'afan Mudha'afan* (berlipat ganda), sedangkan yang tidak berlipat ganda atau wajar tidak haram karena wajar-wajar

---

<sup>242</sup>Lihat Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf* (Jakarta : UI-Press, 1998), h. 13 .

<sup>243</sup>Arifuddin Ahmad, Sekertaris Komisi Fatwa MUI dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Sulawesi Selatan, *Wawancara*, Makassar 27 Maret 2008.

saja.<sup>244</sup> Artinya riba yang diharamkan adalah yang sudah mencapai tingkat *Adhafaan Mudha'afan* (berlipat ganda) dan kondisi berlipat ganda biasanya muncul karena kondisi tertunda-tunda dari debitur yang tidak membayar pinjamannya. Sambungnya bahwa untuk bertransaksi sebagai penabung dengan konvensional tidak dibolehkan akan tetapi untuk mengambil pembiayaan hal tersebut dibolehkan karena nasabah bisa mengontrol perputaran dana yang dipinjam.<sup>245</sup>

- Abu Zahra secara tegas menyatakan bahwa bank yang bermodus sama kedudukannya dengan riba nasiah yang dilarang oleh Islam, tetapi umat Islam boleh mengadakan transaksi melalui bank yang berbasis bunga karena bunga merupakan tempat alternatif dan dalam keadaan *daruriyah* (terpaksa) untuk mempergunakan fasilitas kemudahan tersebut.
- A. Chotib bahwa hukum bunga bank haram kecuali keadaan darurat. Dimana adanya tuntutan kehidupan zaman modern yang menjadikan orang tidak bisa lepas dari jasa bank, baik penggunaan jasa pinjaman, pengiriman, penyimpangan, dan lain sebagainya.<sup>246</sup>
- Syarifuddin Prawinagera, memuat arti riba yakni segala keuntungan yang di peroleh berdasarkan transaksi atau perjanjian, di mana salah satu pihak menyalahgunakan ekonominya yang kuat untuk mengambil keuntungan yang melewati batas dari

---

<sup>244</sup>*Ibid.*

<sup>245</sup>Arifuddin Ahmad, *Sekretaris, Ibid.*

<sup>246</sup>Lihat Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami : Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar kerjasama dengan Academica Yogya, 1996) h. 69.



pihak lawannya dengan tarif bunga yang tinggi.<sup>247</sup> Syafruddin membatasi riba dari tingkat tinggi rendahnya suku bunga yang ditawarkan, suku bunga yang rendah tidak dikategorikan riba. Namun apabila suku bunga yang ditawarkan tinggi, maka dikategorikan sebagai riba.

- H.M. Bustani Ibrahim mengharamkan dan menolak secara tegas hal berkaitan dengan bunga, bahkan berkata: "Kita tidak usah berkelah disini dan kemari untuk mencari jalan. Sebab Allah Maha Tahu apa yang tersembunyi yang sama sekali di luar kemampuan manusia. Kita sudah melihat dengan mata kepala sendiri tentang apa manfaat dan kemudahan bank. Maka walau bagaimana pun keadaan yang memaksanya, yang haram itu tetap haram. Sejalan dengan itu, dalam hal bank, sedikit dan banyak, dengan langsung atau perantara tetap hukumnya haram".<sup>248</sup>
- Keputusan MUI mengenai bunga bank. Majelis Ulama Indonesia akhir tahun 2003 tepatnya 22 Syawal 1424 H/16 Desember berijtima' dengan mengenai status bunga (*intersat/fa'idah*) dengan pertimbangan bahwa umat Islam di Indonesia masih mempertanyakan status hukum bunga. Status bunga bank merupakan riba. Untuk menindaklanjuti fatwa sebelumnya mengenai bunga yakni fatwa No. 1 tahun 2004 tentang Bunga (*intersat/fa'idah*). Bunga yang dimaksudkan adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan

---

<sup>247</sup>Lihat M. Dawan Rahadjo, *Esei-Esei Ekonomi Politik* (t.p: LP3ES, 1988), h. 277.

<sup>248</sup>Lihat Khoiruddin Nasution, *op. cit*, h. 69.

pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti dimuka dan pada umunya berdasarkan persentase.<sup>249</sup>

- Keputusan Lajnah Bathsul Masa'il dalam Munas Alim Ulama terdapat perbedaan pendapat mengenai bunga bank, pendapat tersebut adalah<sup>250</sup>:

- (a) Ada pendapat yang mempersamakan antara bunga bank dengan riba secara mutlak, sehingga hukumnya riba. Pendapat pertama ini mempunyai corak pemikiran yang bervariasi, antara lain: (1) Bunga itu dengan segala jenisnya sama dengan riba sehingga hukumnya riba; (2) Bunga itu sama dengan riba dan hukumnya haram, akan tetapi boleh dipungut sementara sebelum beroperasinya sistem perbankan yang Islami (tanpa bunga); (3) Bunga itu sama dengan riba, hukumnya haram, akan tetapi boleh dipungut sebab adanya kebutuhan yang kuat.
- (b) Ada pendapat yang tidak mempersamakan bunga bank dengan riba, sehingga hukumnya boleh. Pendapat kedua juga mempunyai corak pemikiran yang bervariasi, antara lain: (1) Bunga konsumtif sama dengan riba, hukumnya haram, dan bunga produktif tidak sama dengan riba, hukumnya halal; (2) Bunga yang diperoleh dari bank tabungan giro tidak sama dengan riba hukumnya halal; (3) Bunga yang diterima dari deposito yang dipertaruhkan ke bank hukumnya boleh; dan (4) Bunga bank tidak haram, kalau

---

<sup>249</sup>Keputusan Fatwa MUI No 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (Intersat/Fa'idah) Akses 9 Mei 2008 [www.mui.or.id/mui\\_in/fatwa](http://www.mui.or.id/mui_in/fatwa)

<sup>250</sup>Ahmad Zohra, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999* (Yogyakarta: PT Lkis Pelangi, 2004), h. 131.

bank itu menetapkan tariff bunganya terlebih dahulu secara umum.

- (c) Ada pendapat yang mengatakan hukumnya syubhat (tidak identik dengan riba). Inilah kritisasi pemikiran yang berkembang di Lajnah Bathsul Masail berkaitan dengan permasalahan bunga bank yang kemudian muncul opsi mengharamkan bunga bank dengan pengecualian, menghalalkan bunga bank dengan pengecualian dan bunga adalah syubhat.
- Muhammadiyah dalam keputusan Majelis Tarjih pada tahun 1968 memutuskan bahwa:
  - (a) Riba hukumnya haram dengan nash al-Qur'an dan as-Sunnah
  - (b) Bank dengan sistem riba hukumnya dan bank tanpa riba hukumnya halal
  - (c) Bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku, termasuk perkara *mutasyabihat*.
  - (d) Menyarankan kepada PP Muhamaddiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian, khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam<sup>251</sup>

Sistem bunga yang diberlakukan di bank konvensional berkedudukan hukum syubhat dikarenakan belum jelas hukum kehalalan dan keharamannya. Hal itu disebabkan karena munculnya interpretasi tentang hukum bunga bank dengan sudut pandang yang berbeda. Bank milik negara berbasis bunga di anggap *mutasyabihat* atau perkara

---

<sup>251</sup> Lihat Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah ....*, op.cit, h. 62.

syubhat dengan alasan bunga itu masih bersyarat dalam perjanjian kredit kendati tidak terlalu besar presentasinya. Alasan tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Minhajuddin,<sup>252</sup> bahwa bunga yang dipresentasekan oleh pihak bank negara untuk debitur bukan untuk perorangan melainkan menjadi keuntungan (pendapatan) negara yang akhirnya akan digulirkan kembali untuk kepentingan masyarakat luas, sehingga masih diperbolehkan untuk bertransaksi dengan bank negara. Jadi, untuk menentukan kedudukan bunga bank bukan besar kecilnya presentasinya, melainkan kepada siapa yang memperoleh keuntungan itu atau untuk siapa keuntungan dimanfaatkan, khusus bunga bank negara.

## 2. Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu faktor yang sangat strategis dalam mendukung aktivitas dan operasional organisasi. Hal ini terjadi karena pengawasan adalah salah satu alat ukur untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu.

Dalam peraturan Bank Indonesia, Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab antara lain:

- a. memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) terhadap fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional (DSN)

---

<sup>252</sup>Minhajuddin, Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah Sulawesi Selatan, *Wawancara*, Makassar 28 Maret 2008.

- b. menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 bulan kepada Direksi, Komisaris, Dewan Syariah Nasional (DSN), dan Bank Indonesia (BI)
- c. menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional (DSN)
- d. memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional secara keseluruhan
- e. mengkaji produk dan jasa baru yang akan dikeluarkan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) untuk dimintakan fatwa pada Dewan Syariah Nasional (DSN)
- f. bila perlu meminta dokumen dan penjelasan langsung dari satuan kerja serta ikut dalam pembahasana intern<sup>253</sup>

Berkaitan dengan pengawasan tersebut, khususnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Sulawesi Selatan, ulama mempunyai posisi yang sangat strategis dalam mengembangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mempunyai tugas pengawasan ke-syariahan. Untuk mengetahui keaktifan ulama sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam pengembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Sulawesi selatan dapat dilihat pada Tabel 13.

Berdasarkan tabel 13 diketahui bahwa tanggapan responden terhadap keaktifan ulama melakukan pengawasan dalam rangka pengembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Sulawesi Selatan, secara umum masih dalam kategori rendah. Hal ini terbukti

---

<sup>253</sup>Bank Indonesia Makassar, *op.cit* h. 4.

dengan adanya 68,2% dan 27,3% responden yang menyatakan keaktifan ulama cukup aktif dan tidak aktif melakukan pengawasan. Sedangkan yang menyatakan aktif hanya sebesar 4,5%.

Tabel 13. Tanggapan Responden Terhadap Keaktifan Ulama Melakukan Pengawasan dalam Pengembangan BPRS di Sulawesi Selatan

No	Pengawasan	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Aktif (3,01 - 4,00)	0	0
2	Aktif (2,01- 3,00)	4	4,5
3	Cukup Aktif (1,01 - 2,00)	60	68,2
4	Tidak Aktif (0,01 - 1,00)	24	27,3
Jumlah		88	100,0

Sumber: Data Primer diolah 2010

Rendahnya tingkat keaktifan ulama melakukan pengawasan disebabkan karena: (1) saat ini banyak anggota dewan pengawasan bukan dari unsur ulama, walaupun dalam ketentuan Dewan Pengawas Syariah (DPS) berada dibawah koordinasi MUI; (2) ada diantara ulama diangkat sebagai anggota dewan pengawas syariah tidak memiliki pengetahuan tentang perbankan; dan (3) anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) kurang dilibatkan dalam pengambilan keputusan.

### 3. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan upaya untuk memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi terkenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat<sup>254</sup>. Karena itu khusus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), ulama merupakan sosok yang mempunyai aspek ketokohan yang dapat

---

<sup>254</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 1085.

memperkenalkan ke masyarakat. Ulama mempunyai tempat di kalangan masyarakat dan wadah untuk memperkenalkan seperti majelis ta'lim, khutbah jum'at, pengajian, bahkan diwujudkan dalam tulisan dan sebagainya, sehingga masyarakat dapat memahami konsep-konsep perbankan syariah secara komprehensif dari sisi kesyariaannya.

Adapun tanggapan responden terhadap keaktifan ulama melakukan sosialisasi dalam pengembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Sulawesi Selatan sebagai berikut:

Tabel 14 Tanggapan Responden Terhadap Keaktifan Ulama Melakukan Sosialisasi dalam Pengembangan BPRS di Sulawesi Selatan

No	Sosialisasi	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Aktif (3,01 - 4,00)	2	2,3
2	Aktif (2,01- 3,00)	8	9,1
3	Cukup Aktif (1,01 - 2,00)	30	34,1
4	Tidak Aktif (0,01 - 1,00)	48	54,5
Jumlah		88	100,0

Sumber: Data Primer diolah 2010

Sebagai sebuah praktek keuangan baru dimasyarakat, keberadaan dan pelaksanaannya perlu disosialisasikan. Sosialisasi tersebut bukan hanya bagi masyarakat umum, namun juga kalangan perbankan. Menurut Antonio Syafii bahwa dalam mensosialisasikan perbankan syariah kepada masyarakat, setidaknya ada empat peran penting ulama yakni:

- Menjelaskan kepada masyarakat bahwa perbankan syariah pada dasarnya adalah penerapan *fiqh muamalah maaliyah*, yang menjelaskan bagaimana

sesama manusia berhubungan dalam bidang harta, ekonomi, bisnis dan keuangan.

- b. mengembalikan masyarakat pada fitrah alam dan fitrah usaha yang telah terkontaminasi dengan liberalisasi perbankan oleh bunga
- c. Menyarankan kepada pengusaha agar mengikuti langkah yang ditempuh oleh bank syariah dalam berbagihasil dan berbagi resiko.
- d. Membantu menyelamatkan perekonomian bangsa melalui pengembangan sosialisasi perbankan syariah.<sup>255</sup>

Berdasarkan tabel 14 diketahui bahwa tanggapan responden terhadap keaktifan ulama melakukan sosialisasi dalam rangka pengembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Sulawesi Selatan, secara umum masih dalam kategori rendah. Hal ini terbukti dengan adanya 54,5% dan 34,1% responden yang menyatakan keaktifan ulama tidak aktif dan cukup aktif melakukan sosialisasi. Sedangkan yang menyatakan aktif hanya sebesar 9,1% dan 2,3% menyatakan sangat aktif.

Rendahnya tingkat keaktifan ulama melakukan sosialisasi di-sebabkan karena: (1) ulama tidak termasuk dalam struktural perbankan kecuali ulama menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS); (2) ulama mempunyai agenda tidak hanya mengenai perbankan syariah; dan (3) ulama tidak mempunyai dana untuk khusus mensosialisasikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Kendala bagi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan untuk mensosialisasikan Bank Pem-

---

<sup>255</sup>M. Syafii Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan* (Jakarta : Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 1999), h. 289.



biayaan Rakyat Syariah (BPRS) atau fatwa bunga bank adalah dana. Menurut H. M. Ghalib bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak mempunyai anggaran khusus untuk mensosialisasikan, namun Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempunyai "kekuatan" untuk mensosialisasikan fatwa tersebut dengan mengundang para mubaligh untuk penceramah pada khutbah jum'at dan majelis ta'lim. Karena itu, diharapkan kerjasama antara bank syariah dan ulama dengan fasilitas dari bank syariah.<sup>256</sup> Komitmen ulama untuk mengembangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Sulawesi Selatan menurut Arifuddin Ahmad bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan mengusulkan ada program bulletin dengan inti setiap fatwa disosialisasikan oleh penceramah<sup>257</sup>.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempunyai komitmen kuat untuk mensosialisasikan bank syariah dengan selalu mengkordinasikan agenda-agenda utama mengenai fenomenal sosial seperti agenda 4-6 November 2007 yang membahas mengenai perbankan syariah termasuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

### C. Hubungan Kerjasama Umara dan Ulama

Pepatah mengatakan "pengalaman adalah guru yang terbaik". Pengalaman Sudan mengembangkan bank syariah, adalah guru yang terbaik. khususnya bagi Indonesia. Konsep Bank Islam di Sudan dikenal tahun 1970-an, tetapi baru mulai diterapkan tahun 1980-an dengan *dual system*.

---

<sup>256</sup> H. Muhammad Ghaib, Sekertaris MUI dan dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Sulawesi Selatan, Mubaligh, *Wawancara*, Makassar 28 Maret 2008.

<sup>257</sup> Arifuddin Ahmad, *op. cit.*

Sekarang, tahun 2000-an kurang lebih 20 tahun kemudian, Sudan merupakan praktek terbaik dalam perbankan syariah, dimana yang tadinya sebagian besar produknya adalah *Murabahah*, maka sekarang hanya tinggal 30 persen saja yang *Murabahah*. Dan dulunya mengenal *dual system*, maka sekarang sudah disyariahkan banknya menjadi bank umum syariah.<sup>258</sup> Kunci rahasia majunya perbankan Sudan ternyata terletak *political will* dari pemerintah dan para pembuat peraturan. Artinya harus ada *political will* para eksekutif dan legeslatif sehingga terjadinya akselerasi perbankan syariah di masyarakat.

Sejalan dengan keterbukaan ulama menerima perbankan syariah dengan berbagai fatwa yang hingga hari ini dijadikan pedoman dalam menjalankan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Karena itu, keterkaitan antara umara dan ulama dalam konteks ke-negaraan adalah dua pihak yang sulit untuk dipisahkan. Begitupula dalam pengembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang sangat memerlukan dukungan dari pihak-pihak terkait yakni umara, ulama dan pihak perbankan sendiri.

Sepanjang perjalanan perkembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), ulama dan umara telah memberikan kontribusinya lewat peran atau posisi dalam lembaga keuangan tersebut walaupun ada yang belum maksimal dilihat dari hasil penelitian tersebut diatas.

Menurut Hendri Tanjung, pada prinsipnya semua unsur diharapkan untuk mensosialisasikan bisnis syariah kepada masyarakat. Tetapi sebagai skala prioritas agar akselerasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dapat

---

<sup>258</sup>Hendri Tanjung, "Akselerasi Sosialisasi Bisnis Syariah" dalam Wan Andy dan Ikhwan, "*Prospek Bank Syariah: Pasca Fatwa MUI*" (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, t.th) h. 49.

terjadi dari pihak eksekutif, legeslatif, ulama <sup>259</sup> serta pihak perbankan itu sendiri. Tambahnya bahwa unsur-unsur tersebut dengan tindakan sebagai berikut:

1. Para eksekutif (pemerintah) diminta berperan aktif mengembangkan bisnis syariah di daerahnya seperti yang dilakukan oleh Pemkot Tasik yang menyusun buku pelajaran ekonomi syariah untuk kelas I, II dan III Kota Tasik. Dengan harapan pelajaran ekonomi syariah sejak dini dapat diterapkan dalam keseharian.
2. Para Legeslatif termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Bank Indonesia diminta membuat undang-undang dan aturan-aturan yang mendukung berkembangnya bisnis syariah dan konsisten dengan sistem syariah.
3. Para Ulama aktif menyerukan dan memberi pemahaman kepada masyarakat tentang perbankan syariah pada setiap aktivitasnya seperti pada pengajian, ceramah maupun khutbah jum'at.<sup>260</sup>

Perkembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) akan sesuai dengan harapan jika stakeholder bekerja sesuai dengan ketentuan tugas masing-masing. Namun dalam pengembangan secara praktis belum ada kerjasama antara ketiga komponen tersebut. Sebagaimana yang diutarakan oleh Saevitri Lihanara, Pengawas Senior BI, bahwa selama ini belum ada kerjasama antara umara (Bank Indoensia) secara resmi untuk mengembangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), tapi akan diadakan kerjasama antara Asbisindo dengan pihak ulama dalam mensosialisasikan tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) ketika ulama berceramah dan semacamnya.<sup>261</sup>

---

<sup>259</sup> *Ibid*, h. 56.

<sup>260</sup> *Ibid*, h. 57

<sup>261</sup> Savietri Lihanara, *op.cit.*

Sejalan dengan pikiran H. M. Ghalib bahwa semestinya ada kerjasama secara formal antara ulama, umara dan pihak perbankan dalam bentuk pertemuan yang difasilitasi oleh pihak bank dengan mengundang para ulama, mubalig.<sup>262</sup> Dengan agenda pihak perbankan mendeskripsikan operasional Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dari sudut perbankan kepada ulama dan ulama akan memberikan penjelasan dari sudut pandang kesyariahan (kitab kuning). Sehingga, *output* dari ulama akan membuat masyarakat semakin paham dan mengerti, mengapa harus berbisnis syariah.

Keberadaan umara dan ulama dalam mengiringi perkembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dapat di apresiasi masyarakat untuk bergabung baik sebagai nasabah penabung maupun nasabah debitur yang tentunya mensejahterakan umat manusia.

Apalagi dalam Draf RUU Perbankan Syariah telah memberikan peluang besar bagi umara dan ulama dalam menjalankan tugasnya baik sebagai pengawas sekaligus sebagai Pembina. Sebagaimana pada pasal 24 bahwa pembinaan dan pengawasan di bank syariah (BUS dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) akan dilakukan oleh Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional (DSN) yang menyangkut aspek teknis perbankan syariah.<sup>263</sup> Bahkan Dewan Syariah Nasional (DSN) berwenang untuk mengusulkan kepada Bank Indonesia untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan untuk kepatuhan syariah.

Tindakan nyata tugas oleh umara maupun ulama sebagai pengawas terhadap BPRS akan memberikan hasil

---

<sup>262</sup> H. M. Ghalib, *op.cit*

<sup>263</sup> "Draf RUU Perbankan Syariah" Akses 27 Mei 2008, <http://Khay1328.multiply.com>

yang sehat bagi perkembangan ke depan. Hasilnya pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) akan lebih serius untuk menerapkan system syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) bisa bersaing secara sehat dengan lembaga keuangan sehingga pertumbuhan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tidak hanya sebagai pengisi kekosongan kebijakan dengan bolehnya mendirikan lembaga keuangan dengan system syariah atau tanpa bunga. Akan tetapi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) bias menjadi pioner perbankan dalam melayani masyarakat.

Selanjutnya dengan pengawasan yang solid dapat menambah dan menguatkan kepercayaan masyarakat terhadap operasional yang sesuai syariah, bertambahnya jumlah nasabah dan tentunya meningkatnya jumlah asset, akhirnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dapat diperhitungkan dalam kancah perbankan nasional.



## *Bagian 7*

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian yang dipaparkan terdahulu, maka beberapa hal yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran umara dalam pengembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) secara umum tergolong aktif. Namun jika dilihat peran yang dimainkan umara tersebut bahwa umara aktif dalam menanggapi hal-hal yang berkaitan dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) terlihat dalam peraturan-peraturan yang tertuang dalam kebijakan-kebijakan BI untuk lebih memperbaiki keadaan operasional Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bahkan umara sangat aktif dalam mengawasi operasional Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) demi kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan Bank Indonesia (BI) dan kepatuhan ke-syariahan. Selain itu, umara cukup aktif dalam melakukan sosialisasi, walaupun bukan hanya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang menjadi konsentrasi untuk disosialisasikan.
2. Peran ulama dalam pengembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Sulawesi Selatan secara umum belum maksimal. Dalam memberi fatwa, ulama masih kategori cukup aktif sehingga terdapat BPRS beroperasi belum sesuai syariah. Hal ini berindikasi pula bahwa pengawasan ulama Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk beropersi sesuai syariah pun cukup aktif. Demikian pula dalam sosialisasi, ulama tidak aktif

mensosilisasikan ke masyarakat tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

## **B. Implikasi Penelitian**

Adapun implikasi dari penelitian mengenai kontribusi ulama dan umara dalam mengembangkan perbankan syariah sebagai berikut:

1. Umara harus benar-benar cermat untuk membuat kebijakan-kebijakan dalam pengembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) terlebih terdapatnya lembaga-lembaga keuangan baik perbankan umum maupun non bank yang turut membuka unit sistem syariah.
2. Belum beroperasinya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sesuai syariah memberikan dampak buruk bagi perkembangan bank syariah, sehingga perlu ketegasan dalam pengawasan oleh umara dan ulama Dewan Pengawas Syariah (DPS).
3. Kurangnya sosialisasi tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) ke masyarakat diperlukan peran aktif ulama untuk memberikan pemahaman baik melalui media seminar, buku, diskusi, ceramah agar Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dapat diterima keberadaannya oleh semua lapisan masyarakat
4. Umara semestinya melakukan konsentrasi penuh terhadap pengembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) secara umum dengan mendirikan suatu lembaga khusus menangani bank syariah (memisahkan diri dari bank Indonesia) sehingga akselerasi pengembangan perbankan syariah dapat secepatnya dirasakan masyarakat khususnya masyarakat menengah ke bawah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: UGM Press, 2004.
- Abdullah, Daud Vicary dan Keon Chee, *Buku Pintar Keuangan Syariah, Cara Mudah Memahami Prinsip, Praktik, Prospek dan Keunggulan Keuangan Islam di Zaman Kita*. Singapore: Zaman, 2010
- Adnan, M. Akhyar, "Beberapa Isue di Sekitar Pengembangan Lembaga Keuangan Berdasarkan Syariah", *Makalah*, 2005
- Afdawaiza, "Isu Kontemporer di Sekitar Perbankan Islam (Antisipasi untuk Pengembangan ke Depan)", *Makalah*, Simposium Nasional I Sistem Ekonomi Islam di Sahid Hotel Yogyakarta, tanggal 13-14 Maret 2002
- Agustianto. Optimalisasi Dewan Pengawas Perbankan Syariah. [www.pesantrenvirtual.com](http://www.pesantrenvirtual.com). Akses 24 September 2007.
- Ahmad, Amrullah, et.al (Ed.), *Islamisasi Ekonomi: Suatu Sketsa Evaluasi dan Prospek Gerakan Perekonomian Islam*. Yogyakarta: PLT2M, 1985
- Ahmad, A. Kadir, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Makassar: Indobis Media Center, 2003
- Al-Dabbu, Ibrahim Fadhil, *Al-Iqtisād al-Islāmī: Dirāsah wa Tatbiq*. Jordan: Dar al-Manāhij, 2008
- Ali, Muhammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*. Jakarta : UI-Press, 1998.

- Ali, M. Suyuti, *Metodologi Penelitian Agama, Pendekatan Teori dan Praktek*, Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*. Cet. I, Jakarta : Sinar Grafika, 2008
- *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Alim, Muhammad Nizarul, *Muhasabah Keuangan Syariah*. Solo: Aqwam, 2011
- Al-Ayni, Syekh Imam Alamatul Badarudin Iby Muhammad Mahmud bin Ahmad. *Shahih Bukhari*. Juz ke-11, tt.: Daar Fikr, t.th.
- Al-Azday, Abu Daud Sulaiman bin Asyatsi al-Jasnany. *Sunan Abu Daud*, Juz ke-3. Suria: Daar al-Hadis, 1164 M.
- Amin, Ma'ruf, *Prospek Cerah Perbankan Islam*. Cet. I; Jakarta: LeKAS, 2007
- Anshori, Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah di Indonesia*. Cet. I; Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007
- , *Payung Hukum Perbankan Syariah (UU di Bidang Perbankan, Fatwa DSN-MU, Dan Peraturan Bank Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2007
- , *Prospek Perbankan Syariah dalam Pembangunan Ekonomi Umat*, Yogyakarta: UII Press, 2008
- , *Tanya Jawab Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2008
- , *Kapita Selektta Perbankan Syariah di Indonesia*. Cet. I; Yogyakarta: UII Press, 2008

- Anonim, Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syari'ah
- , *Sejarah dan Perkembangan Metode Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia, 1990
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- , *Bank Syari'ah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*. Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 1999
- , *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan* Jakarta : Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 1999.
- , *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Cet. 1; Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- , *Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- , "Bisnis dan Perbankan Dalam Perspektif Islam" *Jurnal Syariah*, Edisi IV; Ujung Pandang: Fak. Syariah, 1998M/1419H.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007
- Arief, Abdul Salam, *Analisis Perkembangan Bank Islam (Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia)*, Laporan penelitian Kelompok Pada Proyek Perguruan Tinggi Agama. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2000

Arifin, Zainul. "Dewan Pengawas Syariah," [www.shariah-life.wordpress.com](http://www.shariah-life.wordpress.com), Akses 27 Mei 2008.

-----, *Memahami Bank Syariah Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*. Jakarta: Alvabet, 2000.

Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007

Asro, Muhammad dan Muhammad Khalid, *Fiqh Perbankan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011

Badan Pusat Statistik. *Sulawesi Selatan dalam Angka 2007*. Makassar: BPS, 2007.

Bahresy, H. Salim Bahresy dan Said. *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid: VI, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1990.

Bank Indoensia. *Arsitektur Perbankan Indoensia*. Jakarta: Bank Indonesia, 2006.

----- . "Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/19/DPbs Jakarta 24 Agustus 2006" [www.bi.go.id/NR](http://www.bi.go.id/NR), Akses 27 Mei 2008.

----- . *Blue Print BPR*. Jakarta: Bank Indonesia, 2006.

----- . *Cetak Biru Bank Perkreditan Rakyat*. Jakarta: Bank Indonesia, 2006.

----- . *Islamic Banking Statistics 2007*. Jakarta: Bank Indonesia, 2007.

----- . *PBI No 6/17PBI/2004 Tentang BPRS Berdasarkan Prinsip Syariah*, [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), Akses 27 Mei 2008

----- . *PBI No. 8/22/PBI/2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum BPRS*, <http://www.bi.go.id/>, Akses 27 Mei 2008.

- \_\_\_\_\_. *Peraturan Bank Indonesia Tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPRS*. Jakarta: Bank Indonesia, 2006.
- \_\_\_\_\_. *Pokok-Pokok Ketentuan Pendirian BPR/BPRS*. Makassar: Bank Indonesia Makassar, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Statistik Perbankan Syariah (Islamic Banking Statistics)*, Januari 2011
- \_\_\_\_\_, *Perbankan Syariah Lebih dari Sekedar Bank*. Jakarta: Bank Indonesia, 2009
- Basri, "Ikhwan Abidin. Beberapa Kendala Perbankan Syariah di Indonesia". *Republika*, No. 147 Tahun ke-11, 9 Juni 2003.
- Biken, Bogdan R.C dan N. *Qualitatif Research for Education and Intrucduction to Theory*. Boston, USA: Aly and Bacon, Inc., 1990.
- Billah, Muhammad Ma'shum, *Modern Financial Transactions Under Syari'ah*. Selangor: Ilmiah Publisher, 2003
- Buhkhari, Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah. *Shahih Bukhari*, Juz I, ttp.: Daar al-Fikr, 1401H/1981M.
- Bungin, Heru Irianto dan Burhan. *Pokok-Pokok Penting Tentang Wawancara*. Jakarta: PT RajaGrafindo persada, 2006.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996
- Departeman Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2004.

- \_\_\_\_\_. *Ensiklopedi Islam di Indonesia*. Jakarta: CV. Anda Utama, 1992.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. ed.II; Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Dewi, Gemala, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia* Ed. I; Jakarta: Kencana, 2004
- Djamil, Fatharrahman, *Urgensi Undang-undang Perbankan Syariah di Indonesia*, *Jurnal Hukum Bisnis*, Agustus 2002
- Djazuli, H.A., *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*. Cet. V; Jakarta: Prenada Media, 2005
- DSN MUI dan BI. *Himpunan Fatwa DSN*. ed. ke-2, Jakarta: Pt Intemesa, 2003.
- Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murāhjabah*
- Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Pembiayaan Musyārakah*
- Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Pembiayaan Mud{ārabah*
- Fatwa DSN-MUI No. 13/DSN-MUI/IX/2000 Tentang *Uang Muka dalam Murāhjabah*
- Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005: *Penyelesaian Piutang Murāhjabah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar*
- Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005: *Penjadwalan Kembali Tagihan Murāhjabah*

Fatwa DSN-MUI No. 49/DSN-MUI/II/2005: Konversi Akad *Murāhjabah*

Fauzi, Yuslam "Peranan, Peluang dan Tantangan Bank Syariah sebagai Salah Satu Lembaga Pemberdayaan Umat dalam Memasyarakatkan Ekonomi Syariah". *Makalah* pada Seminar Nasional Ekonomi Islam dan Kongres KOKASEI se-Indonesia, Semarang 12 Mei 2000

Fuady, Munir, *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999

Hamid, Arfin, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia, Aplikasi dan Prospektifnya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011

Hasan, Hasbi, *Pemikiran dan Perkembangan Ekonomi Syariah di Dunia Islam Kontemporer*. Jakarta: Gramata Publishing, 2011

Hasanudin, *Bentuk-Bentuk Perikatan (Akad) dalam Ekonomi Syariah, dalam Kapita Selekt Perbankan Syariah*. Jakarta: Pusdiklat Mahkamah Agung RI, 2006

Huda, Nurul dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010

Hulwati, *Ekonomi Islam Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol dan Ciputat Press Group, 2009

Gazali, Imam al-Alamatul akl-Ulamail Akhirat yang diterjemahkan oleh Fuad Kauma dengan judul *Ulama Akhirat*. Jakarta: CV. Pustaka Mantiq, 1996.

- Glasse, Cyril. *The Concise Ensyclopedia of Islam*, diterjemahkan oleh Ghuftron A. Mas'adi dengan judul *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT RajaGafindo Persada, 2002.
- Gusman, Irman "Perlu Akseleri Perbankan Syariah" [Bisnis Syariah], *Republik*, No. 219 Tahun ke-11, 21 Agustus 2003.
- Harahap, Sofyan Syafii. *Akuntansi Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997
- Hooker, MB. *Islam Mazhab Indonesia; Fatwa-fatwa dan Perubahan Sosial*. cet. II; Jakarta: Teraju, 2003.
- Husein, Muchtar. *Konsepsi Ulama Menurut al-Qur'an (Abstrak Disertasi)*, Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 1997.
- Imarah, Mustafa Muhammad. *Terjemahan Jawahirul Bukhari* Semarang: Darul Ihya Indonesia, 1994.
- Janwari, A. Djazuli dan Yadi. *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Kamaludin, Lukman Hakim, *Prospek Penyaluran Dana Bank Syariah*, Makalah pada Pelatihan Dasar Perbankan Syariah di Jakarta 2007.
- Kara, Muslimin. "Reformasi Kebijakan Perbankan Islam di Indonesia", *Makalah*, Makassar 10 September 2003.
- Karim, Adiwarman Azwar, "Praktek Pengembangan Perbankan Syariah di Negara-negara Islam", Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Hukum Ekonomi, FHUI, Depok, 26 Pebruari 2003



- , *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Karim Business Consulting. *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: Biro Perbankan Syariah BI, 2001.
- Lowes, Cristopher Pass and Bryan. *Dictionary of Economics*, diterjemahkan oleh Tumpal Rumpea dan Posman Halolo "Kamus Lengkap Ekonomi". ed.ke-2; Jakarta: Erlangga, 1998.
- Mathar, Muhammad Qasim. "Jendela Langit: Ulama dan Kekerasan," *Fajar*, Selasa 10 April 2007.
- Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Yogyakarta : UII Press, 2000
- , *Lembaga Ekonomi Syariah*. Cet. I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007
- , *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: AMP YKPN, 2002
- Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*. Cet. III; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004
- Muljawan, Ahmad Soerko Tratmono dan Dadang. *Penilaian Mengenai Penerapan 25 Basle Core Principle dalam Pengaturan dan Pengawasan Bank Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia, 2006.
- Mustafa, Hasan. *Perspektif Dalam Psikologi Sosial*. ttp: tp, 2007.
- Najamuddin. "Aplikasi Musyarakah dan Mudharabah dalam Perbankan Syariah." [www.badilag.net/data/Artikel/Ekonomi](http://www.badilag.net/data/Artikel/Ekonomi), Akses 27 Mei 2008
- Nasution, Khoiruddin. *Riba dan Poligami : Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar kerjasama dengan Academica Yogya, 1996.

- Naysabury, Imam Abu Husain Muslim bin al-Hallaj al-Qusyairy an- *Sahih Muslim*, Juz ke-3. Bairut : Daar Kutub Ilmiyah, t.th.
- Neufeldt, Victoria dkk. *Webster's New World*. America: Webster's New World Dictionary of America English, 1995.
- Poerwataatmadja, Karnaen A. *Apa dan Bagaimana Bank Islam* Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1992.
- Perwataatmadja, Karnaen, "Peluang dan Strategi Operasional Bank Muamalah", Makalah. Seminar sehari "Kiat Bisnis dari Sudut Pandang Islam", di Garden Palace Hotel Surabaya, tanggal 12 September 1992
- Prayogo, Imam. *Kyai dan Politik: Membaca Citra Politik Kyai* Malang: UIN Malang Press, 2007.
- Qardhawi, Yusuf. *Daurul Qiyam Wa Akhlak Fil Iqtishadi Islami* diterjemahkan Zainal Arifin Lc dan Dahlia Husian dengan judul Norma dan Etika Ekonomi Islam. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Qazwiny, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*. Juz ke-2; tt:tp,tth.
- Qurays, Abu Fidaal ibnu Katsir. *al- Tafsir al-Qur'an al-Adzhim*. Juz III; Madinah: Maktabat-Ululm wal al Hakim, 1413H/1993M.
- Rahadjo, M. Dawan. *Esei-Esei Ekonomi Politik*. t.p: LP3ES, 1988.
- Rahman, Afzalu. *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*. Jakarta: Yayasan Swarna Bhummy, 1997.
- Republik Indonesia. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Jakarta: Sinar Grafika, t.th.
- Ridjal, Tadjoeer. *Metode Bricolage dalam Penelitian Sosial*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.

- Rifai', Muhammad. *al-Fiqh Islami*. Semarang: CV. Toha Putra, 1978
- Rumadi. "Perda Syariat Islam: Jalan Lain Menuju Negara Islam?," *Tashwir*, Edisi No. 20. Jakarta: LAKPESDAM Nahdatul Ulama, 2006.
- Rusdji. *Manajemen Zakat, Bank, dan Asuransi*. Makassar: t.p., 1999.
- Santoso, El dan S. Prianto. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* Surabaya: Terbit Terang, t th.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1994.
- Siradjuddin. *Analisis Pengaruh Karakteristik Pribadi, Kompetensi Individu, Sikap Dan Kemampuan Komunikasi Pemimpin Terhadap Kinerja Karyawan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Di Sulawesi Selatan*, Disertasi, Makassar: Unhas, 2008.
- Subkhy, Badruddin H *Dilema Ulama dalam Perubahan Zaman*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Sudiono, Anas. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Cet XIV; Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- Sugiyono. *Metode penelitian Administrasi*. Bandung: CV Alfabeta, 2005.
- Sumitro, Warkum. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait BMI dan Takaful di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Surahman, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode, dan Teknik*. Bandung: Tarsito, 1982.
- Tanjung, Hendri. "Akselerasi Sosialisasi Bisnis Syariah" dalam Wan Andy dan Ikhwan, "Prospek Bank Syariah: Pasca Fatwa MUI". Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, t.th.

- Tim Penulis DSN MUI. *Himpunan Fatwa DSN*. Jakarta: PT Intermedia, 2003.
- Warson, Ahmad. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap* Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Zada, Khamami. "Perda Syariat: Proyeksi Syariatisasi yang Sedang Berlangsung, Riset Redaksi, Edisi No. 20, Jakarta: LAKPESDAM Nahdatul Ulama, 2006.
- Zaky, Abu. "Peran DSN," [www.pa-kendal.net](http://www.pa-kendal.net), Akses 27 Mei 2008.
- Zohra, Ahmad. *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999*. Yogyakarta: PT Lkis Pelangi, 2004.
- Zuhri, Muhammad. *Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan (Suatu Tilikan Antisipatif)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada Kerjasama Badan penerbitan IAIN Walisongo Press, 1997.

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



Siradjuddin, lahir di Ujung Pandang, 09 Mei 1966. Pangkat Lektor Golongan dan Ruang Penata Tingkat I / III /d. Pendidikan S.D. sampai S3 (Doktor) ditempuh di kota Ujung Pandang yang sekarang berubah nama menjadi Kota Makassar Sulawesi Selatan. Lulus SD Tamalanrea tahun 1980, lulus SMP Muhammadiyah tahun 1983, dan lulus SMA Negeri 6 tahun 1986, lulus studi S1 di Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen

Universitas Muslim Indonesia tahun 1994, Lulus Studi S2 tahun 2000 dan S3 tahun 2008 di Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Konsentrasi Manajemen di Pascasarjana Universitas Hasanuddin tahun 2008. Pengalaman kerja sebagai sebagai Tenaga Pengajar pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Manajemen Yayasan Pendidikan Bongaya Ujung Pandang tahun 1994 – 2004, Dosen tidak tetap pada Universitas Cokroaminoto Tahun 1995 – 2002, Dosen tidak tetap pada STIE NOBEL Makassar Tahun 2001 – sekarang, Dosen tidak tetap pada STIMLASH Jaya Makassar Tahun 2003 – sekarang, Dosen tidak tetap pada STMIK Handayani Makassar Tahun 2005 – sekarang, Dosen tidak tetap pada Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2010 – sekarang, dan sejak tahun 2005 bertugas sebagai Tenaga Pengajar Tetap pada Jurusan Manajemen Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Buku yang sudah ditulis diantaranya: 1) Perilaku Kepemimpinan dan Kinerja Karyawan Bank Per-kreditasi Rakyat di Sulawesi Selatan, tahun 2011; 2) Pengantar Teori Ekonomi Makro, tahun 2012.





ALAUDDIN UNIVERSITY PRESS

